

OUTLOOK
KEMENTERIAN AGAMA 2024
"MAKIN DIGITAL KIAN MENJANGKAU UMAT"

Outlook
Kementerian Agama 2024

Makin Digital Kian Menjangkau Umat

BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Tim Penyusun



PENASIHAT
Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama RI
Saiful Rahmat Dasuki, Wakil Menteri Agama RI

PENGARAH
Nizar Ali
Faisal
Muhammad Ali Ramdhani
Hilman Latief
Kamaruddin Amin
Jeane Marie Tulung
I Nengah Duija
Supriyadi
Suparman
Muhammad Aqil Irham
Abu Rokhmad
Albertus Magnus Adiyarto Sumardjono
Abdul Rochman
Mohammad Nuruzzaman
Ishfah Abidal Aziz
Wibowo Prasetyo
Abdul Qodir
Hasan Basri Sagala

PENANGGUNG JAWAB
Suyitno

KETUA TIM
M. Arskal Salim GP.

SEKRETARIS
Abdul Aziz Sidqi

WAKIL SEKRETARIS
Haris Burhani

ANGGOTA
Arfi Hatim
Mohsen
Moh. Ishom
Syafi'i
Mastuki

EDITOR
Abdul Jamil Wahab, BRIN
Farida Ishak
Husein Hasan Basri, BRIN
Ridwan Bustamam
Haris Burhani

REVIEWER
Mahmud Syaltout Syahidulhaq Qudratullah
Hasanuddin Ali
Mariana Ariestyawati

KONTRIBUTOR
Abdul Hakim
Rosidin
Abdul Syukur
Agus Mulyono
Maudy Mishfanny
Ali Misthofa
Ali Iqbal

LAYOUTER
Mochamad Azis Nasution
Erbhayu Prananta

SAMBUTAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Yaqut Cholil Qoumas



Saya mengucapkan Syukur dengan hadirnya *Outlook* Kementerian Agama 2024, yang berisi kontemplasi yang mendalam atas tantangan dan peluang, proyeksi kehidupan keagamaan ke depan, evaluasi dan tinjauan kritis atas capaian kinerja, dan strategi program ke depan guna mewujudkan layanan keagamaan dan peningkatan kualitas kehidupan beragama.

Saat ini, kita banyak menghadapi isu dan tantangan global, regional, dan nasional, mulai dari isu pemulihan pasca pandemi, konflik geopolitik, perubahan iklim, dan revolusi teknologi. Di saat kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19 berangsur mulai membaik, muncul isu geopolitik yang menambah komplikasi dan kerumitan dari pemulihan ekonomi. Isu pemanasan global juga telah banyak melahirkan peristiwa cuaca ekstrem di sebagian besar dunia. Sementara revolusi teknologi telah banyak memengaruhi kebiasaan masyarakat dalam sejumlah aspek, seperti cara bekerja, berproduksi, *marketing*, konsumsi, termasuk juga paham dan sikap keagamaan.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang efektif untuk mengatasi berbagai dampak dari dinamika global tersebut. Dibutuhkan inovasi yang solutif dan visioner. Kementerian Agama dituntut berperan aktif untuk melindungi negara dari berbagai tantangan dan disrupsi yang menimbulkan guncangan luar biasa.

Sebagaimana telah diketahui bersama, untuk mewujudkan pembangunan di bidang agama, Kementeri Agama telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Selain itu, guna mempercepat peningkatkan layanan keagamaan dan peningkatan kualitas kehidupan beragama, Kementerian Agama juga telah menetapkan 7 (tujuh) program prioritas Kementerian Agama.

Pada awal tahun 2023, saya juga menyampaikan pesan kepada semua jajaran ASN Kementeri Agama yaitu: meningkatkan profesionalisme ASN, komitmen anti-korupsi, respons cepat penanganan isu dan pengaduan masyarakat (Dumas), akselerasi program prioritas, akselerasi sertifikasi halal, dan peningkatan kualitas kehidupan di tahun kerukunan umat beragama.

Sebuah ungkapan menyatakan "Proses tidak mengkhianati hasil", di tahun 2023 lalu, kita mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari banyak pihak terhadap kinerja-kinerja Kementerian Agama. Mereka mengapresiasi atas sejumlah capaian positif dan prestasi yang dinilai membanggakan yang dilakukan Kementerian Agama.

Pada tahun 2023, juga telah berlangsung serangkaian rapat kerja Kementerian Agama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2023 untuk merumuskan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029. Khusus terkait arah kebijakan pembangunan bidang agama dan pendidikan, terdapat beberapa catatan evaluatif dari Bappenas terhadap capaian Renstra Kementerian Agama 2020-2024, harus diakui masih ada beberapa program Kemenag yang mesti dituntaskan pada tahun 2024, baik di bidang layanan keagamaan maupun bidang pendidikan.

Atas dasar itu, melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama Tahun 2024, selain merumuskan strategi program yang kontekstual guna menjawab tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan, kita juga harus secara serius mengevaluasi capaian atas kinerja yang telah berhasil kita peroleh, dan kemudian harus dituntaskan di tahun 2024.

Sebagaimana tahun sebelumnya, Rakernas Kementerian Agama 2024 ini akan dibekali dengan Outlook Kementerian Agama Tahun 2024. *Outlook* Kementerian Agama 2024 ini diharapkan dapat menjadi referensi dan panduan bagi Satuan Kerja (Satker) Kementerian Agama dalam merumuskan program kerja yang akan ditetapkan pada tahun 2024.

Sebagai penutup, saya berterimakasih kepada semua aparatur Kementerian Agama di manapun bertugas dan ditempatkan, atas segala dedikasinya, serta dukungan moral maupun pemikiran yang inovatif dan visioner bagi Kementerian Agama. Semoga upaya ini menjadi 'amal jariyah kita bersama, sebagai bagian dari transformasi pembangunan bidang agama yang berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Jakarta, 31 Januari 2024

Menteri Agama

Yaqut Cholil Qoumas

Sekretaris Jenderal
Kementerian Agama Republik Indonesia

Nizar Ali



Kami panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Pengasih, bahwa "*Outlook* Tahun 2024" telah selesai disusun dan disajikan dalam Rakernas Kementerian Agama kali ini. Keberadaannya sangat dibutuhkan untuk diselesaikan pada awal tahun, sebagai petunjuk bagi arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama pada tahun 2024 ini.

Secara umum, kebijakan dan strategi pencapaian target program Kementerian Agama tahun 2024 telah digariskan Menteri Agama. Salah satu amanat Menteri Agama adalah menyusun berbagai langkah strategis dan fokus pada program prioritas dan *legacy*.

Salah satu dari 13 kebijakan dan strategi Kementerian Agama, sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kemenag 2020-2024 adalah "Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel". Strategi yang akan dilakukan dalam konteks ini adalah peningkatan koordinasi untuk harmonisasi, sinkronisasi, dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui program strategis yang disebut *Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama*. Dalam implementasinya, perlu dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain, lembaga keagamaan, swasta, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga internasional.

Kebutuhan adanya koordinasi dan kerja sama sangat diperlukan, terutama dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan moderasi beragama, kontra radikalisme, pencegahan terorisme, penanganan bencana, pornografi, pengelolaan dana sosial keagamaan, pengentasan penyakit sosial, penyediaan sarana dan prasarana rumah ibadah, FKUB, haji dan umrah, jaminan produk halal, pengembangan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, afirmasi kepada daerah 3T.

Outlook tahun 2024 ini menetapkan langkah strategis pelaksanaan tahun 2024, diantaranya: pertama, antisipatif dan responsif terhadap tantangan kebutuhan layanan keagamaan serta layanan pendidikan. Kedua, menyusun berbagai langkah strategis dan tidak menjadikan anggaran sebagai strategi tunggal pencapaian target yang ditetapkan.

Atas dasar itu, Outlook tahun 2024 ini sangat penting dan strategis guna mewujudkan visi-misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Rentra tahun 2020-2024 yang telah disusun.

Kami berharap, pada tahun 2024 ini, seluruh aparatur Kementerian Agama dapat mengerahkan segenap daya upaya, bersinergi, dan bertekad kuat dalam menjalankan tugasnya masing-masing, sesuai strategi kebijakan yang tertuang dalam *Outlook* tahun 2024 tersebut, hingga pelayanan yang diberikan Kementerian Agama kepada masyarakat bersifat premium tetapi terjangkau.

Jakarta, 31 Januari 2024

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.

Inspektur Jenderal
Kementerian Agama Republik Indonesia

Faisal



Syukur *alhamdulillah*, Outlook tahun 2024 ini dapat diterbitkan dan menjadi salah satu materi penting dalam Rakenas. *Outlook* ini sangat diperlukan sebagai strategi kebijakan Kementerian Agama di tahun 2024, sebagai tahun yang penuh tantangan dan dinamika bagi kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Indonesia. Melalui diversifikasi layanan keagamaan dan pendidikan, Kementerian Agama terus berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat beragama yang moderat, cerdas dan unggul.

Atas dasar itu, di awal tahun 2024, disusunlah *Outlook* Kementerian Agama tahun 2024, yang berisi strategi kebijakan sebagai panduan dalam menetapkan rencana aksi dan program yang harus dilaksanakan dalam memberikan layanan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, dan tata kelola serta akuntabilitas birokrasi.

Berbagai tantangan akan dihadapi para ASN Kemenag di tahun 2024. Salah satunya hajatan Pemilu 2024 dimana para ASN Kemenag kemungkinan terlibat dalam politik praktis. Disaat godaan datang seperti diajak untuk terlibat menjadi juru kampanye kandidat tertentu ataupun partai politik, diperlukan netralitas dan profesionalitas para ASN Kemenag.

Sebagaimana telah berjalan di tahun 2023 terdapat Agenda Prioritas Pengawasan (APP) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Tema yang diangkat *"Transformasi Pengawasan: Optimis Mengawal Kinerja"* sebagai dasar pelaksanaan fungsi audit intern yang adaptif dan agile guna menjawab kebutuhan Kementerian Agama. APP Tahun 2023 menggambarkan peta pengawasan utama Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yang berfokus pada 3 sektor, mencakup 10 tema dan 29 topik dalam pembangunan bidang agama.

APP ini juga diharapkan dapat membantu mengarahkan dan menjadi panduan pengawasan bagi Inspektorat Jenderal agar pengawasan menjadi lebih strategis dan bisa berkontribusi terhadap pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. APP Tahun 2023 Inspektorat Jenderal Kementerian Agama adalah pedoman yang dapat digunakan oleh semua *stakeholder* Kementerian Agama, terutama Menteri Agama dalam memenuhi harapan akan manfaat pengawasan intern yang memastikan bahwa program Kementerian Agama tidak hanya *sent* tapi juga *delivered* untuk kesejahteraan masyarakat.

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama merupakan salah satu institusi yang bekerja untuk menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Agama. Atas dasar itu, Itjen akan semaksimal mungkin melakukan pengawasan atas dilaksanakan dan tidaknya strategi kebijakan yang ada dalam *Outlook* 2024 ini.

Itjen akan bekerja maksimal untuk mengawal *Outlook* 2024 ini. Dengan adanya sejumlah strategi kebijakan yang handal sebagaimana tertuang dalam *Outlook* tahun 2024 ini, Kementerian Agama akan mampu menyintasi berbagai persoalan tersebut, hingga Kementerian Agama mampu meningkatkan tata kelola birokrasi yang lebih efektif, efisien, akuntabel, bersih, responsif, dan melayani.

Jakarta, 31 Januari 2024

Inspektur Jenderal Kementerian Agama

Dr. Faisal, S.E., M.Si., CA, CSEP, QIA

Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Kementerian Agama Republik Indonesia

Amien Suyitno



Puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, bahwa *Outlook* Kementerian Agama tahun 2024 ini akhirnya telah selesai disusun. *Outlook* ini sengaja disusun menjelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama Tahun 2024, yang isinya merupakan hasil teropong Kementerian Agama atas berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi, proyeksi ke depan, hasil capaian kinerja Kementerian Agama tahun 2023, dan target yang ingin dicapai pada tahun 2024.

Selain mendeskripsikan dan menganalisis berbagai tantangan dan peluang yang ada, *Outlook* Kementerian Agama tahun 2024 ini, juga mengevaluasi capaian Kemenag di tahun 2023. Sebagaimana telah diketahui melalui media, Kementerian Agama mendapatkan banyak penghargaan atas berbagai capai dan prestasinya di tahun 2023 lalu. Hal tersebut, tidak membuat Kementerian Agama larut dalam euphoria, melainkan berusaha melakukan evaluasi secara kritis atas berbagai program yang telah dilakukan pada tahun 2023 tersebut.

Dengan adanya berbagai tantangan dan persoalan yang kompleks dan problematik di tahun 2023, harus diakui, masih ada beberapa program yang belum dapat direalisasikan oleh Kementerian Agama. Atas dasar itu, dalam rumusan *Outlook* Kementerian Agama tahun 2024 ini, di dalamnya juga dibahas berbagai strategi kebijakan untuk dapat mewujudkan beberapa program yang di tahun 2023 belum berhasil direalisasikan.

Outlook Kementerian Agama tahun 2024 ini sangat penting, karena dapat menjadi panduan bagi aparatur Kementerian Agama, dalam memberikan layanan keagamaan dan pendidikan agama dan keagamaan yang yang adil, inklusi, maju, transporan, akuntabel, inovatif, dan menjangkau semua kelompok masyarakat, serta membangun tata kelola dan akuntabilitas birokrasi. Dalam *Outlook* Kementerian Agama tahun 2024 ini, juga terdapat lampiran Rencana Aksi Nasional (RAN) program tiap satker eselon I Kemenag.

Hadirnya *Outlook* Kementerian Agama tahun 2024 ini, menjadi kebutuhan bersama, karena dapat menjadi referensi terkait pembangunan bidang keagamaan bagi banyak pihak di tahun 2024, khususnya menghadapi tahun politik di 2024 ini. Semoga kita dapat mengatasi berbagai tantangan dan dinamika kehidupan sosial-keagamaan yang kita hadapi, hingga berhasil mewujudkan transformasi pembangunan bidang keagamaan menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta, 31 Januari 2024

Kepala Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama

Prof. Dr. Suyitno, M.Ag

Overview Outlook 2024

Outlook Kementerian Agama tahun 2024 (selanjutnya disebut *Outlook* 2024) adalah sebuah ringkasan keadaan Kementerian Agama yang memuat pandangan, apa yang mungkin terjadi dan harapan yang dituju dengan memperhatikan tantangan yang ada. Selain itu juga merupakan ringkasan kebijakan dan ketercapaian program layanan kegamaan dan pendidikan pada *Outlook* 2023 serta kebijakan-kebijakan penguatan dan perluasan yang akan diambil di tahun 2024. Dokumen *outlook* ini pertama kali disusun di 2023 oleh Balitbangdiklat atas arahan dan perintah langsung dari Gus Menteri Agama. Pada tahun 2024 ini Balitbangdiklat kembali mendapatkan perintah Gus Men untuk menyusun Outlook 2024.

Outlook 2024 ini menjadi salah satu referensi dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama tahun 2024. Naskah ini dikembangkan dari pertemuan diskusi terbatas bersama pimpinan tiap unit eselon 1 Kementerian Agama yang berlangsung secara intensif dan maraton tanggal 11-16 Januari 2024). Di tiap pertemuan tersebut, diskusi dilakukan dengan berfokus pada tiga poin utama: 1) kondisi saat ini atau baseline, 2) kendala dan tantangan yang muncul, dan 3) mitigasi yang telah dilakukan serta strategi terobosan yang akan dirancang.

Hasil diskusi tersebut diolah secara kualitatif dan dianalisis secara tematik dengan memberi perhatian khusus pada isu-isu penting. Tim *Outlook* 2024 melibatkan beberapa pihak sebagai contributor penulis, penulis dan editor serta *reviewer* untuk memberi masukan dan pengayaan atas naskah yang disiapkan.

Keseluruhan naskah kemudian dilengkapi dengan bahan-bahan yang menjadi *Front Matters* dan lampiran-lampiran berupa Rencana Aksi Nasional Program dari tiap-tiap unit satker eselon 1 Kemenag.

Outlook 2024 ini dapat tersusun dengan baik berkat tersedianya dokumen resmi Kementerian Agama yang dikeluarkan oleh masing-masing unit eselon 1 dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, termasuk laporan dari berbagai hasil kajian dan survei Balitbangdiklat.

Akhirnya, semoga *Outlook* 2024 ini membawa manfaat menjadi acuan bagi arah Kementerian Agama ke depan.

Penyusun

Daftar Isi

BAB I MEMBACA TANTANGAN DAN PELUANG 1
1. Panggung Global 2
A. Persaingan Geopolitik 2
B. Kemelut Ekonomi Keuangan 3
2. Lanskap Nasional 4
A. Hibernasi Politik Identitas 4
B. Kegalauan Sosial Gen Z 7
C. Semua Serba Digital 9

BAB II DIVERSIFIKASI LAYANAN KEAGAMAAN BERBASIS DIGITAL 11
1. Memperluas Arena Moderasi Beragama 12
2. Menuntaskan Perangkat Cegah Konflik Keagamaan 15
3. Mempertegas Fungsi Penyuluh Agama 19
4. Menggelorakan Industri Halal 22
5. Melayani Jemaah Haji Sepenuh Hati 25
6. Mengatrol Aksesibilitas, Kualitas, dan Daya Saing Pendidikan 27
7. Memaksimalkan Fungsi Dana Sosial Keagamaan 30
8. Memperkuat Profesionalisme ASN 33
9. Menjawab Kebutuhan Regulasi Keagamaan 36

BAB III PROYEKSI DAN PRESKRIPSI:
STRATEGI PENGUATAN DIGITALISASI LAYANAN 39
1. Ekosistem Moderasi Beragama yang Ekspansif 40
2. Meneguhkan Politik Kebangsaan 43
3. Memenangkan Pertarungan Digital 45
4. Menyajikan Layanan Keagamaan yang Premium tapi Terjangkau 47
5. Mengusung Layanan Pendidikan yang Inovatif dan Transformatif 51
6. *Smart* ASN Menjawab Kebutuhan Era Digital 54
7. Mengoptimalkan Dana Umat untuk Pengentasan dan Pemberdayaan 56

LAMPIRAN 59

BAB I

MEMBACA TANTANGAN DAN PELUANG



1. Panggung Global

A. PERSAINGAN GEOPOLITIK

Dampak konflik geopolitik yang terjadi di negara-negara dunia memengaruhi negara-negara lain. Saat ini, lebih dari puluhan konflik berkecamuk di seluruh dunia-mulai dari konflik Israel-Hamas di Jalur Gaza, konflik Rusia-Ukraina di Eropa, perang saudara di Myanmar, hingga kekerasan di Sudan Selatan.

Konflik yang sudah lama terjadi antara Israel dan Palestina, kembali mencuat setelah Hamas menyerang Israel dengan meluncurkan 5000 roket dan menewaskan 1.400 orang pada 7 Oktober 2023. Serangan itu dibalas oleh Israel dengan membombardir Jalur Gaza. Episentrum konflik adalah di Gaza, namun konstelasi konflik tersebut, bukan hanya melibatkan Palestina dan Israel yang sudah berlangsung sejak 1948, tapi juga Lebanon, Yaman, dan Syria. Bahkan dalam 10 tahun terakhir, Iran, Saudi, dan Qatar juga terlibat dalam konflik.

Hal yang paling terdampak oleh konflik Israel-Palestina adalah bidang ekonomi. Gerakan-gerakan dukungan dan boikot selama konflik Israel-Palestina berlangsung memengaruhi berbagai perusahaan multinasional. Sebuah hasil riset menyimpulkan, imbas dari aksi boikot terlihat pada penurunan harga saham pada 30 perusahaan terpilih dari negara pendukung Israel yaitu Amerika, Jerman, Perancis, Inggris, dan Swiss. Kondisi ini menyebabkan ketidakstabilan perekonomian global dan Indonesia. Selain dampak ekonomi, perang Palestina dan Israel juga berdampak di bidang politik dan lingkungan.



Aksi Bela Palestina di Monas, Minggu, 5/11/2023

Tensi perang Israel dan Hamas yang terus meningkat, kondisi ini dikhawatirkan akan mempengaruhi laju ekonomi global yang akan turut berdampak ke berbagai negara termasuk Indonesia. Apabila beberapa negara Timur Tengah memutuskan untuk ikut dalam konflik ini, maka dapat memberikan dampak besar di berbagai bidang. Pihak-pihak yang terlibat perang, berpotensi melakukan pemotongan produksi minyak global dalam rangka membiayai perang. Hal ini berpotensi



Apabila beberapa negara Timur Tengah memutuskan untuk ikut dalam konflik ini, maka dapat memberikan dampak besar di berbagai bidang. Pihak-pihak yang terlibat perang, berpotensi melakukan pemotongan produksi minyak global dalam rangka membiayai perang. Hal ini berpotensi mendisrupsi pasar keuangan Indonesia, APBN, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia.

mendisrupsi pasar keuangan Indonesia, APBN, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sementara itu, perang antara Rusia dan Ukraina juga masih berlangsung, sejak Rusia melakukan invasi ke Ukraina pada 24/2/2022. Hingga kini, konflik masih berlangsung, tidak bisa dipastikan kapan berakhir. Perang Rusia dan Ukraina telah mengakibatkan hancurnya banyak fasilitas publik, korban jiwa, dan terjadinya gelombang pengungsi. Hampir 2,3 juta warga Ukraina memilih mengungsi ke negara tetangga.

Perang antara Rusia dan Ukraina memiliki dampak atau konsekuensi terbesar berupa krisis kemanusiaan dengan dampak yang signifikan terhadap sektor sosial dan ekonomi. Ratusan warga sipil tewas, luka-luka dan kehilangan hak dasarnya untuk hidup damai akibat perang. Apabila konflik Hamas-Israel dan Ukraina-Rusia berkepanjangan, dipastikan akan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga memicu kenaikan harga komoditas, pangan, dan energi.

B. KEMELUT EKONOMI KEUANGAN

Perang juga berdampak bagi terjadinya inflasi di banyak negara. *International Monetar Fund* (IMF) atau Dana Moneter Internasional mengatakan pemulihan ekonomi global akibat pandemik Covid-19 dan perang Rusia dengan Ukraina melambat dengan adanya konflik Israel dengan Hamas. Konflik antara Palestina dan Israel telah menjadi salah satu konflik terpanjang dan paling rumit dalam sejarah dunia modern. Salah satu dampak atau pengaruh yang ditimbulkan dari konflik tersebut adalah di bidang ekonomi, seperti penurunan harga minyak dunia, gangguan perdagangan internasional, dampak terhadap sektor keuangan, hilangnya investasi, dan ketidakpastian geopolitik.

Konflik Israel dan Palestina juga tidak hanya berdampak pada persoalan ekonomi dan keuangan dunia, namun juga potensial memicu konflik horizontal antara kelompok masyarakat di negara-negara yang memiliki hubungan emosional dengan dua negara tersebut. Sejak terjadinya konflik Israel dan Hamas Palestina, aksi-aksi unjuk rasa terjadi di sejumlah kota di Eropa dan Amerika Serikat. Bentrokan nyaris terjadi antara pendukung Israel dan Palestina di kota New York pada 9/10/2023. Sementara di tanah air, bentrokan massa antara pendukung Palestina dan ormas pro Israel terjadi di Kota Bitung, Sulawesi Utara, pada Sabtu 25/11/2023 sore. Bentrokan antara yang pro dan kontra Israel maupun Palestina, bisa terjadi di daerah lainnya, hingga potensial bagi terjadinya konflik.

Dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB yang diadakan di Markas Besar PBB pada 24 Januari 2024, Sebagai wakil Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajukan tiga tuntutan dalam debat terbuka DK PBB tersebut yaitu, gencatan senjata permanen sesegera mungkin, penghentian pasokan senjata ke Israel, dan diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB. Debat Terbuka tersebut adalah debat ke-3 yang telah diselenggarakan DK PBB sejak perang Israel-Hamas pecah pada Oktober 2023 lalu.

Mulai 1 Januari 2024 Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB 2024-2026 bersama 15 negara lainnya. Dewan yang berada di bawah PBB tersebut mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan dan memajukan kebebasan mendasar secara global. Sebagai komitmen Indonesia menjadi anggota Dewan HAM, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berjanji akan terus membawa isu Palestina ke Dewan HAM PBB.

Kementerian Agama telah menggelar Konferensi Moderasi Beragama Asia-Afrika dan Amerika Latin (KMBAAA) guna membahas perdamaian global. Acara berlangsung di dua tempat ikonik dan bersejarah, yakni Gedung Merdeka (Gedung penyelenggaran Konferensi Asia-Afrika 1965) dan Hotel Savoy Homann, Bandung, pada 20-22 Desember 2023. KMBAAA menjadi ikhtiar Kementerian Agama dalam penguatan moderasi beragama di level global sekaligus ikut mengupayakan perdamaian dunia, di tengah konflik yang terus terjadi di sejumlah negara. ■



Kementerian Agama menggelar Konferensi Moderasi Beragama Asia Afrika dan Amerika Latin (KMBAAL) pada 20-22 Desember 2023 di Bandung

2. Lanskap Nasional

A. HIBERNASI POLITIK IDENTITAS

Gegap gempita Pemilu 2024 di Indonesia makin menghangat. Partisipasi publik dalam pesta demokrasi meningkat seiring dengan kesadaran politik yang semakin dewasa. Perbedaan pandangan politik tentu tidak dapat dihindari. Bahkan pada level tertentu, perbedaan tersebut dapat melahirkan konflik yang berujung pada kekerasan. Berbagai upaya terus dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dalam merawat damai dalam perbedaan pilihan. Indonesia selalu menghadapi tantangan dan ujian konflik dari waktu ke waktu. Akhirnya bangsa ini tumbuh dari tempaan sejarah, melintasi berbagai macam dinamika pesta demokrasi yang semakin membuat negara ini kuat.

Polarisasi Politik berbasis agama yang menjadi bagian dari Politik Identitas cenderung menurun di tahun 2024. Berdasarkan hasil analisa *Political Outlook* 2024 yang dipublikasi oleh BRIN, Politik Identitas tidak lagi ramai dan menjadi perbincangan publik dalam Pemilihan Umum 2024 (BRIN, 2023). Politik Identitas sedang tidur. Tidak banyak yang dapat ditemukan dalam pertarungan debat, baik dari tingkat elit, maupun di akar rumput. Namun bukan berarti Politik Identitas dan Politisasi Agama itu mati. Kemungkinan dapat bangkit kembali bila ada pemicu seperti naiknya isu atau kasus keagamaan yang sensitif.

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama, bekerjasama dengan ASI (Arus Survei Indonesia) pada bulan Juli 2023. 64% masyarakat percaya bahwa akan terjadi lagi politisasi agama dalam Pemilu 2024. Hal ini disebabkan politik identitas dianggap sebagai cara paling murah dalam menjaring suara (ASI, 2023). Dari hasil temuan survey tersebut, Kementerian Agama menjadi lembaga terdepan yang paling efektif dalam mencegah dan mengatasi terjadinya politisasi agama dalam pemilu. Kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi kepada Kementerian Agama tentunya telah diatur dalam Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Kementerian Agama diamanatkan untuk mengidentifikasi dan mencegah konflik sosial berbasis keagamaan di Indonesia. Politisasi agama sangat berpotensi menimbulkan polarisasi dan melahirkan konflik. Sosiolog Inggris, Bryan S, Turner menjelaskan bahwa fungsi agama adalah (1) sebagai kontrol sosial (2) sebagai acuan legitimasi politik, dan (3) sebagai perekat sosial (solidaritas sosial) (Abdillah, 2018). Lalu apabila ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan anti-thesis dari fungsi agama tersebut untuk kepentingan pribadi dan golongan, maka daya rusaknya akan sangat korosif terhadap kerukunan. Ibarat jerami kering yang rentan terbakar, politisasi agama dapat "mengeringkan" jerami-jerami hubungan umat beragama di Indonesia. Semakin kering jerami tersebut, maka semakin mudah terbakar dan merusak tatanan masyarakat.

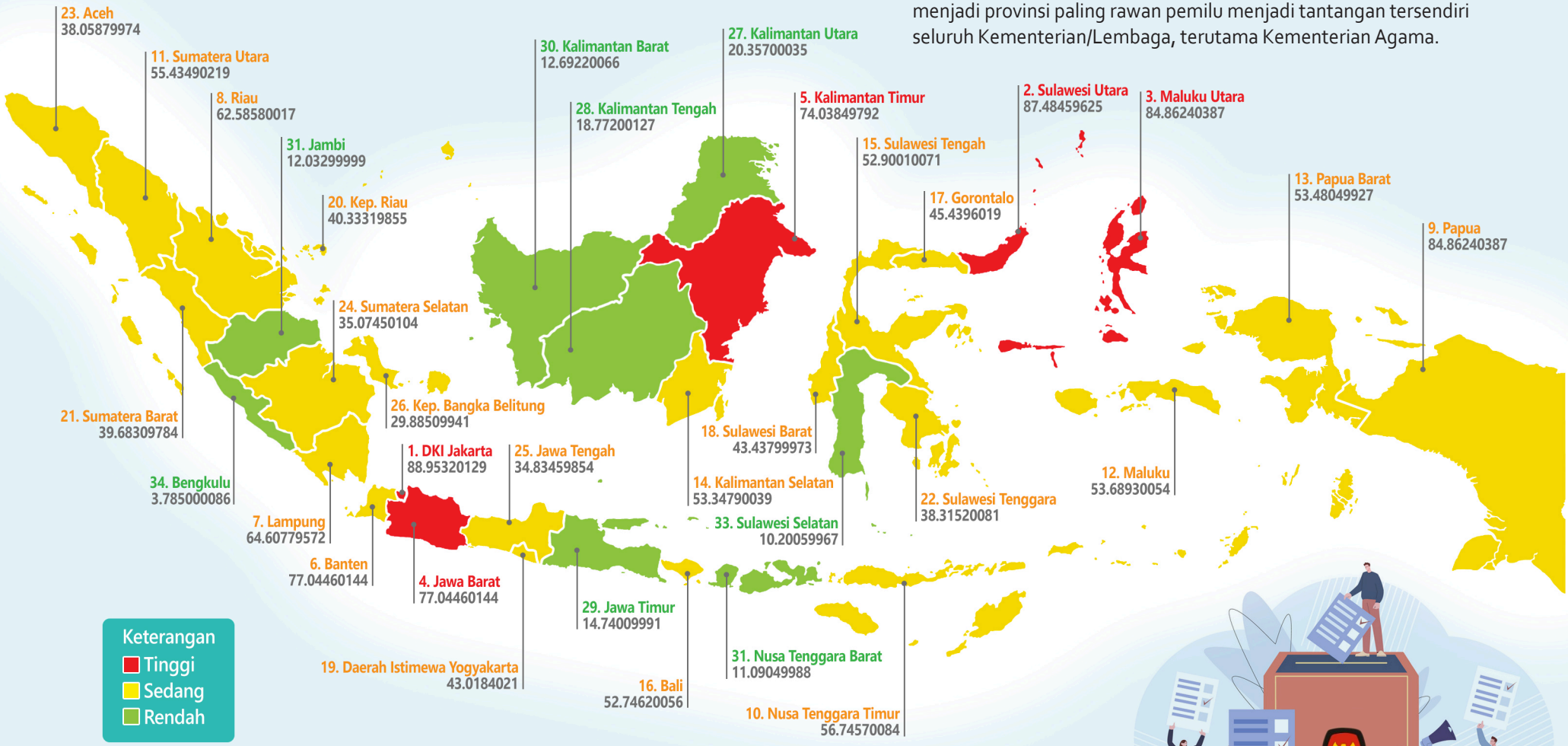
Berangkat dari pemikiran di atas, secara tidak langsung, Kementerian Agama telah diamanahi oleh Undang-Undang untuk mengawal tahun politik dan pegelaran Pemilu 2024 ini dengan sebaik mungkin. Merawat perbedaan pilihan politik dengan toleransi dan meminimalisir penggunaan agama dan keagamaan sebagai alat politik karena korosifnya terhadap kebhinekaan Indonesia. Guna mencapai target tersebut, perlu mengetahui provinsi mana saja yang paling

Polarisasi Politik berbasis agama yang menjadi bagian dari Politik Identitas cenderung menurun di tahun 2024. Berdasarkan hasil analisa *Political Outlook* 2024 yang dipublikasi oleh BRIN, Politik Identitas tidak lagi ramai dan menjadi perbincangan publik dalam Pemilihan Umum 2024 (BRIN, 2023).

INDEKS KERAWANAN PEMILU DARI MASING-MASING PROVINSI

berpotensi penggunaan politik identitas seperti penolakan peserta pemilu atas dasar agama. Berdasarkan publikasi Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2024, Bawaslu telah menampilkan secara komprehensif Indeks Kerawanan Pemilu dari masing-masing provinsi (*lihat infografis*).

Dari infografis di atas dapat dilihat bahwa DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan timur memiliki skor nilai kerawanan pemilu paling tinggi di Indonesia. Jakarta sebagai ibu kota negara dan Meltingpot masyarakat seluruh penjuru Indonesia menjadi provinsi paling rawan pemilu menjadi tantangan tersendiri seluruh Kementerian/Lembaga, terutama Kementerian Agama.



Sumber: (Bawaslu, 2023)

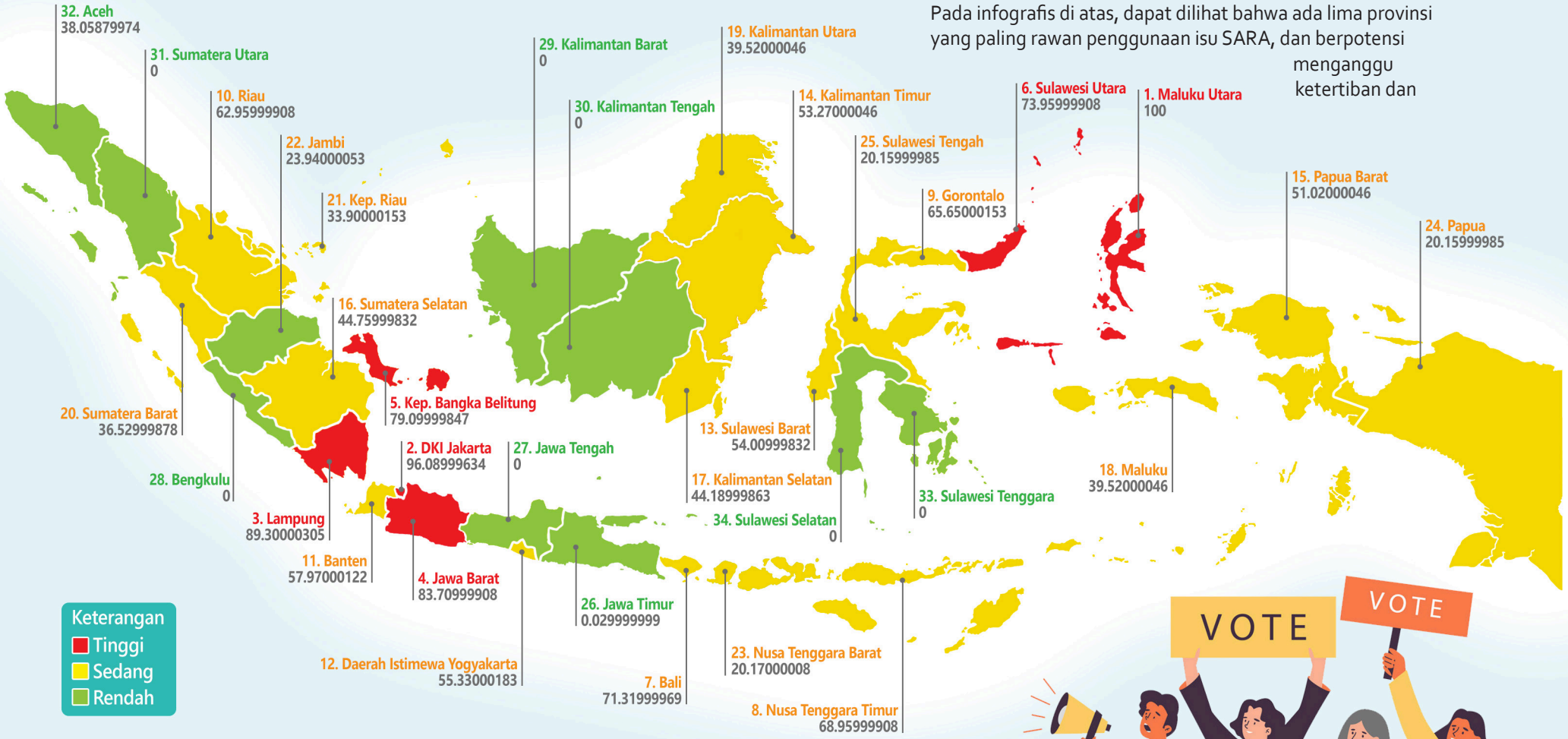


ADANYA PENOLAKAN TERHADAP CALON BERLATARBELAKANG ETNIS, SUKU, DAN AGAMA TERTENTU DI PEMILU/PILKADA



Jika dibedah lebih dalam, analisa Dimensi yang terkait dengan keagamaan dalam metodologi IKP adalah Dimensi Kontestasi, dengan indikator: Adanya Penolakan terhadap calon berlatarbelakang etnis, suku, dan agama tertentu di Pemilu/Pilkada. Berikut hasil analisa kuantitatif dari indikator tersebut (*lihat infografis*)

Pada infografis di atas, dapat dilihat bahwa ada lima provinsi yang paling rawan penggunaan isu SARA, dan berpotensi menganggu ketertiban dan





Sumber: (Bawaslu, 2023)

keamanan. Kelima provinsi tersebut perlu menjadi perhatian utama dari Kementerian Agama dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal toleransi dan kerukunan umat. Dari kerukunan tersebut akan tercipta stabilitas politik, sosial dan keamanan. Dari stabilitas tersebut tentunya akan mengoptimalkan potensi ekonomi dearah yang pastinya akan menumbuhkan kesejahteraaan masyarakat.

B. KEGALAUAN SOSIAL GENERASI Z

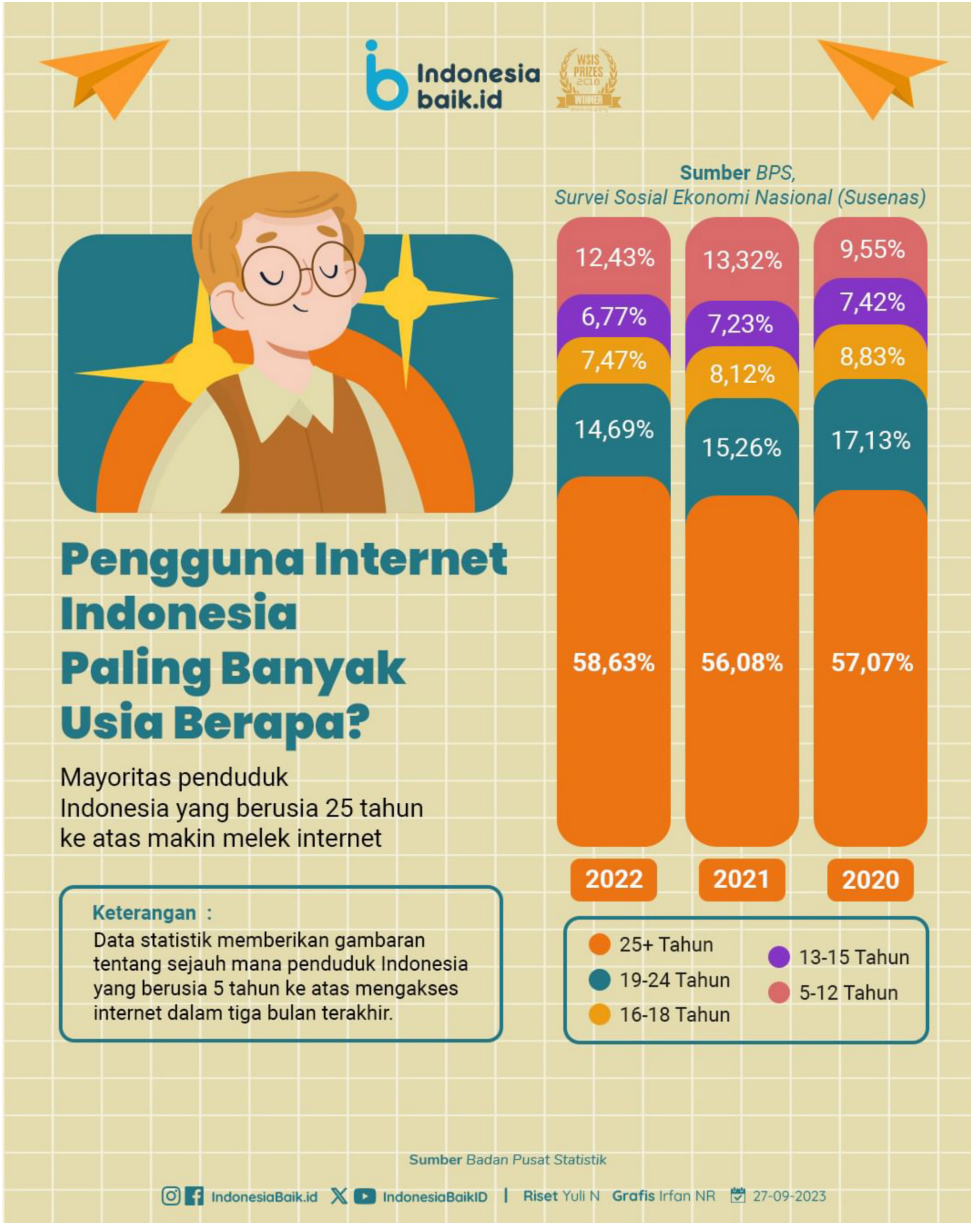
Generasi Z dikategorikan sebagai generasi yang lahir pada rentang tahun 1996-2012. Generasi ini merupakan generasi pertama yang lahir di era digitalisasi dan internet. Oleh karena itu, mereka memiliki karakteristik yang berbeda dari generasi-generasi sebelumnya.

Berdasarkan usia, lebih dari 50% pengguna internet di Indonesia berusia 25 tahun ke atas, atau mayoritas pengguna adalah generasi Milenial dan Generasi Z. *Internet of Thing* (IoT) akan menjadi segala-galanya. Semua pertarungan ideologi dan keilmuan akan berada di ruang digital.

Salah satu karakteristik Generasi Z yang paling menonjol adalah keterbukaan mereka terhadap berbagai macam informasi dan budaya. Mereka mudah mengakses informasi dari berbagai sumber, termasuk dari media sosial dan internet. Hal ini membuat mereka memiliki pandangan yang lebih luas dan beragam tentang dunia.

Dalam hasil survei "*Beragama ala Anak Muda: Ritual No, Konservatif Yes*" (2021), data memperlihatkan bahwa anak muda, terutama mereka yang disebut sebagai Gen Z, paling sering melakukan interaksi terkait isu keagamaan. Mereka adalah generasi yang paling sering menyukai (*like*) atau tidak menyukai (*dislike*), berbagi informasi (*share*), memberi komentar (*comment*), dan mengkonsumsi program keagamaan di media sosial.

Survei juga menemukan bahwa individu yang menjadikan media sosial sebagai sumber agama cenderung lebih sering berinteraksi di media sosial. Adapun bentuk-bentuk interaksi nya seperti memberi tanggapan (*like/dislike*), berbagi informasi (*share*), memberi komentar (*comment*), dan tentu saja menyaksikan program keagamaan itu sendiri. Selain itu, semakin tinggi tingkat religiusitas



Sumber: (indonesia.go.id, 2023)

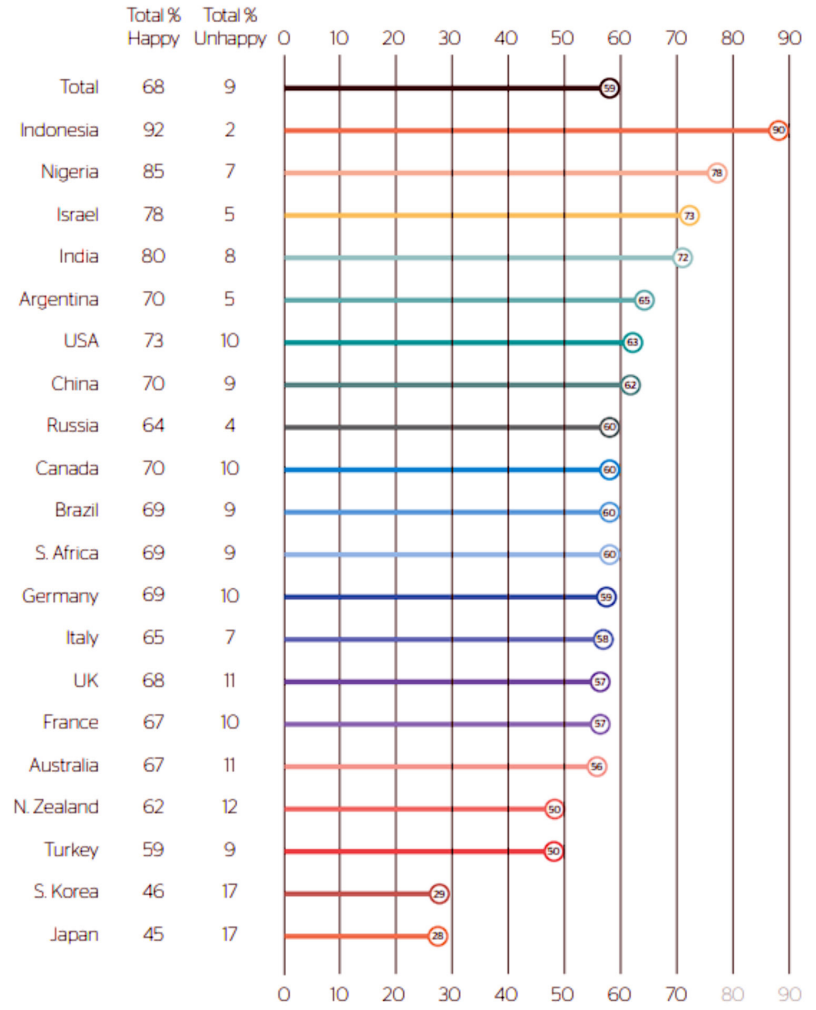
seseorang, maka semakin sering juga dia melakukan interaksi-interaksi tersebut di media sosial. Hal serupa juga ditemui pada individu yang paling merasa sebagai *religious opinion leader* (seseorang yang merasa pendapatnya sering didengar terkait hal keagamaan).

Penelitian ini juga menemukan bahwa Gen Z adalah generasi yang paling rendah tingkat religiusitasnya secara berurutan. Namun, menurut sebuah survei dari Varkey Foundation (2017) di 20 negara, menunjukkan bahwa generasi Z Indonesia sepakat bahwa agama menjadi faktor penting kebahagiaan dengan persentase 93 persen. Angka tersebut bernilai besar dibanding dengan rata-rata dunia yang hanya 44 persen.

Sementara itu, laporan Penelitian yang berjudul "*Dinamika Aktivisme Digital Kaum Muda Indonesia dalam Wacana Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KKB)*" dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) bekerjasama dengan *Indonesian Consortium for Religious Studies* (ICRS) (2023) menyatakan bahwa secara umum Gen Z memang menunjukkan keluwesan dalam hal keagamaan dengan memahami agama secara cair, antara pedoman hidup hingga agama sebagai identitas.



'Net Happy' score (Total % Happy minus total % Unhappy



Dikutip dari Generation Z: Global Citizenship Survey What do the world's young people think and feel? (Varkey Foundation, 2017)

C. SEMUA SERBA DIGITAL

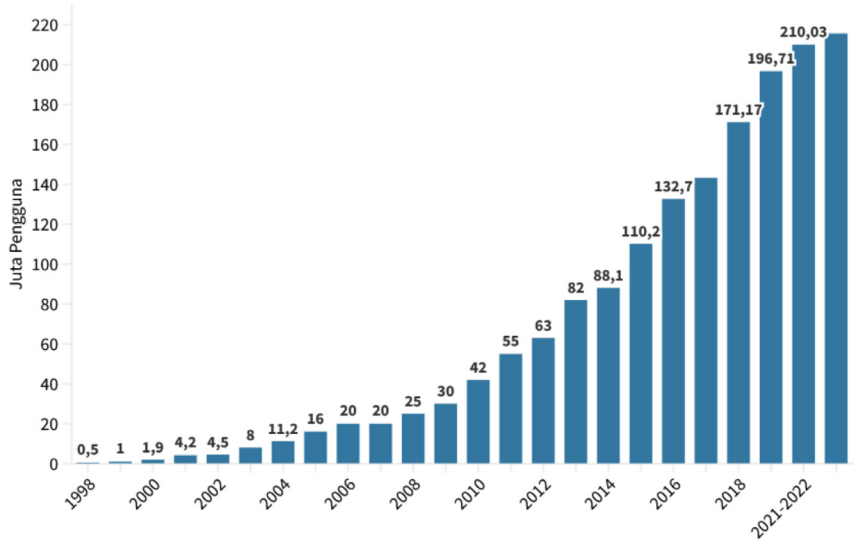
Transfer data nir kabel tanpa campur tangan manusia; *Big data* yang sangat luas, mendalam dan sulit dianalisa dengan alat analisis tradisional; berbagai macam aplikasi yang memudahkan kehidupan manusia seperti untuk navigasi, transportasi dan komunikasi; jenis keamanan yang jauh lebih kompleks dan rumit yaitu *Cyber Security*; perkembangan teknologi Kecerdasan buatan (AI) yang semakin merambah sudut kehidupan manusia, dan membuat manusia itu sendiri gagap dalam menghadapinya. Demikian lah beberapa tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat, yang semua orang menamainya Revolusi Industri 4.0.

Kolaborasi antara teknologi siber dan otomatisasi ini telah menghasilkan begitu banyak perubahan dalam berbagai sektor. Selain memudahkan kehidupan manusia, lompatan teknologi yang begitu jauh ini juga berdampak terhadap keamanan, etika, privasi dan bahkan regulasi. Seperti lalu lintas informasi yang begitu cepat telah berdampak dalam dunia pendidikan. Guru, dosen dan pemuka agama tidak lagi menjadi satu-satunya tempat untuk bertanya ilmu. Semua sudah tersedia di gawai. Dunia kerja semakin terotomatisasi dan digital, menyebabkan berkurangnya ketergantungan terhadap tenaga kerja manusia. Sektor industri yang gagap beradaptasi akan ditinggalkan. Banyak yang tumbuh dan tidak sedikit yang gugur.

Sebagai gambaran bagaimana masifnya penetrasi industri 4.0 dapat dilihat dari jumlah pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun di bawah ini.

Data pengguna internet di Indonesia setiap tahun semakin meningkat. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet mencapai 215,63 juta orang atau setara dengan 78,19% dari total penduduk Indonesia (APJII, 2023).

Revolusi industri membuat banyak sektor industri mendapatkan kemudahan, namun sekaligus dampak negatif yang terjadi, seperti sangat rentan dengan serangan siber, peningkatan urbanisasi, pengurangan jumlah tenaga kerja karena digantikan oleh mesin teknologi, polusi udara, limbah dalam jumlah besar yang dapat merusak lingkungan, dan dengan hal negatif lainnya.



Sumber: (APJII, 2023)

Teknologi dan agama harus terintegrasi dengan baik. Keduanya harus berkelindan dan berimbang. Bahwa teknologi harus diarahkan kepada nilai-nilai yang diajarkan agama, bahwa teknologi harus sejalan dan menjadi alat dalam mendorong terciptanya kehidupan dan masyarakat yang berperadaban. Mengabaikan revolusi teknologi sama halnya dengan mengabaikan kebutuhan manusia di masa depan. Namun mengesampingkan agama, teknologi hanya bersifat materi. Sejarah telah membuktikan bahwa agama dan teknologi ibarat dua sisi mata uang, tidak terpisahkan, dan saling melengkapi.

Kementerian Agama harus menjawab tantangan revolusi teknologi 4.0, kualitas SDM harus inovatif, transformatif, dan adaptif dengan perkembangan digital. SDM Kemenag harus dikenal sebagai individu yang digital literasinya tinggi, memiliki kompentensi digital yang baik, dan memahami *Digital Culture* yang dengan bijak. Fasilitas penunjang juga harus ditingkatkan agar Kementerian Agama tidak tertinggal secara digital.

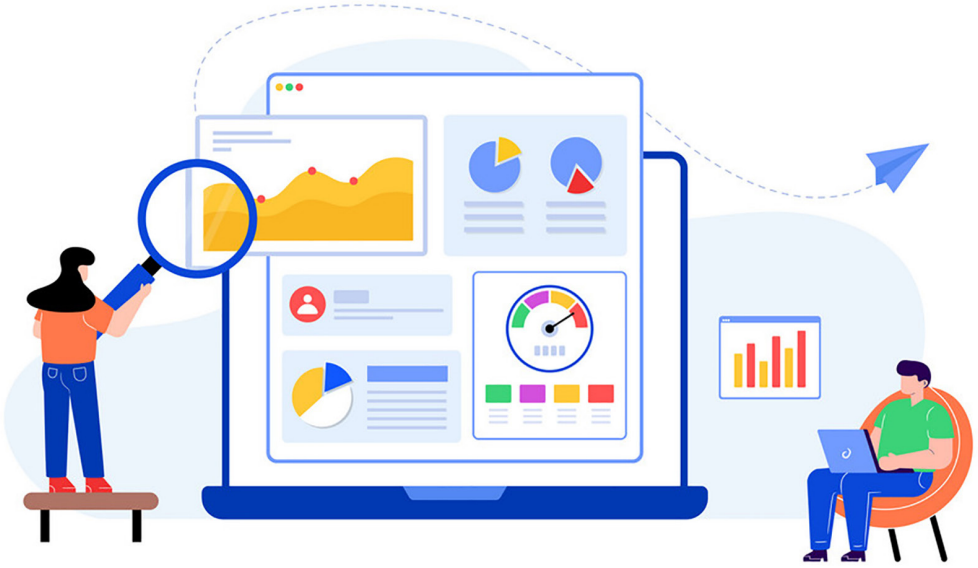
Kementerian Agama harus menjawab tantangan revolusi teknologi 4.0, kualitas SDM harus inovatif, transformatif, dan adaptif dengan perkembangan digital. SDM Kemenag harus dikenal sebagai individu yang digital literasinya tinggi, memiliki kompentensi digital yang baik, dan memahami *Digital Culture* yang dengan bijak.

Revolusi industri telah membuka kesempatan baru bagi semua kalangan. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang sangat mengandalkan linearitas pendidikan dengan profesi, maka di era sekarang, mereka yang tidak terdaftar dalam institusi formal sekalipun masih bisa berkompetisi. Keahlian yang diperlukan saat ini adalah kreativitas, inovasi serta kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik. Begitu juga dengan SDM Kementerian Agama, harus bisa menjawab tantangan revolusi industri 4.0 tanpa meninggalkan nilai keagamaan itu sendiri. ■



BAB II

DIVERSIFIKASI LAYANAN KEAGAMAAN BERBASIS DIGITAL



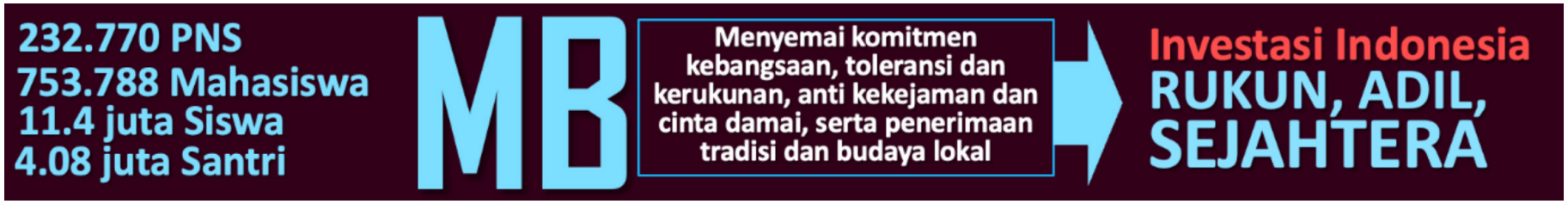
1. Memperluas Arena Moderasi Beragama

Kementerian Agama bersama dengan berbagai pihak terkait, seperti organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil, menggelar serangkaian kegiatan sosialisasi Moderasi Beragama yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Acara ini mencakup seminar, lokakarya, dan dialog antaragama untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya moderasi beragama. Selain itu, kampanye melalui media sosial, komik moderasi dan kegiatan komunitas turut dilakukan untuk mencapai jangkauan yang lebih luas. Hal ini juga ditandai dengan terlaksananya Penguatan Moderasi Beragama bagi kementerian/ lembaga negara lain dalam diklat *Master Training Penguatan Moderasi Beragama*.

Hadirnya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama pada 25 September 2023 tidak sekadar membuat gerakan Penguatan Moderasi Beragama kuat dari sisi payung hukum, kebijakan ini juga akan semakin terstruktur, sinergis, dan berkualitas. Dengan Perpres ini, paling tidak ada 3 langkah yang bisa dicapai, *pertama*, pembentukan Sekretariat Bersama Moderasi Beragama (Sekber), regulasi menugaskan Menteri Agama sebagai Ketua entitas tersebut. *Kedua*, memastikan semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi dapat menjalankan koordinasi efektif, pemantauan, evaluasi, pelaporan capaian, dan publikasi terkait penguatan moderasi beragama. *Ketiga*, Kementerian Agama akan menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) yang akan secara teknis mengatur elemen-elemen yang akan dijadikan fokus koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait penguatan moderasi beragama di setiap instansi pemerintah, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi.

Kehadiran Sekber menjadi tonggak penting dalam pelaksanaan program Penguatan Moderasi Beragama. Pada tahun 2024 ini, Sekber mendapat mandat strategis pada fungsi sebagai pusat koordinasi dan kendali. Dalam perannya sebagai pengendali tertinggi, Yaqut Cholil Qoumas Menteri Agama akan dibantu oleh sejumlah menteri kunci, termasuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menkominfo, Menkumham, Menteri Bappenas, Menpora, Mendikbudristekdikti, Men-PANRB, Menparekraf, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Ketenagakerjaan, Menkop UMKM, serta Jaksa Agung. Dengan demikian, Sekber menjadi lembaga yang sangat strategis dalam mengoordinasikan upaya moderasi beragama, memastikan sinergi antarinstansi, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam program tersebut.

Hadirnya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama pada 25 September 2023 tidak sekadar membuat gerakan Penguatan Moderasi Beragama kuat dari sisi payung hukum, kebijakan ini juga akan semakin terstruktur, sinergis, dan berkualitas.



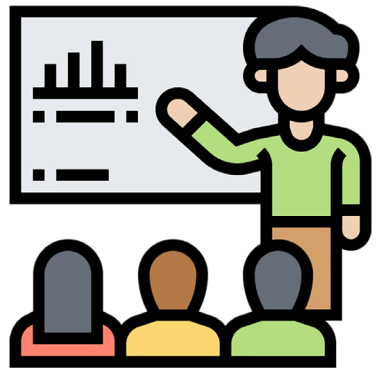
Jumlah Alumni Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2021 – 2023

SEBARAN ALUMNI

NO.	SATKER LEMBAGA PELATIHAN	PELATIHAN PENGGERAK MB JUMLAH (ORANG)	TOT PMB JUMLAH (ORANG)	INSTRUKTUR NASIONAL JUMLAH (ORANG)	MASTER TRAINING JUMLAH (ORANG)	JUMLAH TOTAL
1	Pusdiklat Tenaga Administrasi	257	446		56	759
2	Pusdiklat tenaga teknis pendidikan dan keagamaan	1250		35		1285
3	Balai Diklat Keagamaan Jakarta	780				780
4	Balai Diklat Keagamaan Bandung	1044				1044
5	Balai Diklat Keagamaan Semarang	1165				1165
6	Balai Diklat Keagamaan Surabaya	966				966
7	Balai Diklat Keagamaan Medan	1295				1295
8	Balai Diklat Keagamaan Padang	690				690
9	Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin	736				736
10	Balai Diklat Keagamaan Makassar	634				634
11	Balai Diklat Keagamaan Ambon	240				240
12	Balai Diklat Keagamaan Aceh	950				950
13	Balai Diklat Keagamaan Papua	410				410
14	Balai Diklat Keagamaan Palembang	765				765
15	Balai Diklat Keagamaan Manado	618				618
16	Balai Diklat Keagamaan Denpasar	660				660
17	Lembaga Diklat Keagamaan Pekan Baru	160				160
18	Lembaga Diklat Keagamaan lampung	605				605
		13.225	446	35	56	13.762

NO	TAHUN	PELATIHAN PPMB	TOT PMB	INSTRUKTUR NASIONAL	MASTER TRAINING	JUMLAH TOTAL
1	2021	4333	144	25	91	4593
2	2022	7649	286	34	113	8082
3	2023	13225	446	35	56	13762
Jumlah total alumni		25207	876	94	260	26.437

Sumber: Pusdiklat Kementerian Agama







Penguatan Moderasi Agama juga dilakukan melalui pembentukan Kampung Moderasi Beragama di 2.658 lokasi, terbentuknya 210 Takmir pelopor Moderasi Beragama, serta dibentuknya Majlis Dai Kebangsaan yang tersebar di 34 provinsi. Gerakan penguatan moderasi beragama masih menjadi program yang terus diperkuat di tahun 2024 untuk mengantisipasi terjadi kekerasan atas nama agama, munculnya politik identitas, intoleran, dan benturan antara agama dan budaya. Peran penyuluh agama juga dimaksimalkan dengan memanfaatkan media sosial yakni dengan gerakan *one day one content* untuk menyampaikan pesan agama yang berlandaskan nilai-nilai Moderasi Beragama. Penyiaran agama yang moderat juga dilakukan di TVRI dan RRI oleh 445 orang penyuluh agama guna menciptakan saluran komunikasi yang lebih luas untuk menyampaikan pesan moderasi beragama.

Pendekatan Penguatan Moderasi Beragama juga dilakukan dalam berbagai bentuk aktifitas seperti, Festival Film Moderasi Beragama, Konser Music Moderasi Beragama, Penyusunan Buku Saku MB bagi Gen Z, penerjemahan karya Moderasi Beragama ke Bahasa asing dan lainnya. ■

2. Menuntaskan Perangkat Cegah Konflik Keagamaan

Dinamika hubungan antara umat beragama masih didominasi aksi penolakan pembangunan rumah ibadah. Penolakan pendirian rumah ibadah oleh kelompok Masyarakat, merupakan salah satu fenomena konflik keagamaan yang paling sering terjadi, terutama gereja dan masjid.

Dari beberapa hasil kajian terkait alasan penolakan pendirian rumah ibadah oleh warga masyarakat tersebut, disimpulkan bahwa latar belakang penolakan ijin pendirian rumah ibadah tidak disebabkan faktor tunggal, tapi sangat kompleks dan berbeda-beda, antara satu dengan lainnya. Secara umum, setidaknya terdapat tiga aspek penolakan warga atas pendiriaan rumah ibadah yaitu: aspek teologis, aspek administratif, dan aspek kesenjangan budaya dan ekonomi.

Atas dasar itu, penanganan konflik perlu dilakukan secara struktural dan kultural. Secara struktural yaitu melalui pengorganisasian pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian konflik. Sementara secara kultural yaitu upaya fasilitatif dari pihak-pihak terkait melalui musyarawah dalam penyelesaian konflik.

Konflik dengan latar belakang keagamaan tidak hanya disebabkan oleh persoalan pendirian rumah ibadah, namun dapat disebabkan oleh banyak hal seperti, penyiaran agama, properti keagamaan, ritual dan perayaan hari keagamaan, bantuan keagamaan, perpindahan agama, perkawinan beda agama, ujaran kebencian, penodaan agama, misinformasi dan disinformasi, sosial-politik-ekonomi yang melibatkan identitas atau sentimen keagamaan.

KASUS PENOLAKAN PENDIRIAN GEREJA

- Gereja Kristen Kemah Daud di Rajabasa Jaya Bandar Lampung (2023)
- Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) di Purwakarta (2023)
- Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Imanuel Pelalawan Riau (2023)
- Gereja Adven dan HKBP Maranatha di Cilegon (2022)



KASUS PENOLAKAN PENDIRIAN MASJID

- Masjid al-Muhajirin di Uluindano, Tomohon Sulawesi Utara (2023)
- Masjid Taqwa di Samalanga, Bireun Aceh (2022)
- masjid Imam Ibnu Hambal (MIAH) di Bogor Utara (2022)
- Masjid al-Ikhlas di Babakan Lenggis, Cijeruk Bogor (2022)



Kasus penolakan masjid ada yang dilakukan oleh sesama Muslim dan ada juga yang dari kelompok non Islam.

Sumber: Tahun 2023, Laporan LSM dan Indeks Kerukunan

Melihat masih sering terjadinya berbagai peristiwa konflik sosial keagamaan, Menteri Agama telah mengeluarkan KMA Nomor 332 tahun 2023 tentang Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan. Dalam KMA tersebut, sistem peringatan dini konflik terdiri dari komponen deteksi dini dan cegah dini. Deteksi dini dilakukan melalui tahapan pengimpunan data, pengolahan data, dan penyajian data. Sementara cegah dini dilakukan melalui bimbingan, penyuluhan, pelatihan, dialog, advokasi, koordinasi, negosiasi, mediasi, dan Tindakan lainnya.

Saat ini, sebagai bentuk implementasi KMA tersebut, Kementerian Agama melalui Bimas Islam telah membangun kerjasama dengan 65 mitra dalam penanganan konflik sosial berdimensi keagamaan, serta pembentukan dan pembinaan 100 penyuluh dan penghulu sebagai aktor resolusi konflik melalui Seleksi Penyuluh Agen Resolusi Konflik (SPARK). Para aktor resolusi konflik tersebut diharapkan mampu melakukan deteksi dini dan cegah dini konflik-konflik sosial keagamaan yang terjadi di wilayah masing-masing.

Saat ini, sebagai bentuk implementasi KMA tersebut, Kementerian Agama melalui Bimas Islam telah membangun kerjasama dengan 65 mitra dalam penanganan konflik sosial berdimensi keagamaan, serta pembentukan dan pembinaan 100 penyuluh dan penghulu sebagai aktor resolusi konflik melalui Seleksi Penyuluh Agen Resolusi Konflik (SPARK).





Sebagai implementasi dari KMA tersebut di atas, sebanyak **78 penanganan konflik** berhasil dilakukan sepanjang tahun 2023, **1 unit aplikasi *early warning system*** sebagai perangkat deteksi dini konflik sosial berdimensi keagamaan juga telah diluncurkan. Pelatihan Deteksi Dini Konflik Sosial Keagamaan yang merupakan bagian dari rencana implementasi program unggulan *Religiosity Index* juga telah dilakukan. **Sebanyak 400 orang peserta telah mengikuti pelatihan** yang dibagi dalam 2 gelombang.

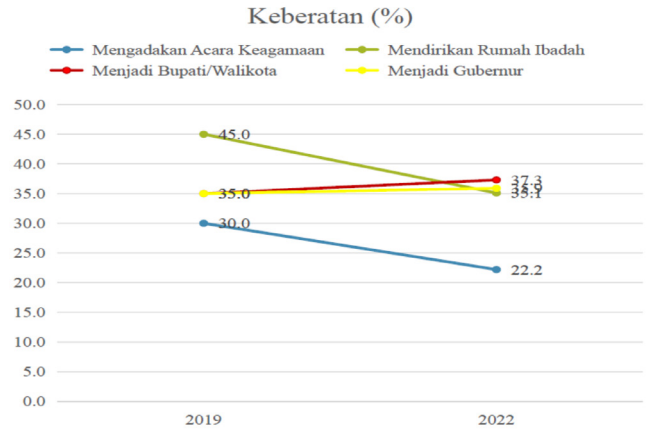
Gelombang pertama terdiri dari **202 orang** yang berasal dari Kabid Penais, Pembimas Hindu, Pembimas Buddha dan Khonghucu Kanwil Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia, Ketua/Pengurus Rumah Moderasi Beragama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan perwakilan eselon II Pusat serta FKUB dari Provinsi DKI Jakarta dan kota/kab di Jakarta.

Gelombang ke 2 berjumlah **198 orang** yang berasal dari para Pembimas Kristen, Pembimas Katolik Kanwil Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia, Ketua/Pengurus Rumah Moderasi Beragama Perguruan Tinggi Islam, Wakil Rektor/Wakil Ketua PTK non Islam Bidang kemahasiswaan, perwakilan eselon II Pusat, FKUB dari Provinsi DKI Jakarta dan kota/kab di Jakarta, Jabodetabek, dan Pokjaluh semua agama di kab/kota di DKI Jakarta.

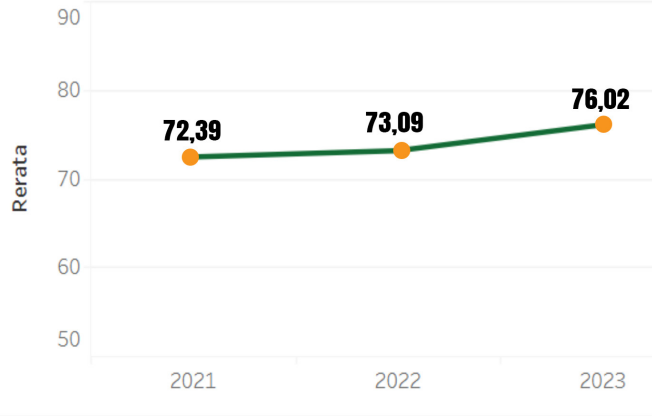
Berbagai upaya telah dihadirkan sepanjang tahun 2023, tujuannya untuk mencegah dan meredam konflik yang muncul dengan nuansa agama, sehingga stabilitas nasional mampu terjaga. Berdasarkan laporan beberapa hasil riset dan survei, pada tahun 2023, tingkat kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan Masyarakat Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas relatif baik. Capaian tersebut, tentu perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan.

Namun, hal ini tentu membutuhkan komitmen semua pihak, baik dari dalam Kemenag, maupun dari luar Kemenag untuk saling menjaga.

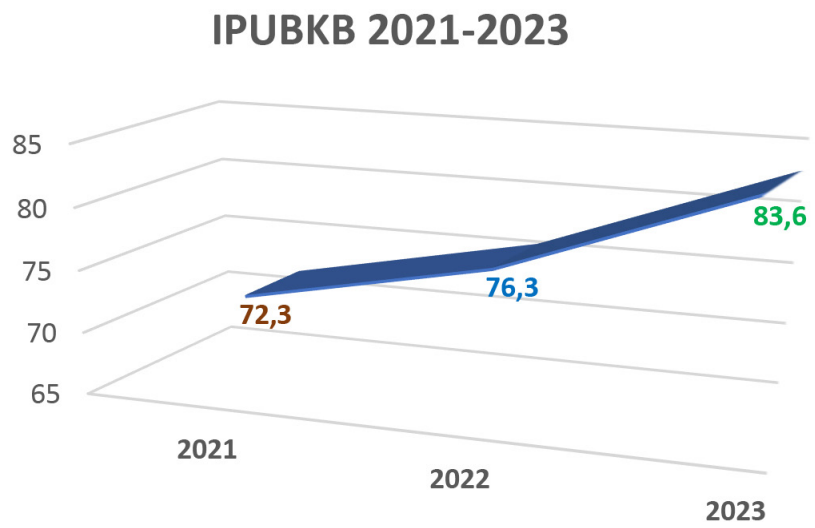
Data hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Tahun 2022 menunjukan bahwa intoleransi muslim terhadapa non muslim dalam mendirikan rumah ibadah dan mengadakan acara keagaaan cenderung menurun. Hal ini diperkuat hasil Indeks Kerukunan Umat Beragama yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sepanjang 2020-2023 mengalami tren kenaikan. ■



INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 2021-2023



Laporan lain, *Religiosity Index* (Relix) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menunjukkan bahwa Indeks Keberagamaan (*Religiosity Index*) berada pada kategori baik dengan Indeks 76,19. Relix diukur melalui 2 dimensi yaitu dimensi persaudaraan keagamaan dan dimensi persaudaraan kebangsaan. Sementara itu, Indeks Penerimaan Umat Beragama terhadap Keragaman Budaya (IPUBKB) yang mengukur 2 variabel yaitu apresiasi terhadap budaya universal dan kognisi penerimaan pemeluk agama terhadap tradisi dan budaya lokal mengalamai tren kenaikan sejak 2021-2023. ■



3. Mempertegas Fungsi Penyuluh Agama

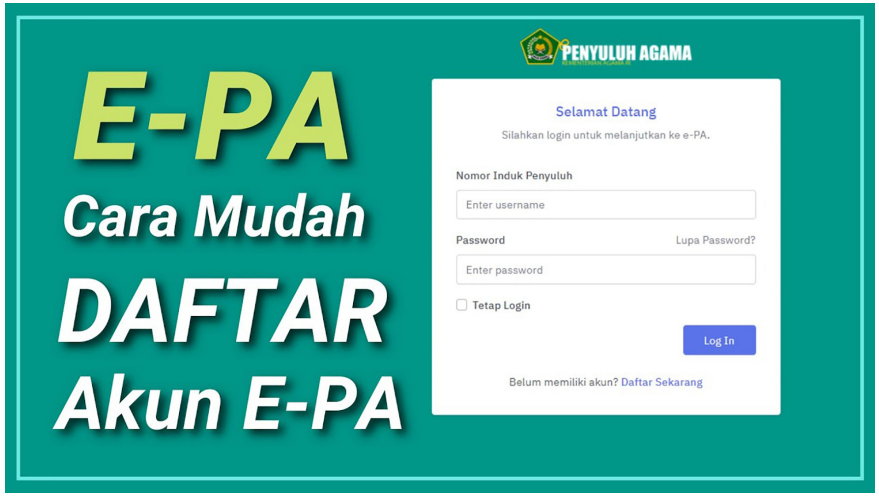
Penyuluh adalah salah satu jabatan fungsional yang memiliki tusi melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok sasaran tertentu dengan menggunakan bahasa-bahasa agama. Pada *Outlook* Kementerian Agama tahun 2023, terdapat dua problem yang terkait dengan penyuluh agama yaitu kompetensi dan kesejahteraan penyuluh.

Dengan berkaca pada hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tahun sebelumnya (2022), dari 8 spesialisasi penyuluh agama Islam, yaitu: Pemberantasan Buta Huruf al-Quran, Keluarga Sakinah, Zakat, Wakaf, Produk Halal, Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme dan Aliran Sempalan, penyuluhan NAPZA dan HIV/AIDS, ternyata mayoritas penyuluh agama Islam memilih Pemberatasan Buta Huruf al-Quran.

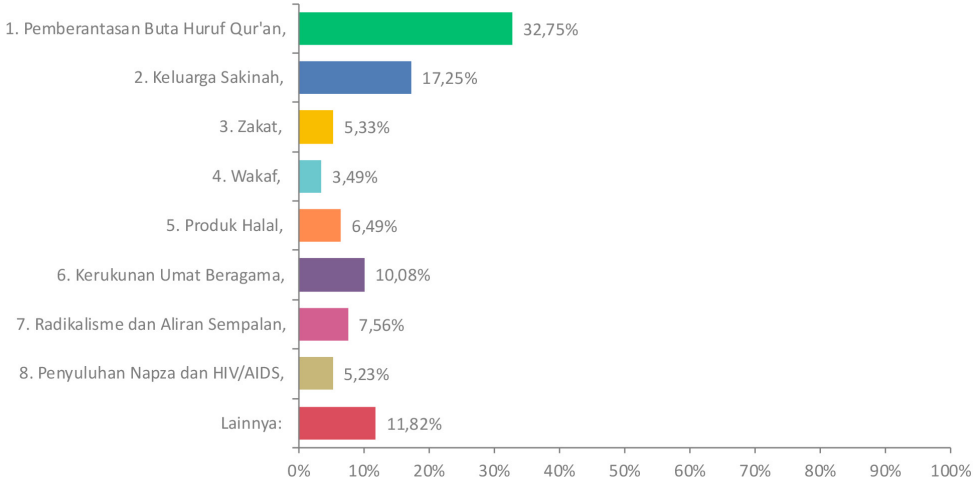
Proporsi tersebut dianggap tidak ideal, sebab penyuluh agama seharusnya lebih banyak memberikan perhatian terhadap problem-problem yang dihadapi masyarakat. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat di masa yang akan datang, tuntutan terhadap profesionalisme penyuluh agama semakin meningkat. Sehingga hal tersebut perlu dibarengi dengan adanya regulasi yang lebih tegas yang bisa mendorong kinerja penyuluh berperan dalam menjawab problem-problem yang dihadapi masyarakat.

Pada tahun 2023, Bimas Islam selaku *leading* sektor pembina para penyuluh agama Islam telah melakukan berbagai macam upaya, antara lain melalui peningkatan kompetensi penyuluh agama. Saat ini sudah ada 12.000 penceramah agama yang sudah ditingkatkan kompetensinya. Penguatan kompetensi penyuluh ini telah dilakukan di 16 Provinsi di seluruh Indonesia. Layanan para penyuluh agama ini dapat diakses melalui aplikasi e-PA dan didorong menjadi agen moderasi beragama dan aktor resolusi konflik.

Peningkatan kapasitas penyuluh juga dilakukan melalui pemberian *award* kepada para penyuluh agama Islam. Kementerian Agama menggelar penilaian *Penyuluh Agama Islam Award 2023 Tingkat Nasional*, di Jakarta. Kegiatan yang berlangsung sejak 7 Agustus 2023 ini ditutup oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dengan memberikan penghargaan kepada tujuh penyuluh agama terbaik se-Indonesia, pada Rabu (9/8/2023) malam. Terdapat tujuh kategori penghargaan pada Penyuluh Agama Islam Award 2023, yaitu: 1) Peningkatan







Sumber: BRIN, 2022



E-PA atau Elektronik Penyuluh Agama merupakan aplikasi elektronik berbasis *website* yang dipakai untuk pelaporan kinerja penyuluh agama, baik PNS maupun Non PNS (honorer), sehingga dapat meningkatkan efesiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja Penyuluh Agama Islam. Ditengah era tekhnologi yang serba *online*, sistem e-PA merupakan terobosan baru Ditjen Bimas Islam sebagai sistem pelaporan dan sekaligus monitoring kinerja penyuluh agama Islam.

Literasi Alquran, 2) Pendampingan Kelompok Rentan, 3) Kesehatan Masyarakat, 4) Pemberdayaan Ekonomi Umat, 5) Penegakan Hukum, 5) Pelestarian Lingkungan, dan 6) Metode Penyuluhan Baru. PAI *Award* tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap para penyuluh agama Islam di Indonesia yang terus berjuang dengan dedikasi dan semangat yang tinggi dalam pembangunan negara melalui bimbingan kepenyuluhan yang kreatif, inovatif, dan berdampak.

Secara umum, saat ini penyuluh agama terbagi dua, yaitu penyuluh agama yang PNS dan Non PNS. Jumlah penyuluh agama yang PNS adalah 5.885 orang dan yang Non ASN adalah 61.335 orang, sehingga total jumlah 67.220 orang. Jumlah Penyuluh Agama tersebut terbagi dalam beberapa agama, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Adapun dari sisi kesejahteraan, untuk honor penyuluh agama non PNS masih di bawah UMR. Saat ini, honor mereka hanya 1 juta/perbulan. Jumlah tersebut, belum bisa mencukupi kebutuhan hidup para penyuluh. Namun demikian, pada akhir 2023 ini, sesuai UU Nomor 23 tahun 2023 tentang ASN, pemerintah telah mengangkat 9000 penyuluh honorer menjadi PPPK. Melalui penetapan

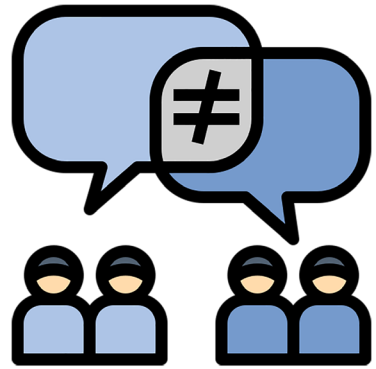
TUGAS TAMBAHAN PENYULUH AGAMA



penyuluh agama honorer menjadi PPPK ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sebanyak 18.092 penyuluh agama Islam (PAI) dinyatakan lulus menjadi pendamping proses produk halal (PPH) setelah mengikuti serangkaian pelatihan dan ujian dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Hal ini tidak lain, untuk mendorong terciptanya 1 juta sertifikasi halal yang telah ditetapkaan.

Jumlah penyuluh agama Hindu saat ini mencapai 6.000-an orang (PNS, PPPK, Non-PNS). Penguatan kapasitas dilakukan dengan memaksimalkan tugas-tugas utama penyuluhan. Sementara itu, penguatan pada penyuluh Agama Katolik melalui pemberian bantuan kelompok kerja penyuluh agama Katolik di 40 lokasi yang menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kapasitas dan dukungan bagi para penyuluh di tingkat lokal. Bantuan ini dapat berupa sumber daya pendukung, literatur, dan alat komunikasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan.



Dengan melibatkan kelompok kerja di 40 lokasi, pemerintah berupaya memastikan bahwa upaya penguatan ini mencakup wilayah yang luas dan beragam. Terlaksananya penyaluran honorarium kepada 3.686 penyuluh agama Katolik Non PNS senilai Rp44.232.000.000,- menunjukkan pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi para penyuluh dalam memberikan pelayanan agama kepada masyarakat. Terlaksananya rekrutmen penyuluh agama Katolik dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 257 orang merupakan langkah strategis untuk mengisi kekurangan tenaga penyuluh di berbagai daerah. Sementera itu, Penyuluh Agama Kristen yang berjumlah (9.000 penyuluh non PNS, dan 278 Penyuluh PNS) dengan menggunakan aplikasi E-Pakris melaporkan kinerjanya secara berkala. ■



4. Menggelorakan Industri Halal



Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukan bahwa indeks pelayanan pada sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mampu memenuhi kepentingan para pengguna layanan sertifikasi halal, sehingga pada tahun 2023 dipersepsikan Sangat Baik oleh publik dengan nilai SKM sebesar 88.5. Tren Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal makin naik.

Dalam upaya untuk meningkatkan jumlah layanan sertifikasi halal, BPJPH juga terus mendorong berdirinya LP3H di seluruh Indonesia. Tahun 2023, BPJPH telah melakukan akreditasi kepada 234 LP3H yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan meningkatnya sebaran LP3H membuat jumlah P3H juga semakin banyak dan tersebar hingga tingkat kecamatan. Tahun 2023 total ada 77.287 Pendamping PPH yang sudah lulus pelatihan dan siap melaksanakan pendampingan PPH bagu pelaku usaha mikro kecil. Bahkan BPJPH dianugerahi Museum Rekor Indonesia (MURI) setelah berhasil menggelar pelatihan P3H bagi 30.000 calon P3H.

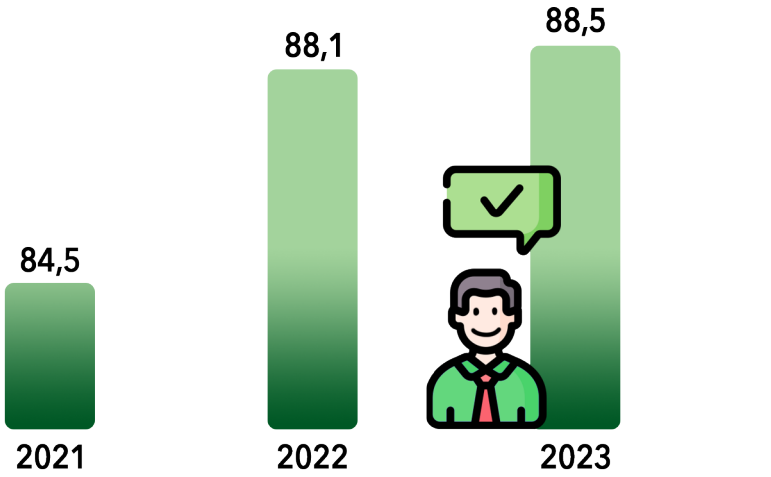
Untuk mendukung sertifikasi dengan pengujian dan/atau pemeriksaan, BPJPH telah melakukan akreditasi sebanyak 31 LPH selama tahun 2023, sehingga total LPH menjadi sebanyak 68 lembaga. Dengan banyaknya pillihan LPH dapat mempercepat durasi pemeriksaan dan penerbitan sertifikasi halal.

Selain sertifikasi produk dalam negeri, BPJPH juga melakukan registrasi untuk produk luar negeri yang beredar di Indonesia. Tahun 2023 BPJPH telah melakukan MOU kepada 5 Lembaga Halal Luar Negeri, yakni dengan INSO Iran, Jakim-Malaysia, Mafra-Korea Selatan, SFDA, dam MPI slandia Baru. Selain itu, BPJPH juga sudah menandatangani perjanjian MRA dengan 35 LHLN, 9 diantaranya sudah berlaku dan 26 akan mulai berlaku setelah sertifikat akreditasi terbit.

Tercapainya target layanan sertifikasi halal tahun 2023 juga berkat dukungan system informasi Halal yang sudah menerapkan AI dan *Blockchain*. Selain itu, kemudahan juga diterima pelaku usaha karena SIHALAL tidak hanya aplikasi berbasis website tetapi juga juga dikembangkan dalam basis *mobile* yang dapat

Beberapa capaian BPJPH pada tahun 2023, diantaranya mampu menyelesaikan sertifikasi halal sebanyak 1.222.658 lebih besar 121,24% dari yang ditargetkan sebanyak 1.008.500, dengan sertifikat pendaftaran secara regular 23.532 dan *self declare* sebanyak 1.199.126.

INDEKS KEPUASAN LAYANAN SERTIFIKASI HALAL



diunduh melalui *playstore* bagi pengguna android dan *appstore* bagi pengguna iOS. Dengan demikian, pendaftaran sertifikasi halal kian dekat dengan masyarakat.

Pada tahun 2023, BPJPH memperoleh 2 penghargaan *Top Digital Award* 2023, yaitu:

a. TOP Digital Implementation 2023 dengan Level Bintang Empat (Sangat Baik) dalam ajang *Top Digital Award* 2023 oleh Majalah ITWorks;
b. TOP *Leader On Digital Implementation* 2023 yang diberikan kepada Kepala BPJPH oleh Majalah ITWorks.

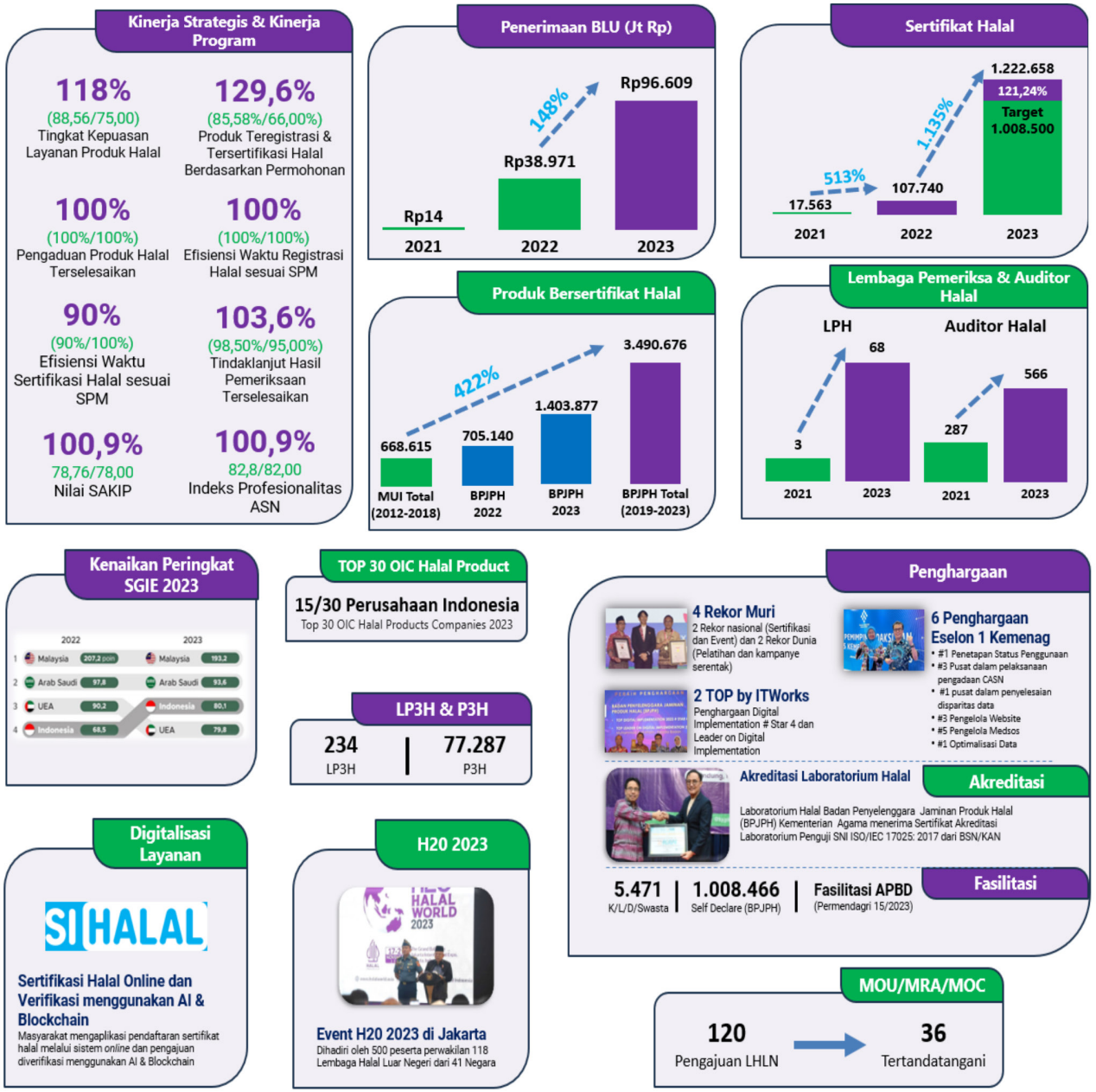
Capaian terbesar lainnya di internasional adalah Indonesia berhasil masuk tiga besar pada *the Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) dalam *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) Report 2023 yang dirilis oleh DinarStandard di Dubai, Uni Emirat Arab, Selasa (26/12/2023). Indonesia yang pada tahun 2022 di posisi keempat, kini menduduki peringkat ketiga, di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Peningkatan Indonesia ke ranking 3 ini adalah kabar baik yang membuktikan bahwa berbagai upaya penguatan ekosistem Jaminan Produk Halal kita semakin menunjukkan hasil positif.

Kemudahan juga diterima pelaku usaha karena SIHALAL tidak hanya aplikasi berbasis *website* tetapi juga juga dikembangkan dalam basis *mobile* yang dapat diunduh melalui *playstore* bagi pengguna android dan *appstore* bagi pengguna iOS. Dengan demikian, pendaftaran sertifikasi halal kian dekat dengan masyarakat.



Selain itu, capaian 15 perusahaan produk halal Indonesia yang masuk dan mendominasi separuh dari *Top 30 OIC Halal Products Companies* 2023 juga merupakan kebanggaan BPJPH. Pemeringkatan *Top 30 OIC Halal Products Companies* 2023 menampilkan negara-negara utama di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Kawasan Teluk (GCC). Perusahaan-perusahaan tersebut dinilai berdasarkan ekspor intra-OKI dan inisiatif pasar halal mereka. *Top 30 OIC Halal Products Companies* 2023 menampilkan gabungan 30 perusahaan yang telah mendominasi pasar domestik dan mempunyai posisi yang baik untuk memperjuangkan strategi pasar halal. Dari 30 perusahaan tersebut, 15 adalah produsen makanan halal, 10 bergerak di bidang farmasi, dan 5 bergerak di bidang kosmetik. Dari 30 perusahaan, separuhnya (15 perusahaan) merupakan perusahaan Indonesia. Malaysia berada di urutan kedua dengan lima perusahaan, diikuti oleh Arab Saudi (empat), Pakistan (dua), UEA (dua), Bangladesh (satu) dan Brunei (satu).

Capaian internasional tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dalam membangun ekosistem halal. BPJPH secara aktif telah menjalin kemitraan dengan beberapa negara secara global untuk menyediakan layanan jaminan produk halal. Selain itu, BPJPH telah menginisiasi forum Halal 20 (H20), yang merupakan tonggak penting dalam pengembangan ekosistem dan industri halal global, serta wadah kemitraan halal global.



Capaian lainnya adalah akreditasi Laboratorium Halal BPJPH. Sepanjang Tahun 2022, Laboratorium Halal BPJPH mempersiapkan akreditasi Laboratorium Pengujian yaitu SNI ISO/IEC 17025:2017 mulai dari sarana prasara, kompetensi personil, pemilihan parameter dan metode uji hingga dokumen-dokumen acuan yang dipersyaratkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pada bulan Februari 2023, akhirnya Laboratorium Halal BPJPH mendapatkan sertifikat akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dengan nomor akreditasi LP-1 IDN.

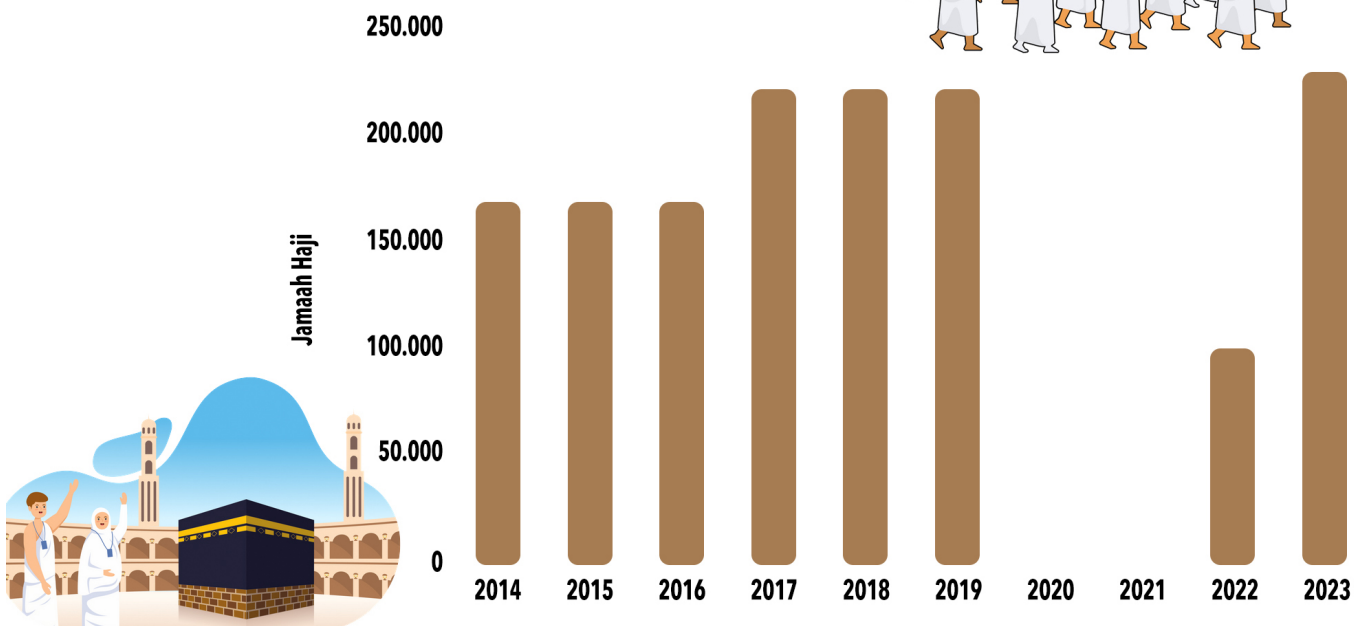
Di samping peluang-peluang di atas terdapat beberapa tantangan terbesar yakni peningkatan kesadaran halal atau halal awareness yang merupakan tingkat pemahaman umat beragama dalam mengetahui isu-isu terkait konsep halal. Pengetahuan tersebut termasuk di dalamnya memahami apa itu halal dan bagaimana proses produksi suatu produk sesuai standar halal. ■

5. Melayani Jemaah Haji Sepenuh Hati

Tahun 2023 Kementerian Agama sukses melakukan penyelenggaraan 'Haji Ramah Lansia'. Kemenag memfasilitasi keberangkatan 61.536 jamaah haji yang berusia 65 tahun ke atas dan 5.791 jamaah disabilitas. Ini merupakan jamaah haji lansia terbanyak dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.







	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kuota Awal	155.200	155.200	155.200	204.000	204.000	214.000	92.825	210.680		
Berangkat	154.467	154.456	154.441	203.065	203.351	212.732	92.668	209.782		
Sisa	733 (0,47%)	744 (0,48%)	759 (0,49%)	935 (0,46%)	649 (0,32%)	1.268 (0,59%)	157 (0,17%)	898 (0,43%)		

Sumber: Haji Dalam Data, 2023

SEBELUM	SESUDAH
• Pembayaran setoran awal hanya bisa dilakukan di cabang bank, • Bukti setoran awal masih 5 rangkap dan bermaterai, • Pendaftaran hanya bisa dilakukan di Kantor Kemenag kab/kota, • Bukti pendaftaran haji berupa lembaran fisik 5 rangkap.	• Pembayaran setoran awal dapat dilakukan melalui *mobile banking*, • Bukti setoran awal terkirim secara elektronik ke siskohat dan tidak perlu materai, • Pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi Haji Pintar, • Bukti pendaftaran haji berupa file elektronik dan ditandatangani secara elektronik, dan jemaah dapat men-*download* bukti pendaftaran haji.



Tahun 2023 Kementerian Agama sukses melakukan penyelenggaraan 'Haji Ramah Lansia'. Kemenag memfasilitasi keberangkatan 61.536 jamaah haji yang berusia 65 tahun ke atas dan 5.791 jamaah disabilitas. Ini merupakan jamaah haji lansia terbanyak dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia atau sekitar 29,3% dari total Jemaah haji yang tiba di tanah suci yakni 209.782 orang. Tahun 2023 juga pertama kalinya panitia penyelenggara ibadah haji yang memfasilitasi safari wukuf khusus bagi 129 orang jamaah haji lansia dan disabilitas.

Terkait dengan pendaftaran haji secara elektronik, Kemenag telah mengelola aplikasi yang mengintegrasikan sejumlah layanan secara *online*, diantaranya pendaftaran haji secara elektronik yang dimulai sejak November 2022, melalui Aplikasi Pusaka Apps.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia tahun 2022 meningkat sangat pesat dari 85,91 pada 2019 menjadi 90,45 pada 2022. Kenaikan tersebut paling signifikan disumbangkan layanan di Arofah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) ■



6. Mengatrol Aksesibilitas, Kualitas, dan Daya Saing Pendidikan

Kualitas pemerataan akses pendidikan di Kementerian Agama tahun 2023 dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Realisasi capaian APK jenjang dasar dan menengah telah mencapai target yang ditetapkan. APK untuk RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha mencapai 46,98 % dari target 13 %; untuk MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman mencapai 16,33 % dari target 15,67 %; untuk MTs/Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman mencapai 40,02 % dari target 25,70 %; dan untuk APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman mencapai 23,52 % dari target 12,40 %.



Kualitas pemerataan akses pendidikan di Kementerian Agama tahun 2023 dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Realisasi capaian APK jenjang dasar dan menengah telah mencapai target yang ditetapkan.



ANGKA PARTISIPASI KASAR JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN DI KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2023

No	Jenjang dan Jenis Pendidikan	Target 2023	Capaian		
			Jumlah	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	APK RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/ Nava Dhammasekha	13.00	8.870.492	46,98	361,40
2	APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	15,67	4.674.541	16,33	104,24
3	APK MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman	25,70	5.539.997	40,02	155,72
4	APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman	12,40	3.165.828	23,52	189,69

Sumber: Kertas Kerja Laporan Capaian Kinerja Eselon I Pusat Kementerian Agama Triwulan III dan IV Tahun 2023

Selain itu, realisasi capaian APM jenjang dasar dan menengah telah mencapai target yang ditetapkan. APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman mencapai 13,79 % dari target 12,46 %; untuk MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman mencapai 32,06 % dari target 22,38 %; dan untuk MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman mencapai 21,22 % dari target 20,20 %.

ANGKA PARTISIPASI MURNI JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN DI KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2023

No	Jenjang Pendidikan	Target 2023	Capaian		
			Jumlah	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	12,46	3.945.939	13,79	110,66
2	APM MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman	22,38	4.438.640	32,06	143,27
3	APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman	20,20	2.856.709	21,22	105,07

Sumber: Kertas Kerja Laporan Capaian Kinerja Eselon I Pusat Kementerian Agama Triwulan III dan IV Tahun 2023

Untuk melihat indikator kualitas pembelajaran dan pengajaran adalah presentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam tes Assesmen Kompetensi. Di tahun 2023, realisasi capaian literasi sebesar 49 % dari target 60,3 % dan untuk numerasi sebesar 70 % dari target 27,10 %.

PRESENTASE SISWA DI ATAS BATAS KOMPETENSI MINIMAL DALAM TES ASSESMEN KOMPETENSI

No	Aspek	Target 2023	Capaian		
			Jumlah	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Literasi	60,30	154.163	49,00	81,26
2	Numerasi	27,10	220.233	70,00	258,30

Sumber: Kertas Kerja Laporan Capaian Kinerja Eselon I Pusat Kementerian Agama Triwulan III dan IV Tahun 2023

Sementara itu, kualitas penjaminan mutu pendidikan dapat dilihat dari persentase satuan pendidikan yang terakreditasi. Realisasi capaian persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/Minimal B sebesar 78,08 % dari target 67,76 %; untuk MTs/Wustha/SMPTK/ Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/Minimal B sebesar 71,03 % dari target 67,76 %; untuk MA/Ulya/ SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/Minimal B sebesar 65,13 % dari target 67,76 %; dan untuk PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/ Unggul sebesar 3,88 % dari target 32,46 %.

PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG TERAKREDITASI DI KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2023

No	Jenjang Pendidikan	Target 2023	Capaian		
			Jumlah	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/Minimal B	67,76	20.707	78,08	115,23
2	Presentase MTs/Wustha/ SMPTK/ Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/Minimal B	67,76	13.617	71,03	104,82
3	Presentase MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/Minimal B	67,76	6.407	65,13	96,11
4	Presentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul	32,46	37	3,88	11,95

Sumber: Kertas Kerja Laporan Capaian Kinerja Eselon I Pusat Kementerian Agama Triwulan III dan IV Tahun 2023

Dari aspek relevansi, Kementerian Agama telah meningkatkan kualitas pendidikan vokasi berbasis kerjasama dengan dunia kerja/industri. Pada tahun 2003, tercatat 3 (tiga) MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri. Di level PTK, aspek relevansi pendidikan diukur dari persentase PTK yang memiliki prodi/kelas Internasional dan persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan. Di 2023, realisasi capaian PTK yang memiliki prodi/kelas Internasional sebesar 12,66 %

yang semula ditarget sebesar 5,86 %. Sedangkan persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan yang semula menargetkan 47,44 % terrealisasi sebesar 99,07 %.

PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG TERAKREDITASI DI KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2023

No	Aspek	Target 2023	Capaian		
			Jumlah	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas Internasional	5,84	111	12,66	216,73
2	Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	47,44	197.870	99,07	208,84

Sumber: Kertas Kerja Laporan Capaian Kinerja Eselon I Pusat Kementerian Agama Triwulan III dan IV Tahun 2023

Meskipun secara keseluruhan belum sepenuhnya berdaya saing yang tinggi, terdapat PTK memiliki capaian-capaian tertentu seperti UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berhasil mendapat ranking *Religious Study SCImago Institutions Rankings* (SIR) dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berhasil meraih akreditasi internasional *Foundation for International Business Administration Accreditation* (FIBAA) bagi 18 program studinya. Di sisi lain, inovasi juga terus menerus dilakukan oleh PTK. Mahasiswa Fakultas Humaniora dari UIN Malang telah sukses meraih medali perak pada ajang *World Young Inventors Exhibition* 2023 (WYIE) yang diselenggarakan di Kuala Lumpur Convention Center (KLCC).

Dalam konteks mengubah citra publik, Kementerian Agama telah melakukan percepatan dalam alih status dan bentuk kelembagaan. Di Bimas Kristen, terdapat 24 penegerian satuan pendidikan jenjang dasar dan menengah, dimana 10 lembaga dalam proses persetujuan Kemenpan & RB dan 14 lembaga usulan baru. Sementara itu, ada rintisan pendirian satuan pendidikan umum berciri khas agama Hindu yang bernama Widyalaya. Pendidikan Widyalaya dari jenjang TK hingga SMA. Di Widyalaya ini bisa disebut jenjang Pratama, Adi, Madya dan Utama. Dan, sudah dirancang Peraturan Menteri Agama (PMA) dengan harmonisasi dengan Kemenkumham.

Di level PTK, rintisan alih status kelembagaan pendidikan di Bimas Kristen diusulkan yaitu alih status 2 (dua) PTK swasta ke negeri, 1 (satu) institut menjadi universitas, dan 2 (dua) sekolah tinggi menjadi institut. Rintisan alih status dan bentuk kelembagaan di PTK lainnya adalah di Pendidikan Tinggi Keagamaan Hindu, yaitu: Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Negeri Mpu Kuturan Singaraja menjadi Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan, IAHN Tampung Penyang menjadi Universitas Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, dan penegerian Sekolah Tinggi Hindu Dharma (STHD) Klaten Jawa Tengah menjadi Sekolah Tinggi Hindu Negeri Jawa Dwipa.

Transformasi Kelembagaan pendidikan tinggi keagamaan Buddha diawali dengan upaya penyiapan rencana penyusunan *grand design* pendidikan tinggi keagamaan Buddha. Peningkatan status lembaga pendidikan tinggi keagamaan Buddha, antara lain STABN Sriwijaya dan STABN Raden Wijaya Wonogiri dan beberapa syaratnya sudah dipenuhi, antara lain penambahan jumlah dosen, jumlah lahan. Ditjen Bimas Buddha melakukan diskusi-diskusi dengan Kemenpan dan Bappenas. Bahkan, Bappenas sudah meninjau ke lokasi. Perubahan status dari Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia yang berstatus swasta menjadi Negeri mengalami kendala ketersedian anggaran untuk pembangunan sarana prasarana jika lembaga tersebut diambilalih Pusbimdik Khonghucu. ■



7. Memaksimalkan Fungsi Dana Sosial Keagamaan

Merujuk pada hasil capaian kinerja Direktorat Zakat Wakaf Bimas Islam, sepanjang tahun 2023 telah dilakukan 9 penyelesaian sengketa wakaf serta 25.755 bidang dengan luas 2.398,38 ha total tanah wakaf yang telah bersertifikat. Percepatan pertumbuhan izin Lembaga amil zakat yang dilakukan berjumlah 7 LAZ berskala nasional, 2 LAZ berskala provinsi dan 16 LAZ berskala Kabupaten/kota. Sementara itu, untuk sertifikasi SKKNI oleh LSP BAZNAS dan LSP Beksya sebanyak 517 amil.



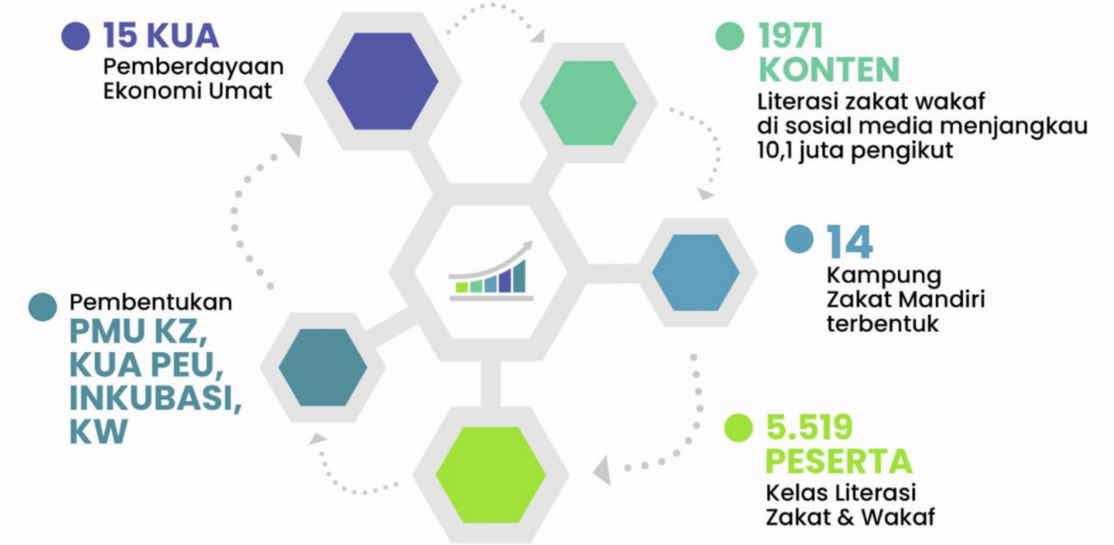
Sumber: Bimas Islam, 2023

Namun, Kementerian Agama mencatat bahwa baru sekitar 57,42 persen tanah wakaf telah bersertifikat BPN. Sebagai pembanding, Kementerian ATR/BPN memberikan informasi bahwa per November 2023 terdapat 242.506 bidang tanah wakaf seluas 23.000 hektar di seluruh Indonesia. Jumlah bidang tanah ini merupakan hasil dari percepatan sertifikasi tanah wakaf yang 7 tahun terakhir mencapai 20.000 bidang per tahun. Pada 2023 sendiri, pendaftaran tanah wakaf sebanyak 25.755 bidang seluas 2.398,38 hektar. Pendaftaran tertinggi terlaksana di Provinsi Jawa Timur sebanyak 10.196 bidang tanah wakaf.

Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf Kemenag (2022), tanah wakaf di Indonesia sudah tersebar di 440.512 ribu titik dengan total luas mencapai 57.263 hektar dan jumlah tanah wakaf mencapai 435.821. Artinya, terjadi peningkatan jumlah wakaf sekitar 6 persen, dan secara tren terus mengalami perkembangan. Pemanfaatan tanah wakaf sebagai sarana ibadah diantaranya masjid di 191.270 lokasi (43,51%), musala di 122.630 lokasi (27,90%), dan makam sekitar 19.135 lokasi (4,35%). Selain itu, pemanfaatan tanah wakaf dalam pendidikan, sosial ekonomi/produktif diantaranya sekolah di 47.336 lokasi (10,77%), pesantren 18.018 lokasi (4,10%), dan sosial ekonomi di 41.138 lokasi (9,37%).

Peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat salah satu kebijakan strategis dari 13 kebijakan strategis Kementerian Agama 2020-2024. Pada Bimas Agama Islam Kebijakan ini difokuskan pada peningkatan sumber dana dari lembaga ekonomi keagamaan yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan agama, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan, melalui:

> **Potensi penerimaan zakat Indonesia ditaksir mencapai 400 Triliun, namun penerimaan tahun 2022 yang diungkap pada tahun 2023, jumlah penerimaan zakat Indonesia sebesar Rp 21 Triliun, hal ini penting menjadi perhatian untuk mengejar potensi zakat Indonesia.**



Sumber: Bimas Islam, 2023

a. Program Kantor Urusan Agama Pemberdayaan Ekonomi Umat (KUA PEU) yang merupakan program pendampingan dan penguatan akses pemberdayaan ekonomi umat berbasis keluarga/komunitas yang terdiri dari pemberian bantuan pemberdayaan ekonomi umat, pelatihan, *workshop* usaha serta pendampingan usaha terhadap pengusaha UMKM.
b. Program Inkubasi Wakaf Produktif, yang melibatkan Badan Wakaf Indonesia, lembaga wakaf, lembaga zakat, dan pemerintah daerah. Program ini berjalan dari tahun tahun 2020 dan saat ini sudah ada 46 titik yang dijadikan project pengembangan inkubasi wakaf produktif. Program ini merupakan wahana transformasi pembentukan sumberdaya manusia nazhir menjadi sumber daya manusia yang mempunyai jiwa usaha yang kreatif. Inovatif dan visioner. Nazhir penerima bantuan akan mendapatkan akses permodalan, pelatihan dan pendampingan.
c. Program Kampung Zakat yang merupakan kegiatan Kemenag bersama dengan BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Nasional untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang berhubungan dengan dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial kemanusiaan. Kemenag sebagai koordinator dan didukung menjadi eksekutor dan fasilitator program pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat yaitu pihak BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat. Sasaran program kampung zakat adalah para penduduk desa yang tergolong mustahik dengan kriteria asnaf miskin dan *fisabilillah*.

Potensi penerimaan zakat Indonesia ditaksir mencapai 400 Triliun, namun penerimaan tahun 2022 yang diungkap pada tahun 2023, jumlah penerimaan zakat Indonesia sebesar Rp. 21 Triliun, hal ini penting menjadi perhatian untuk mengejar potensi zakat Indonesia. Dalam pengelolaan zakat nasional, literasi zakat sangat penting. Perluas jejaring peningkatan literasi zakat ke seluruh PTKIN, madrasah, pesantren, dan BUMN. Pengelolaan zakat harus diintegrasikan dengan tujuan nasional karena tujuan akhir dari pengelolaan zakat adalah kesejahteraan umat.

Sementara itu, pengelolaan dana sosial keagamaan untuk umat Hindu masih terkendala dengan belum optimalnya pengelolaan dana punia. Namun, beberapa langkah telah dilakukan sepanjang tahun 2023, yakni dengan menetapkan PMA tentang dana punia yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2003, tentang Pengelolaan Dana Punia.



Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Kristen lazimnya diterapkan dalam kehidupan Gereja dan dikenal dengan istilah "Dana Diakonia". Sampai saat ini sudah ada 3 (tiga) Yayasan Keagamaan Kristen Pengumpul/Pengelola Dana Umat yang ditetapkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yaitu Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa, Yayasan Filadelfia, Yayasan Sumbangan Keagamaan Kristen (Yaski). Legalitas Pengelolaan Dana Keagamaan Kristen ini perlu penguatan dengan fondasi/payung hukum melalui Peraturan Menteri Agama. Saat ini Ditjen Bimas Kristen dalam proses penyusunan payung hukum tersebut. Status dan dasar hukum yang kuat bertujuan untuk menjaga transparansi dan tingkat kepercayaan umat Kristen sendiri.

Data pemberdayaan dana sumbangan keagamaan Katolik BAKKAT mengalami peningkatan sebesar Rp29.416.990.780,- dari target Rp15.000.000.000,- mencerminkan antusiasme dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan dan sumbangan keagamaan. Dana yang berhasil terkumpul melebihi target memberikan peluang lebih besar untuk mendukung program-program keagamaan dan sosial. Pemberdayaan BAKKAT dapat digunakan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan keagamaan, bantuan sosial, dan proyek-proyek kemanusiaan, menciptakan dampak positif yang lebih besar dalam komunitas Katolik. ■

8. Memperkuat Profesionalisme ASN

Sepanjang tahun 2023 pengembangan kompetensi telah dilakukan kepada sebanyak 279.684 orang tersebut terdiri dari: alumni pelatihan tenaga teknis keagamaan 23.103 orang, alumni pelatihan tenaga teknis pendidikan sebanyak 239.767 orang dan alumni tenaga administrasi sebanyak 16.814 orang.

Reformulasi pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi dan meningkatkan profesionalisme ASN secara masif dilakukan melalui optimalisasi penggunaan *platform* digital LMS MOOC (*Massive Online Open Course*) Pintar. Selama kurun waktu 15 bulan sejak 2022 hingga 2023, sebanyak 284.054 peserta mengikuti program pelatihan Kemenag. Hal ini setara dengan 9.468 kelas dengan rata-rata peserta 30 orang tiap kelasnya. Selain melalui MOOC, penguatan melalui Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) juga tetap digalakkan terutama pada penguatan kompetensi tertentu yang membutuhkan tatap muka dalam dunia maya.

Selain pada peningkatan kompetensi teknis, peningkatan kompetensi manajerial juga dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan kepemimpinan dengan melibatkan para pemangku jabatan eselon II dan eselon III Kementerian Agama:

SEBARAN PESERTA PELATIHAN MELALUI MOOC PINTAR TAHUN 2023



Sumber: Badan Litbang dan Diklat, 2023

Reformulasi pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi dan meningkatkan profesionalisme ASN secara masif dilakukan melalui optimalisasi penggunaan *platform* digital LMS MOOC (*Massive Online Open Course*) Pintar. Selama kurun waktu 15 bulan sejak 2022 hingga 2023, sebanyak 284.054 peserta mengikuti program pelatihan Kemenag. Hal ini setara dengan 9.468 kelas dengan rata-rata peserta 30 orang tiap kelasnya.

JUMLAH PESERTA PER PELATIHAN MOOC KEMENTERIAN AGAMA

No	Nama Pelatihan	Jumlah Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Pelatihan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia	3	5.053
2	Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)	5	30.214
3	Pelatihan Karya Tulis Ilmiah bagi Penghulu dan Penyuluh	2	2.643
4	Pelatihan Kurikulum Merdeka pada Madrasah	2	39.106
5	Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka	10	83.611
	- Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Komunitas		
	- Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka untuk Kepala Madrasah, IN, Fasprov dan Fasda PKB, dan Dosen PPG		
	- Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka untuk Kepala Madrasah dan Pengawas		
6	Pelatihan Multimedia Pembelajaran (Tutorial Membuat Bahan Ajar dengan Aplikasi *Open Source*)	2	14.842
7	Pelatihan Numerasi : Asesmen Numerasi Kelas Awal (INOVASI)	3	6.158
8	Pelatihan Numerasi : Ide Praktis Pembelajaran dan Permainan Numerik (INOVASI)	3	11.921
9	Pelatihan Numerasi: Pemanfaatan *Tools Online* untuk Pembelajaran Aktif (INOVASI)	2	14.516
10	Pelatihan Literasi : Asesmen Awal Pembelajaran Literasi	2	8.221
11	Pelatihan Literasi : Pembelajaran Terdiferensiasi dengan Keterampilan Membaca Dekoding dan Pemahaman	2	4.710
12	Pelatihan Literasi : Pembelajaran Terdiferensiasi: Membaca Bersama dan Membaca Terbimbing untuk Kelas Awal	2	8.510
13	Pelatihan Metodologi Pembelajaran (Model Pembelajaran Ter-*update*) (BDK BANDUNG)	3	13.616
14	Pelatihan Penilaian Pembelajaran berbasis HOTS dalam Kurikulum Merdeka (BDK PALEMBANG)	3	14.435
15	Keluarga Sakinah (BDK BANJARMASIN)	5	7.834
16	Pelatihan Bimbingan dan Konseling (BDK SURABAYA)	1	2.834
17	Pelatihan Media Pembelajaran Berbasis *Artificial Intelligence* (BDK DENPASAR)	3	22.498
18	Pelatihan Manajemen Kemasjidan (BDK SEMARANG)	3	3.986
19	Pelatihan Multimedia Berbasis Web (*Web-based* Pengelolaan Pembelajaran) (BDK MANADO)	1	2.970
20	PPKB GPAI	1	13.000
JUMLAH		58	310.678

Sumber: Badan Litbang dan Diklat, 2023

Analisis sederhana dalam mengkalkulasikan penghematan biaya pelatihan secara klasikal yang selama ini dilakukan dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme ASN dan MOOC adalah sebagai berikut: apabila dalam 1 angkatan pelatihan berisi 30 orang dengan durasi 6 hari menghabiskan anggaran rata-rata Rp 170 juta. Jumlah peserta yang mengikuti MOOC sejak bulan Juli sampai Oktober 2023 tercatat sebesar 262.144 orang 262.144 : 30 = 8.738 angkatan pelatihan 8.738 x 170 juta = ± penghematan yang dilakukan 1,4 Triliun.

Selain pada peningkatan kompetensi teknis, peningkatan kompetensi manajerial juga dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan kepemimpinan dengan melibatkan para pemangku jabatan eselon II dan eselon III Kementerian Agama:

JUMLAH PENINGKATAN KOMPETENSI MANAJERIAL TAHUN 2023

No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta
1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II	60 Orang
2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	160 Orang
	Jumlah	**220 Orang**

Kolaborasi dalam pengembangan kompetensi ASN juga dilakukan dengan melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga, di antaranya:

PROGRAM KOLABORASI KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2023

No	Program Kolaborasi	Kementerian/ Lembaga	Penerima Manfaat	Jumlah Sasaran
1	Pelatihan Fungsional Penjenjangan Arsiparis	ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia)	JF Arsiparis	60 orang
2	Pelatihan Fungsional Perencana	Universitas Brawijaya	JF Perencana	25 orang
3	Pelatihan Fungsional Pranata Humas	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)	JF Pranata Humas	30 orang
4	Pelatihan Analis Sumber Daya Manusia	Pusat Pengembangan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Analis SDM Aparatur	30 orang
5	Pelatihan Statistisi	Badan Pusat Statistik	Statistisi	30 orang
6	Pelatihan Analis Kebijakan dan Widyaiswara	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	JF Analis Kebijakan dan Widyaiswara	60 orang
7	Penguatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan	Kominfo	Penyuluh Agama dan Guru	37.632 orang

Sumber: Badan Litbang dan Diklat 2023

Selain lembaga pelatihan, pengembangan kompetensi juga dilakukan oleh beberapa unit kerja eselon 1 lainnya, seperti penguatan kompetensi penceramah agama islam sebanyak 12.000 orang, 5.519 peserta kelas literasi zakat dan wakaf, dan lain sebagainya. Penguatan Moderasi Beragama juga terus digalakan untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN dan Moderasi Beragama, ditandai dengan hadirnya 13.762 orang yang mengikuti pelatihan MB sepanjang tahun 2023. ■

9. Menjawab Kebutuhan Regulasi Layanan Keagamaan

Kementerian agama pada tahun 2023 berhasil menyelesaikan beberapa regulasi terkait tata kelola Kementerian Agama dan layanan keagamaan, antara lain:

No	Kategori Peraturan	Jumlah
1	Peraturan Menteri Agama	19
2	Keputusan Menteri Agama	216
3	Instruksi Menteri Agama	1
4	Keputusan Pejabat Eselon 1	96
5	Surat Edaran	10
6	Naskah Akademik/Naskah Urgensi	1

BEBERAPA PERATURAN KRUSIAL YANG DITUNGGU KEHADIRANNYA DAN TELAH TERBIT PADA TAHUN 2023

1) Perpres Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama

2) KMA Nomor 332 tahun 2023 tentang Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan

3) SE Menag Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Kantor Kementerian Agama sebagai Rumah Ibadah Sementara

4) PMA No 1 Tahun 2023 tentang satu data Kementerian Agama

5) PMA No 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Rekomendasi Perizinan Orang Asing di Bidang Agama

6) PMA No 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pada atau di Lingkungan Kementerian Agama (Kemenag)

7) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penanganan Pengaduan pada Kementerian Agama

8) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Punia

9) Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah.

10) Instruksi Menag No 1 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di Lingkungan Satuan Kerja Kementerian Agama.



Sementara itu, untuk regulasi layanan pendidikan beberapa regulasi yang telah diselesaikan, misalnya PMA No 2 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Prosedur Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Selain itu, saat ini telah dilakukan proses penyusunan naskah urgensi perubahan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Penyusunan naskah urgensi ini dilakukan sebagai produk peraturan yang dibutuhkan dengan sasaran untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan.

Regulasi yang mengatur buku "agama dan keagamaan" sejauh ini merujuk pada UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Karena munculnya berbagai kasus buku pendidikan agama (BPA) bermasalah, maka Menteri Agama memandangnya sebagai "situasi darurat" sehingga terbitlah PMA Nomor 9 Tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama, yang secara garis besar mengatur tiga hal yaitu: (1) penyediaan BPA yang dilakukan melalui tahapan pemerolehan, penilaian, penerbitan, dan pendistribusian; (2) ketentuan tentang pembiayaan, dan; (3) pengaturan terkait pengawasan. Setahun kemudian, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. PMA 9/2018 hanya mengatur terkait BPA, sementara beberapa pasal PP 75/2019 (terutama pasal 41, 42, 43, dan 44) mengamanatkan kepada Kemenag untuk tidak hanya mengatur buku teks utama pendidikan agama, tetapi juga terkait buku pendidikan keagamaan. Kelemahan PMA 9/2018 yang mendahului PP tersebut "ditutupi" dengan terbitnya PMA Nomor 9 Tahun 2021 tentang *Pengesahan Standar Mutu Buku Umum Keagamaan*. Implementasikan PMA 9/2021 bersifat *volunteer* (suka rela), yaitu jika ditemukan kasus buku bermasalah atau diterimanya pengaduan dari instansi atau perorangan.

Ekosistem yang terlibat dalam pengelolaan "perbukuan" agama tersebut cukup luas, baik unsur K/L maupun unsur masyarakat (pelaku perbukuan), antara lain: (1) Pusat Perbukuan BSKAP Kemendikbud Ristek, yang mulai 2024 "menyerahkan" sepenuhnya urusan buku pendidikan agama dan keagamaan kepada Kemenag; (2) PLKKMO, Badan Litbang dan Diklat Kemenag, melaksanakan amanat KMA Nomor 437 Tahun 2001 dan PMA Nomor 9 Tahun 2018; (3) Subdit Kepustakaan Islam Ditjen Bimas Islam, menunaikan amanat PMA Nomor 9 Tahun 2021, yang antara lain menyebutkan bahwa Ditjen atau Kepala Pusat dan ketua lembaga keagamaan membentuk Tim Standar Mutu yang terdiri atas unsur: kementerian/lembaga, akademisi, praktisi, dan lembaga keagamaan; (4) Seluruh Ditjen dan Pusbimdik Konghucu di lingkungan Kemenag yang membidangi penyediaan/penyusunan buku teks utama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu); (5) Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman (LPBKI) MUI, dibentuk 2014 dengan tujuan meneliti buku dan konten Islami terutama di media penyiaran. Di samping itu, PGI, PHDI, MBI, dan MATAKIN juga memiliki tanggung jawab, kewenangan, dan karakter tersendiri dalam mengelola, mengevaluasi, dan mengawasi buku agama dan keagamaan.

Sepanjang tahun 2023, Badan Litbang dan Diklat Kemenag tercatat sudah 3 kali melakukan advokasi terhadap buku pendidikan agama dan keagamaan yang dianggap bermasah, yaitu: (1) Berita *Online* di Detikjatim Berjudul "*8 Buku MTs Menyimpang di Sampang Terbitan Kemendikbud hingga Kemenag*", Minggu 6 Agustus 2023; (2) Artikel pada https://www.jurnalis24.com Berjudul: "*Komisi VIII DPR RI Agar Memanggil Kemdikbudristek: Cover Buku PAI pada SMA/SMK Mulai Rame Dibicarakan Publik*"; (3) Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B- 1596/D/Dsb.1/10/2023, tertanggal 20 Oktober 2023, perihal "Adanya Peredaran Barang Cetakan berupa Buku dengan judul "Irsyadul 'Ibad Ilasabilirrasyad (PETUNJUK KE JALAN LURUS) yang berisikan ujaran kebencian terhadap Instansi Bea Cukai. Rekomendasi utama hasil advokasi tersebut yaitu: Kementerian Agama diminta agar melakukan pelayanan "satu pintu" dalam pengelolaan "perbukuan" agama dan keagamaan, mulai dari penyusunan, penilaian, penerbitan, dan pendistribusiannya (dari hulu ke hilir). ■

BAB III

PROYEKSI DAN PRESKRIPSI: STRATEGI PENGUATAN DIGITALISASI LAYANAN



1. Ekosistem Moderasi Beragama yang Ekspansif

Tahun 2024 menemukan momentum untuk membangun ekosistem moderasi beragama yang ekspansif karena telah ditandatangai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama oleh Presiden Jokowi. Melalui Perpres tersebut terdapat arah kebijakan dan pengaturan yang terencana, sistematis dan berkelanjutan program dan gerakan moderasi beragama. Regulasi ini bisa menjadi pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan umat beragama dalam rangka penguatan Moderasi Beragama.

Indonesia berpeluangan dan berkesempatan tampil sebagai negara-bangsa teladan bagi dunia yang mampu mengelola kemajemukan. Kebijakan moderasi beragama menjadi modal dasar sosial pembangunan untuk mewujudkan cita-cita negara. Di sisi lain, masyarakat mendukung kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun dan damai. Sehingga Indonesia berkesempatan mempercepat pemenuhan SDGs melalui hasil moderasi beragama.

Tahun 2024 menemukan momentum untuk membangun ekosistem moderasi beragama yang ekspansif karena telah ditandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama oleh Presiden Jokowi.

Dalam proyeksi negara ke depan, pembangunan SDM sangat krusial. Negara boleh melahirkan para teknokrat, saintis, dan profesional yang ahli di bidangnya. Beasiswa juga dikucurkan buat mereka. Tetapi kontribusinya akan tidak berarti jika mereka memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku keagamaan yang ekstrem dan eksklusif, karena hal itu justru dapat memberikan dampak destruktif bagi negara. Atas dasar itu, Pembangunan SDM yang memiliki sikap keberagamaan moderat menjadi sebuah kebutuhan.

Suatu hal yang perlu disadari, bahwa pembangunan SDM yang memiliki cara pandang dan sikap beragama yang moderat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling bertautan. Setiap faktor berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga membentuk sebuah sistem yang kompleks. Penguatan Moderasi Beragama perlu dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan sinergitas kerja sama.

Terdapat **7 (tujuh) kelompok** yang bisa disebut sebagai **ekosistem moderasi beragama** yang memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Penguatan Moderasi Beragama pada ketujuh kelompok ini akan mempercepat pengarusutamaan Moderasi Beragama di Indonesia. **Tujuh kelompok tersebut adalah: birokrasi, dunia pendidikan, TNI/Polri, media, masyarakat sipil, partai politik, dan dunia bisnis.**

PADA TAHUN 2024, GERAKAN PENGUATAN MODERASI BERAGAMA PERLU DILAKUKAN LEBIH EKSPANSIF TERHADAP TUJUH ELEMEN EKOSISTEM MODERASI BERAGAMA YAITU:

1. Penguatan Moderasi Beragama diawali dari birokrasi atau pegawai aparatur sipil negara di pemerintahan pusat dan daerah serta BUMN dan BUMD. Mereka diorientasikan untuk memiliki perspektif moderat dalam pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

2. Dunia pendidikan perlu mendapatkan penanaman nilai-nilai Moderasi Beragama. Lembaga pendidikan tidak hanya bertanggung jawab agar peserta didik menjadi orang-orang yang cerdas, tetapi juga bertanggung jawab untuk memberdayakan peserta didik agar memiliki nilai-nilai moral dan keagamaan yang moderat. Beragama secara moderat perlu menjadi pemahaman dan sikap keagamaan para siswa, para tenaga kependidikan, dan guru.

3. Unsur TNI/Polri, mereka berperan menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI untuk memiliki perspektif moderat dalam menjamin hak-hak sipil warga negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang peran strategis dalam memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, setiap personil Polri sangat penting untuk memiliki perspektif moderat dalam menjamin hak-hak sipil warga negara.

4. Media memiliki peran strategis dalam ekosistem Moderasi Beragama. Selama ini, media telah berperan dalam pengayaan literasi masyarakat sebagai pembentuk nilai-nilai kolektif yang kontributif bagi pembangunan masyarakat bangsa. Media juga berperan dalam pengurangan sentimen kebencian, intoleransi, sikap ekslusif, dan ekstrimisme.

5. Masyarakat sipil merupakan ekosistem utama dalam Moderasi Beragama, untuk itu perlu dilakukan penguatan peran dan kapasitas tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, budayawan, organisasi berbasis agama, pengelola rumah ibadah, ormas sipil, keluarga, perempuan, dan anak muda.

6. Partai politik mulai dari unsur pimpinan, para kader, dan calon anggota legislatif, perlu menjadikan nilai-nilai keberagamaan yang moderat sebagai basis dalam menjalankan peran berpolitik, serta penguatan praktik politik bermartabat dan nir-SARA. Partai politik memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai moderat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

7. Penguatan Moderasi Beragama diperlukan bagi para pelaku usaha, sehingga akan dapat mendorong pengembangan dunia bisnis ke arah pengembangan ekonomi yang inklusif, adil, dan tidak diskriminatif.

Pada tahun 2024, ekspansi gerakan penguatan moderasi beragama juga perlu dikembangkan ke kelompok strategis lainnya seperti pada diaspora Indonesia dan Gen-Z. Diaspora Indonesia adalah masyarakat dan mahasiswa Indonesia yang tinggal di luar negeri. Penguatan Moderasi Beragama bagi diaspora tersebut dibutuhkan agar mereka tetap memiliki kosmopolitanisme sekaligus nasionalisme. Selain itu, mereka juga dapat berperan menjadi agen atau duta dalam Desiminasi Moderasi Beragama pada masyarakat dunia.

Sementara itu, gen-Z juga perlu menjadi perhatian dalam penguatan Moderasi Beragama. Saat ini, pendekatan terhadap gen-Z belum banyak dilakukan. Berdasarkan Survey BPS tahun 2020, Generasi Z yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 mendominasi dengan jumlah sekitar 74,93 juta jiwa, atau 27,94% populasi. Generasi ini masih berada dalam usia muda hingga remaja awal. Dominasi ini memberikan harapan akan potensi kemajuan dan perubahan di masa depan.

Sosialisasi gagasan dan narasi moderasi beragama perlu dilakukan bagi sebanyak mungkin khalayak, hal ini dilakukan untuk membangun kesadaran bersama masyarakat Indonesia atas pentingnya memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku beragama jalan tengah. Berbagai bentuk sosialisasi ini diarahkan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan moderasi beragama, mengapa perlu Moderasi Beragama, serta bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penguatan Moderasi Beragama mendapat tempat strategis dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, karena menjadi salah satu Program Prioritas (PP). Ini berarti bahwa Moderasi Beragama menjadi program prioritas yang secara struktural dan sistematis akan diselenggarakan oleh Pemerintah.

Namun demikian, penguatan moderasi beragama tidak cukup diupayakan secara struktural melalui kebijakan negara, melainkan yang juga sangat penting dan niscaya mengakar adalah dengan menjadikannya sebagai gerakan kultural masyarakat. Indonesia ini negara besar dan beragam; keragaman dan keutuhannya tidak mungkin dirawat oleh satu dua pihak saja. Moderasi Beragama harus menjadi milik kita bersama. ■

BEBERAPA STRATEGI DAN INOVASI YANG HARUS DIWUJUKAN ANTARA LAIN:

1 Pengembangan infrastruktur penguatan Moderasi Beragama di K/L, dilakukan melalui: a) pembentukan tim harian sekretariat bersama, b) penyelarasan konsep dan kerangka kerja, dan c) penguatan dukungan kebijakan dan anggaran di tingkat pusat sampai pemerintah daerah.

2 Penguatan perspektif Moderasi Beragama penyelenggara negara dan lembaga Keagamaan, dilakukan melalui: a) penyusunan rencana kerja tahunan, b) pelibatan penyelenggara negara, c) pelibatan kunci kelompok strategis, dan d) sinergi dan sinkronisasi regulasi.

3 Pengarusutamaan perspektif Moderasi Beragama kehidupan keberagamaan Indonesia, dilakukan melalui: a) implementasi kebijakan dan program di KL b) peningkatan pelibatan tokoh politik, tokoh publik dan organisasi berpengaruh, c) kebijakan afirmasi, dan d) pelibatan media dalam program penguatan Moderasi Beragama.

4 Peneguhan kerukunan umat beragama dan kehidupan keberagamaan berperspektif Moderasi Beragama, dilakukan melalui: a) pengukuran Indeks KUB, Indeks Kesalehan Umat dan Beragama, dan Indeks Penerimaan Umat Beragama atas keragaman budaya, b) rekognisi dan afirmasi kepada pelaku Moderasi Beragama, c) tercapainya target rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran, d) peneguhan Kurikulum Moderasi Beragama menjadi perspektif utama dalam dunia pendidikan, dan e) pelibatan insan media masa menjadi agen penguatan Moderasi Beragama.

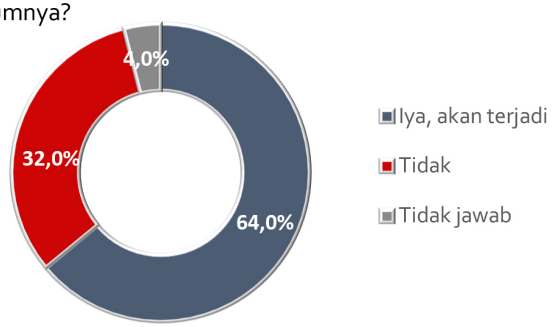
2. Meneguhkan Politik Kebangsaan

Pelaksanaan ajaran agama dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa negara wajib menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan. Dalam pengamalan ajaran agama dan kepatuhan terhadap pemerintah dan negara didalamnya diperlukan penguatan relasi agama dan negara. Penguatan relasi agama dan negara dilakukan untuk menghadirkan negara sebagai rumah bersama yang adil dan ramah bagi warga bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai, dan makmur, salah satunya melalui partisipasi umat beragama dalam politik dengan menjadikan nilai agama bukan untuk kepentingan politik praktis.

Tahun 2024 merupakan tahun politik sebuah hajatan politik terbesar akan dihelat, yakni Pemilu 2024. Berkaca pada proses dan dampak dari Pemilu 2019, kita merasakan kentalnya polarisasi di kalangan masyarakat dan umat beragama yang residunya masih dirasakan hingga saat ini. Bahkan Bawaslu Pusat telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu 2024, di mana salah satu isu utamanya terkait dengan polarisasi dan segregasi yang tejadi di dalam masyarakat akibat dari dukungan politik.

Salah satu penyebab utama begitu kuatnya polarisasi masyarakat pada pemilu 2019 adalah maraknya penyalahgunaan agama (baik berupa ajaran, simbol, bahkan aktor-aktor keagamaan) untuk kepentingan politik kekuasaan. Penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik ini seringkali disebut sebagai "Politisasi Agama".

Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah politisasi agama dalam Pemilu 2024 mendatang akan terjadi lagi seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya?



Sumber: Laporan Survei Nasional persepsi publik terhadap tantangan Politisasi agama jelang tahun politik 2024: Potret fenomena dan antisipasi, Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan bekerjasama dengan Arus Survei Indonesia, 2023.

Temuan hasil survei nasional yang diselenggarakan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagmaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, periode 24-29 Juli 2023 sebanyak 64,0% responden masyarakat menyatakan politisasi agama akan terjadi dalam pemilu 2024.

Adapun terkait tempat yang sering menjadi lahan subur aktivitas politisasi agama adalah majelis taklim/pengajian (25,1%), kemudian organisasi kemasyarakatan (23,5%), rumah ibadah (21,8%), tempat kampanye politik (12,2%), dan lembaga pendidikan (4,5%).

Menurut temuan survei tersebut, lembaga yang paling efektif dalam mencegah dan mengatasi terjadinya politisasi agama dalam pemilu adalah Kementerian Agama (33,9%), disusul Kementerian Komunikasi dan Informatika (16,7%), organisasi masyarakat (14,9%), penyelenggara pemilu (13,4%), dan penegak hukum (11,1%).

Kementerian Agama dan jajarannya dibawah serta ormas keagamaan dan majelis agama perlu terus menghimbau dan memberikan penyuluhan agar agama tidak dijadikan kepentingan politik dan politisasi agama.

Kementerian Agama dan jajarannya dibawah serta ormas keagamaan dan majelis agama perlu terus menghimbau dan memberikan penyuluhan agar agama tidak dijadikan kepentingan politik dan politisasi agama. Politik sebagai bagian dari pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, perlu diarahkan kepada tujuan untuk memajukan bangsa dan negara, sehingga politik yang dikembangkan bersifat kebangsaan.

Politik kebangsaan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan nasional. Politik kebangsaan bersifat jangka panjang dan menjangkau jauh ke depan. Sebaliknya politik kekuasaan mengutamakan kepentingan kelompoknya seperti kepentingan partai politik. Politik kekuasaan sifatnya jangka pendek untuk meraih kekuasaan.

Dengan logika tersebut, pemilu sebagai mekanisme bawaan yang inheren dalam demokrasi, merupakan mekanisme yang telah disepakati bersama. Pemilu merupakan upaya melakukan pergiliran kekuasaan agar ia tidak menjadi monopoli satu pihak atau satu kelompok politik semata. Ia juga menjadi ruang agar koreksi selalu terjadi sehingga penggunaan kekuasaan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Oleh karenanya penguatan moderasi beragama pada tahun kontestasi politik elektoral tahun ini menjadi sangat penting dan strategis. Kementerian Agama telah dan terus menghimbau para dai dan daiyah yang terlibat politik tidak menggunakan agama untuk kepentingan elektoral terkait dengan pemilu 2024, termasuk tidak menggunakan isu agama untuk jadi alat mendapatkan suara atau elektoral. Di sisi lain, bagi dai atau daiyah yang tidak terlibat dengan politik praktis dan memilih bersikap netral, ada baiknya tetap membumikan toleransi di tengah masyarakat.

Dengan demikin keberhasilan penguatan Moderasi Beragama sangat ditentukan juga oleh praktik politik kekuasaan dan kebangsaan, di mana populisme politik dan agama sering menjadi konsumsi politik dan beririsan dengan isu agama. ■



3. Memenangkan Pertarungan Digital

Menjelang akhir tahun 2023, Kementerian Agama kembali meraih penghargaan keren tingkat nasional. Kementerian bermotto "Ikhlas Beramal" ini mendapat penghargaan sebagai "*Best Digital Innovation*" (Inovasi Digital Terbaik) dalam Anugerah Times Indonesia (ATI) 2023.

Kemenag dinilai berhasil menjadi instansi yang mampu menghadirkan inovasi digital melalui "*Pusaka SuperApss*" sebagai aplikasi yang mengintegrasikan beragam layanan keagamaan. Aplikasi ini dapat memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat.

Aplikasi *Pusaka SuperApps* hadir untuk mendekatkan layanan Kemenag dan menjangkau umat. Dengan aplikasi ini, pelayanan Kemenag tak terikat waktu dan tempat sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik kapan pun dan di mana pun. *Pusaka SuperApps* merupakan langkah terintegrasi yang menyatukan beragam layanan Kemenag dalam satu *platform*.

Aplikasi *Pusaka SuperApps* hadir untuk mendekatkan layanan Kemenag dan menjangkau umat. Dengan aplikasi ini, pelayanan Kemenag tak terikat waktu dan tempat sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik kapan pun dan di mana pun.

Digitalisasi layanan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang ibadah, pendidikan agama, data keagamaan, dan layanan halal. Singkat kata, *Pusaka SuperApps* menjadi tonggak penting dalam transformasi digital Kemenag.

Penghargaan ATI 2023 ini juga menjadi pemicu bagi Kemenag untuk terus berinovasi lebih baik lagi dibanding sebelumnya dalam melayani masyarakat, khususnya pada layanan keagamaan.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas secara tegas menyampaikan bahwa transformasi digital di Kemenag telah mendapat pengakuan luar biasa. Pengakuan itu datang tak hanya dari masyarakat dan pengguna. Akan tetapi, juga dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk rekan sesama menteri di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo.



Transformasi Digital menjadi komitmen Gus Yaqut sejak dilantik sebagai Menteri Agama oleh Presiden Jokowi pada akhir 2020 silam. Gus Men, sapaan akrabnya, saat itu berkomitmen untuk melakukan perbaikan terhadap tata kelola Kemenag. Salah satunya melalui program prioritas transformasi digital.

Prestasi tersebut memperoleh atensi dan apresiasi tinggi dari publik termasuk kementerian-kementerian lain yang fokus pada bidang transformasi digital. Dampak dari prestasi itu antara lain penyesuaian anggaran yang harus dikelola dengan baik sesuai arah program prioritas yang telah ditetapkan. Penyelesaian program prioritas dan penerapan *legacy* di periode ini merupakan tanggung jawab bersama untuk menjamin kesuksesan transformasi digital Kemenang.

Sebagai informasi, ATI 2023 diinisiasi oleh Media Times Indonesia untuk kali ketujuh. Penghargaan tersebut diberikan kepada tokoh atau instansi yang telah menjadi pionir inovasi, sumber inspirasi, dan pembawa semangat positif dalam perjalanan bangsa. ATI 2023 mengusung tema "*Inovasi dan Inspirasi Indonesia*". Tema tersebut mencerminkan semangat untuk mengakui dan merayakan prestasi dalam menghasilkan ide-ide baru, menciptakan solusi kreatif, dan memberikan inspirasi positif kepada publik. Acara ini menjadi wadah untuk memberikan apresiasi kepada para pemimpin di berbagai bidang yang telah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan dan perkembangan Indonesia.

Setelah mendapatkan anugerah tersebut, Kemenag di awal tahun 2024 ini semakin bersemangat dalam memperluas dan mempermudah jaringan akses ke Pusaka SuperApps. Semangat membara ini setidaknya terpotret dalam *Outlook* Kementerian Agama 2024 yang mengusung tema Semakin Digital, Kian Menjangkau Umat.

Semakin digitalnya Kemenang sejalan dengan perkembangan positif yang telah dicapai dalam transformasi digital. Dengan semakin digital, harapan Kemenag untuk memenangkan pertarungan digital tentu bukan impian semata. Akan tetapi, merupakan cita yang patut didukung dan layak diwujudkan. ■



4. Menyajikan Layanan Keagamaan yang Premium Tapi Terjangkau

Kementerian Agama sebagai *leading sector* pembangunan bidang agama secara konsisten berusaha meningkatkan kualitas dan kapasitas di berbagai sektor pelayanan keagamaan. Dalam berbagai kesempatan Menteri Agama menegaskan agar seluruh jajaran Kementerian Agama, Pusat dan Daerah, agar senantiasa meneguhkan niatnya dalam rangka memberikan pelayanan publik terbaik.

Untuk mencapai layanan publik yang prima tersebut Menteri Agama juga menekankan perlunya menerapkan semangat dan paradigma baru dalam mengelola sistem layanan. Prinsip Ikhlas beramal yang tertuang dalam logo Kementerian Agama jelas mengisyaratkan semangat pengabdian yang tinggi untuk terus melayani kepentingan umat dan bangsa ini sebaik mungkin.

Berbagai langkah progresif Kementerian Agama dalam aspek pelayanan keagamaan juga didorong oleh Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu agenda Nasional yang menjadi prioritas utama adalah perbaikan sistem pelayanan publik dimana setiap Kementerian/Lembaga harus mampu memenuhi ekspektasi publik.

Kebijakan tersebut sejalan dengan makin tingginya dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga berdampak terhadap makin tidak sederhananya tuntutan publik terhadap jenis, kapasitas dan kualitas pelayanan. Bahkan, Presiden menyebutkan tidak ada toleransi bagi Kementerian/Lembaga yang lambat dan berbelit-belit dalam memberikan pelayanan kepada warga negara. Tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif terhadap tuntutan kepuasan publik.

Layanan keagamaan yang premium merupakan layanan atau pengalaman yang disajikan dengan tingkat kualitas dan keistimewaan. Di tahun 2024, layanan premium diarahkan pada beberapa hal. *Pertama*, revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagaimana diketahui, posisi dan peran KUA sangat sentral di bidang pelayanan keagamaan kepada masyarakat. KUA sebagai garda terdepan tingkat Kecamatan yang bersentuhan langsung dengan berbagai kebutuhan pelayanan keagamaan masyarakat yang paling dasar, seperti pencatatan nikah, rujuk, zakat, wakaf, pengembangan keluarga sakinah, pengurusan pembangunan masjid dan sejumlah layanan lainnya.

Kementerian Agama melalui kebijakan Revitalisasi KUA telah menunjukkan hasilnya secara signifikan dari tahun ke tahun. Survei Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2023 tentang layanan KUA menghasilkan Indeks Kepuasan Publik terhadap pelayanan pencatatan perkawinan di KUA sebesar 83,20. Angka tersebut sedikit lebih rendah jika dibanding tahun 2022 yang mencapai 83,28. Capaian indeks tahun 2023 tersebut, telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Agama 2019-2024.

Kedua, revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). Semangat membangun rumah ibadat (masjid/musala) juga terus bertumbuh. Lembaga bentukan Kementerian Agama ini, menurut tugas-fungsinya, melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan sebanyak mungkin pihak dalam penguatan masjid di seluruh

Berbagai langkah progresif Kementerian Agama dalam aspek pelayanan keagamaan juga didorong oleh Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Indonesia. Baik dalam memprofesionalkan pengelolaan masjid, moderasi, serta pemberdayaan masjid. Selain menyejarah dan berjenjang, potensi kolaborasi BKM dengan lembaga filantropi negara maupun swasta, semakin membuka peluang pengembangannya.

Ketiga, peningkatan pelayanan haji. Sebagaimana diketahui pelayanan haji selalu mendapat perhatian publik tanah air yang luar biasa. Kondisi tersebut didorong oleh sejumlah faktor, di samping karena ibadah haji membutuhkan biaya yang besar dan melibatkan banyak pihak, juga karena haji memiliki prestise sosial yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi dengan kuota yang amat sangat terbatas, sehingga daftar antrian keberangkatan Jemaah relatif panjang. Dalam kondisi seperti itu, publik sangat mengharapkan agar Kementerian Agama dapat meningkatkan pelayanan ibadah haji, baik ketika masih di tanah air maupun di Arab Saudi.

Keempat, layanan jaminan produk halal. BPJPH optimis di tahun 2024 akan mampu melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta arahan Presiden Republik Indonesia Ir. H Joko Widodo bahwa Indonesia berpotensi sebagai pusat Industri Halal dunia sekaligus kiblat industri fashion dunia di tahun 2024, dimana tahun ini sebagai batas akhir penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal (17 Oktober 2024) bagi produk makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman serta hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Layanan keagamaan premium tersebut bisa terjangkau oleh masyarakat luas, termasuk para penyandang disabilitas.

Beberapa Rancangan Program Kolaboratif

1 Pelatihan Takmir M P M B
Untuk meningkatkan profesionalitas pengelolaan masjid, penguatan moderasi beragama dan pemberdayaan ekonomi umat, dilakukan Pelatihan MPMB (www.mpmb.website) bagi takmir 1000 masjid besar.

2 Pendataan & *Updating* Data Masjid
Untuk mendapatkan dan/atau memutakhirkan data masjid dan musala di Indonesia, dilakukan pendataan berjenjang-sistemik atas masjid/musala di seluruh wilayah Indonesia—input data dan *updating* via apk. SIMAS (www.simas.kemenag.go.id).

3 Inventarisasi Aset BKM & Advokasinya
Untuk mendapatkan data faktual atas aset-aset yang dimiliki BKM, dilakukan identifikasi dan inventarisasi aset-asetnya di seluruh wilayah Indonesia. Atas aset-aset dimaksud dilakukan advokasi untuk penguasaan dan pemanfaatannya bagi BKM.

"Yang penting adalah fakta ada aset besar BKM yang selama ini tidak terkelola dengan baik."

Yaqut Cholil Qoumas
Menteri Agama RI, dan Pembina BKM Pusat, saat acara Pengukuhan Pengurus BKM Pusat, 3 Mei 2023 di Jakarta



4 Sosialisasi Sertifikat Halal & Pendamping
Untuk meningkatkan edukasi publik terkait produk halal, dapat dilakukan sosialisasi Sertifikasi Halal dan Pendamping PPH (Proses Produk Halal) berbasis ekosistem/jamaah masjid, dan dilakukan di masjid.

5 Pendirian BMT di Masjid
Untuk pemberdayaan jamaah masjid, dilakukan pendirian dan operasionalisasi Baitul Mal wat Tamwil (BMT) berbasis masjid, yang akan melayani jamaah masjid dalam pemenuhan berbagai kebutuhan ekonominya.

6 Digitalisasi Manajemen Masjid
Untuk menciptakan masjid-masjid yang profesional, dikembangkan berbagai aplikasi TI (teknologi informasi) untuk terciptanya akuntabilitas, transparansi dan efektivitas pengelolaan masjid dalam melayani umat/jamaah.

7 Penerapan "Masjid Ramah"
Untuk menciptakan masjid-masjid yang menerapkan prinsip dan indikator 'masjid ramah', dilakukan edukasi dan pendampingan atas masjid-masjid terpilih sebagai *piloting* penerapan Masjid Ramah di 5000 masjid besar kecamatan.

Catatan: Pendanaan kegiatan diupayakan dari optimalisasi dana kemaslahatan BPKH dan potensi filantropi Islam Indonesia (ziswaf)—selain APBN, APBD dan pemanfaatan aset BKM sendiri

Kementerian Agama banyak meluncurkan program yang menyasar para kaum difabel. Kementerian Agama meluncurkan program 'Masjid Ramah', SOP pernikahan bagi penyandang disabilitas, Pedoman Membaca Mushaf Al-Qur'an Isyarat, master mushaf Al-Qur'an Isyarat bagi PDSRW metode kitābah, MTQ kaum disbailitas, layanan video ayat Alkitab bahasa isyarat, kitab suci Dammapadha dengan aksara braille, fasilitasi sertifikasi Halal produk UMKM Difabel, layanan Haji ramah lansia dan difabel, dan website ramah disabilitas. Tahun 2024

Kementerian Agama melalui kebijakan Revitalisasi KUA telah menunjukkan hasilnya secara signifikan dari tahun ke tahun. Survei Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2023 tentang layanan KUA menghasilkan Indeks Kepuasan Publik terhadap pelayanan pencatatan perkawinan di KUA sebesar 83,20. Angka tersebut sedikit lebih rendah jika dibanding tahun 2022 yang mencapai 83,28. Capaian indeks tahun 2023 tersebut, telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Agama 2020-2024.

program model ini bisa ditingkatkan dan direplikasi oleh satuan kerja lainnya di Kementerian Agama.

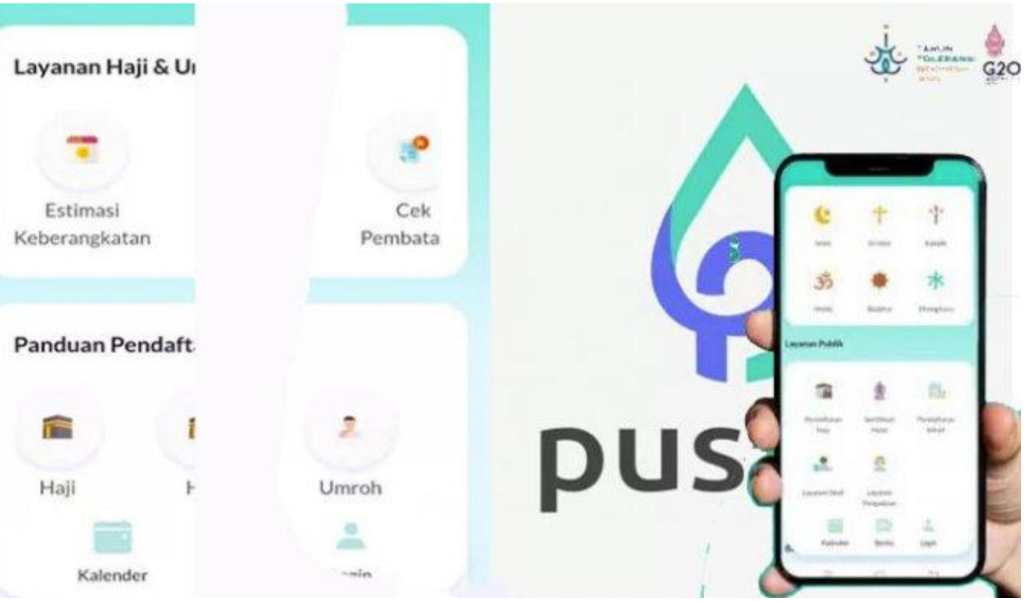
Keterjangkauan layanan keagamaan diwujudkan melalui pengembangan pelayanan keagamaan berbasis digital. Melalui transformasi digital, masyarakat akan mendapat kemudahan dalam akses pelayanan keagamaan, sekaligus biaya yang murah. Mudah, karena layanan dapat diakses melalui *handphone* (*gadget*) di mana dan kapan saja sesuai kebutuhan publik. Sementara murah, karena biaya dapat dipangkas sedemikan rupa.

Strategi untuk merevitalisasi KUA adalah mengubah 'paradigma' bahwa KUA tidak hanya difungsikan untuk layanan pernikahan (umat Islam), tetapi juga dimungkinkan untuk melayani atau memfasilitasi umat lain dalam urusan perkawinan dalam kondisi tertentu.

Peningkatan layanan penyelenggara jaminan produk halal oleh BPJPH memainkan peran di sektor Industri halal domestik dan global. BPJPH terus meningkatkan usaha-usaha keberpihakan pada pelaku UMKM dalam fasilitas sertifikasi halal gratis. Untuk Pelaku usaha menangah besar dengan memperbanyak kuantitas dan profesionalitas Lembaga Pendamping Halal (LPH).

STRATEGI LAYANAN HAJI, MENCAKUP:

1	Penambahan kuota haji sebanyak 20.000 setelah sebelumnya mendapat kuota dasar 221.000 Jemaah.
2	Skema pelunasan cicilan untuk pembayaran Bipih
3	Persyaratan Istitha'ah Kesehatan sebelum pelunasan Bipih
4	Rekrutmen petugas haji secara digital dan terbuka
5	Kesempatan pemberian kuota pendamping lansia di pelunasan tahap ke-2
6	Program haji ramah Lansia di penyelenggaraan haji tahun 2024
7	Pemberian materi latihan fisik dan penggunaan sarana prasarana haji pada saat bimbingan manasik haji
8	Pelayanan *One Gate System* di asrama haji
9	Antisipasi *heart stroke* dan pembinaan jemaah untuk menjaga kondisi kesehatannya dengan meminimalisir kontak langsung dengan sinar matahari
10	Skema tinggal di hotel jemaah haji sekitar Jamarat
11	Melakukan evaluasi terhadap kinerja Syarikah Masyarik dan memilih Syarikah melalui mekanisme *Beauty Contest*
12	Diberikan makan 3x perhari selama tinggal di Saudi dengan cita rasa Indonesia; akomodasi jemaah haji terbatas di 5 lokasi: Syisyah, Raudhah, Jarwal, Misfalah, Rea Bakhsy (kecuali Mahbas Jin)
13	Melakukan pembinaan jemaah terkait pembayaran/pemotongan Dam melalui Bank Arab Saudi/RPH resmi dan sedang dikaji pemotongan dan pendistribusiannya di tanah air



Kementerian Agama berkomitmen dalam mendukung afirmasi layanan keagamaan dan pendidikan kepada kaum difabel. Setidaknya ada empat hal yang dapat mendukung sukesnya layanan keagamaan bagi penyandang disabilitas: 1) Sarana-prasarana yang ramah bagi kaum difabel, 2) Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kecakapan khusus dalam penanganan dan pendampingan penyandandang disabilitas, 3) *Standart Operational Procedur* (SOP) pelayanan bagi difabel, dan 4) Penguatan regulasi layanan bagi penyandang disabilitas. ■

PROGRAM UNTUK PENINGKATAN LAYANAN JAMINAN PRODUK HALAL PADA TAHUN 2024

1	Gerakan Nasional Mandatori Halal (GNMH), melibatkan seluruh *stakeholder*, yang akan menjaring pelaku usaha di 3.000 desa.
2	*Fashion show* untuk promosi kain halal di 5 negara.
3	Asesmen LHLN sebanyak 32 LHLN dari 20 Negara dalam rangka saling pengakuan dan keberterimaan sertifikat halal.
4	Akselerasi Rekognisi Produk Halal Impor
5	Pengawasan JPH terpadu dengan K/L terkait
6	Implementasi sidang fatwa produk halal pada MUI Kab/Kota untuk sertifikasi reguler
7	Percepatan perubahan PP 39 Tahun 2021 dan regulasi turunannya
8	Percepatan sertifikasi jasa penyembelihan, dan
9	Kolaborasi fasilitasi sertifikasi halal di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN.

5. Mengusung Layanan Pendidikan yang Inovatif dan Transformatif

Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Kata "berkualitas" dan "berdaya saing" menjadi suatu harapan program usaha peningkatan pemerataan layanan pendidikan. Implementasinya berupa beragam kegiatan seperti: pemerataan akses dan wajib belajar, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, dan penguatan pendidikan tinggi berkualitas.

Kementerian Agama telah menyelenggarakan beragam jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Masyarakat diberikan layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan dengan ragam jalur dan jenjangnya. Artinya, Kementerian Agama sangat berperan dalam peningkatan pembangunan manusia, dan sekaligus ikut serta dalam pembangunan nasional.

Memasuki tahun 2024, layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama diarahkan pada layanan pendidikan yang inovatif dan transformatif. Bentuk layanan pendidikan ini sebagai kelanjutan dari harapan tahun sebelumnya yang juga memotret pada peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan berdaya saing dengan fokus pada transformasi kelembagaan pendidikan.

Dikatakan layanan pendidikan yang inovatif jika melibatkan penerapan teknologi dan personalisasi pembelajaran. Tentunya, tidak melupakan pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan siswa. Hal ini selaras dengan kebutuhan jaman.

Kementerian Agama telah menerapkan teknologi dalam layanan pendidikannya. Dari 9 (sembilan) fakta transformasi digital Kementerian Agama, terdapat portal *satudata.kemenag.go.id*. Transformasi digital aspek pendidikan ini dalam pengintegrasian serta penyajian data pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Melalui portal *satudata.kemenag.go.id*, Masyarakat dapat menemukan berbagai data yang dibutuhkan. Sebelumnya sudah eksis keberadaan pusat pelayanan guru dan tenaga kependidikan madrasah secara digital melalui SIMPATIKA, dan pengelolaan data pendidikan Islam secara digital melalui EMIS.

Terdapat pembangunan Learning Manajemen Sistem (LMS) pembelajaran pendidikan Agama Buddha untuk memberikan akses pendidikan bagi siswa didik, dan penggunaan aplikasi SIAGA (Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama) sebagai langkah percepatan pendataan guru agama Buddha. Layanan monitoring dan evaluasi secara digital dengan menggunakan aplikasi eMonev Bappenas dan SMART DJA lingkup pendididikan tinggi keagamaan Buddha. Praktik terbaik penerapan teknologi ini bisa dilanjutkan secara masif pada layanan pendidikan Kementerian Agama di tahun 2024.

Di tahun 2024, layanan pendidikan juga diarahkan pada layanan pendidikan yang transformatif. Layanan pendidikan yang transformatif bukan hanya tentang meningkatkan metode pengajaran atau memperkenalkan teknologi

Pendidikan yang inovatif jika melibatkan penerapan teknologi dan personalisasi pembelajaran. Tentunya, tidak melupakan pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan siswa. Hal ini selaras dengan kebutuhan jaman.

baru, tetapi lebih pada mengubah pondasi dan paradigma pendidikan untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan positif.

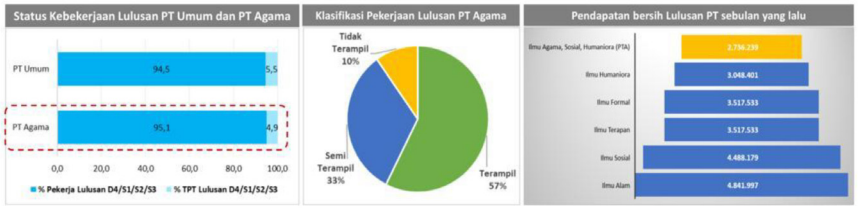
Program kemandirian pesantren yang sudah memasuki tahun keempat, misalnya, dapat dikatakan sebagai bentuk layanan pendidikan berparadigmatik. Dimana pesantren diharapkan bisa berdaya dan memberdayakan baik fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan. Ada dampak ekonomi dari program kemandirian itu. Layanan pendidikan yang berparadigmatik lainnya adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), pengembangan keprofesian berkelanjutan guru dan tenaga kependidikan madrasah, dan kemah Moderasi Beragama.

Di level PTK, berkaitan dengan penguatan relevansi dan peningkatan kebekerjaan. Hasil Sakernas tahun 2020 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka lulusan diploma (8,08 %) dan universitas (7,35%) masih cukup besar. Tahun 2020 hanya sekitar 9,6% (12,3 juta) tenaga kerja berpendidikan S1/S2/S3 dan 2,7% (3,4 juta) yang merupakan lulusan Diploma. Masih terdapat lulusan PT (usia >=25 tahun) yang bekerja pada kategori pekerjaan semi terampil (42%) dan tidak terampil (9 %).



Grafik Status Kebekerjaan, Klasifikasi Pekerjaan, dan Pendapatan Bersih Lulusan PTK menunjukkan tingkat kebekerjaan lulusan PTK cukup tinggi dan tidak jauh berbeda dengan lulusan PT umum. Sebagian besar lulusan PTK bekerja pada kategori "jasa pendidikan". Sekitar 44% lulusan PTK (agama/sosial/humaniora) bekerja pada kategori pekerjaan semi terampil dan tidak terampil. Adapun penghasilan lulusan ilmu agama, sosial, humaniora (PTK) menempati posisi terendah dibandingkan lulusan bidang ilmu lain.

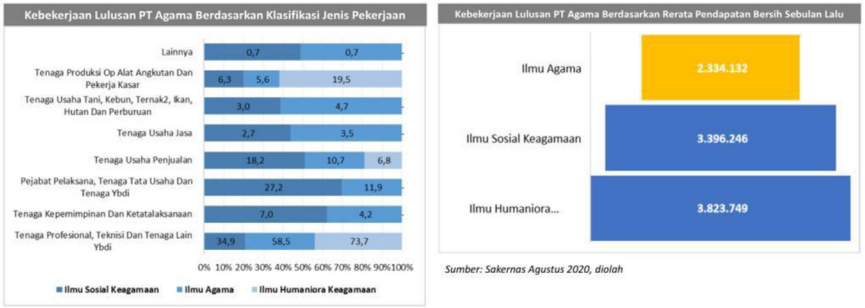
Status Kebekerjaan, Klasifikasi Pekerjaan, dan Pendapatan Bersih Lulusan PTK



Sumber: Kementerian PPN/ BAPPENAS, 2021

Grafik Status Kebekerjaan, Klasifikasi Pekerjaan, dan Pendapatan Bersih Lulusan PTK menunjukkan kategori pekerjaan lulusan ilmu agama, sosial dan humaniora cukup bervariasi dari kategori tenaga profesional/teknisi hingga tenaga produksi dan pekerja kasar. Meskipun hampir 60% lulusan ilmu agama terserap di kategori pekerjaan profesional/teknisi, namun rerata pendapatan bersih lebih rendah dari pekerja lulusan Humaniora dan Sosial Agama.

Kebekerjaan Lulusan PTK Berdasarkan Klasifikasi Jenis Pekerjaan & Rerata Pendapatan Bersih



Sumber: Kementerian PPN/ BAPPENAS, 2021

Dari sisi peluang, di tahun 2024, Kementerian Agama dapat mengoptimalkan penerapan teknologi sebagai bentuk layanan pendidikan yang inovatif pada layanan-layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan kegamaan dengan beragam jalur dan jenjangnya. Dengan adanya praktik baik, pada tahun 2024 pentingnya layanan pendidikan yang transformatif dimana dititiberatkan pada perubahan pondasi dan paradigma pendidikan.

Tantangan layanan pendidikan yang inovatif dan transformatif yang datang dari tren perubahan structural, otonomi pekerja, dan pemberdayaan teknologi. Dari aspek struktural, struktur organisasi, perusahaan, dan tipe pekerjaan baru banyak muncul untuk mengakomodasi manusia dan teknologi yang berubah cepat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, 5 generasi bekerja bersamaan dan meningkatnya kesadaran akan keberagaman di tempat kerja. Pekerjaan dapat dilakukan di mana saja dan dengan waktu yang fleksibel Rasio pekerja tidak tetap meningkat (*freelancer*).

Dari aspek otonomi pekerja yang memiliki kontrol yang lebih besar akan perjalanan kariernya. Sedangkan dari aspek pemberdayaan teknologi menyederhanakan pekerjaan sehari-hari dan menghubungkan pekerja dengan efisien, dan data memberikan pemahaman lebih baik tentang perilaku dan kualitas pekerja.

Tantangan diatas bisa menjadi faktor risiko di tahun 2024 bagi layanan pendidikan inovatif dan transformatif. Jika faktor risiko yang muncul di 2024 tidak ditanggulangi, maka akan menyebabkan harapan Kementerian Agama tentang layanan pendidikan yang inovatif dan transformatif tidak akan tercapai. ■

Strategi dan Inovasi yang Harus Diwujudkan

1) penguatan *platform* pendidikan berbasis teknologi yang berpusat pada siswa, interdisipliner, relevan, berbasis proyek, dan kolaboratif

2) peningkatan kualitas guru dan kepala madrasah dan pendidikan keagamaan: memperbaiki sistem rekrutmen, meningkatkan kualitas pelatihan, penilaian, serta mengembangkan komunitas/platform pembelajaran

3) pembangunan madrasah dan pendidikan keagamaan (lingkungan belajar) masa depan: aman dan inklusif, memanfaatkan teknologi, kolaboratif, kreatif, dan sistem belajar berbasis pengalaman

4) pembentukan pendidikan tinggi keagamaan kelas dunia, diferensiasi misi pendidikan tinggi sebagai pusat-pusat unggulan serta mempererat hubungan dengan industri dan kemitraan global

5) Alih status dan bentuk kelembagaan pendidikan dengan mendirikan satuan pendidikan negeri dan penegerian satuan pendidikan

6. *Smart* ASN Menjawab Kebutuhan Era Digital

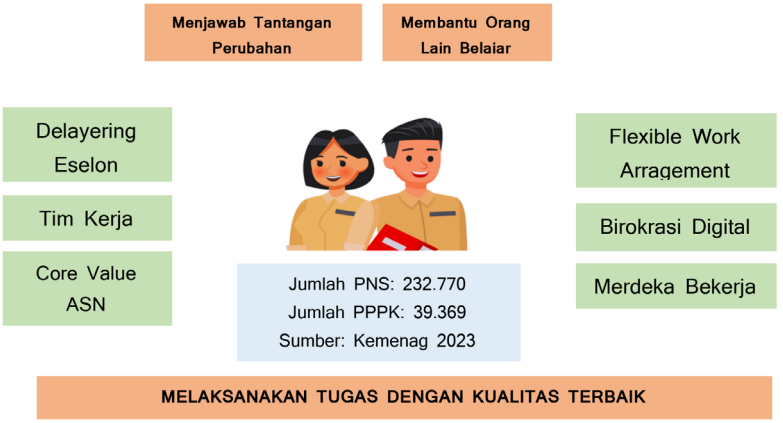
Gambaran futuristik "Indonesia Emas" Tahun 2045 mengilustrasikan pembangunan saat ini, di mana Indonesia diharapkan dapat menjadi negara maju dan bersaing dengan negara-negara digdaya lainnya. Merujuk pada hasil penelitian *World Competitiveness Ranking* 2023 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-34 dari 64 negara di dunia, meningkat signifikan dari peringkat ke-44 pada tahun sebelumnya.

Hal ini tentu patut kita syukuri, namun jika melihat kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia masih jauh dari harapan. Kualitas ASN dan pelayanan publik pemerintah Republik Indonesia masih berada di peringkat 73 dari 214 negara dalam *Government Effectiveness Index* 2021, dengan nilai 65,3. Hal ini menunjukan betapa pentingnya pengembangan kompetensi ASN untuk peningkatan kinerja organisasi terutama Kementerian Agama.

Dinamika Lingkungan Strategis



Jika sebelumnya kita ramai memperbincangkan tentang era VUCA yang merupakan akronim dari *volatility* (volatilitas), *uncertainty* (ketidakpastian), *complexity* (kompleksitas), *ambiguity* (ambiguitas). Namun kondisi tersebut (VUCA) saat ini telah berubah menjadi TUNA (*turbulency*, *uncertainty*, *novelty*, *ambiguity*) dan BANI (*Brittle*, *Anxiety*, *Non-Linear*, dan *Incomprehensible*). Artuso dan Guijt (2020) menyatakan pendapatnya bahwa perkembangan teknologi yang sangat cepat akan mengubah cara kerja, mendorong berkembangnya model *agile organization* (adaptif, cepat dan inovatif). Untuk itu, para pekerja tidak hanya dituntut untuk menguasai pengetahuan atau kompetensi sesuai dengan bidangnya, namun juga menjadi pembelajar sesuai dengan tuntutan perubahan.



Sumber: Buku Statistik ASN 2023 Semester I

Merujuk pada konsep "resilient" pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang menekankan pada kemampuan individu dan kelompok dalam organisasi untuk beradaptasi dan pulih dari stres, tekanan, atau perubahan yang terjadi. Keterampilan dan sifat yang mencerminkan keberdayaan sumber daya manusia ini memainkan peran penting dalam memastikan organisasi dapat mengatasi tantangan dan mempertahankan kinerja yang tinggi.

Apabila pengembangan kompetensi selama ini dianggap sebagai hak ASN yang harus dipenuhi oleh organisasi melalui penugasan mengikuti pelatihan dan sejenisnya, pola pikir belajar seorang ASN akan "terbelenggu", dan ASN tersebut cenderung menunggu serta menuntut program pengembangan kompetensi yang direncanakan, dirancang secara terstruktur sebagai bagian dari strategi pengembangan organisasi. Namun, apabila pikiran ASN melihat belajar sebagai bagian dalam pelaksanaan tugas, pengembangan diri dan pengembangan ASN akan secara alami terjadi seiring dengan dinamika tuntutan pekerjaan ASN. Oleh karena itu, ASN perlu diberi ruang untuk menentukan kebutuhan dan metode belajarnya sendiri (belajar secara mandiri).

ASN harus diberi kemandirian dalam belajar, Merdeka Belajar ASN yang dijalankan dapat menambah sumber pengetahuan dan fleksibilitas ASN dalam belajar. Autonomi belajar ASN adalah alat yang membantu ASN untuk mewujukan sikap professional dan tangguh terutama dalam menghadapi era VUCA, BANI, dan industri 5.0 yang penuh dengan ketidakpastian dan kompleksitas serta tuntutan transformasi birokrasi pemerintahan dalam peningkatan pelayanan kepada *public*.



Dalam *Buku Saku ASN Merdeka Belajar* yang telah dikembangkan LAN RI tahun 2023, terdapat beberapa bentuk kemerdekaan ASN dalam Merdeka Belajar yakni:

Pembelajaran kelas
- membuka ruang diskusi & perdebatan,memberikan berbagai pilihan belajar, menghargai ide/pemikiran baru

MOOC (Massive Online Open Course)
- Memilih kapan dan dimana akan belajar (Materi sudah tersedia)

Virtual Market Pengembangan Kompetensi
- Mewujudkan market pengembangan kompetensi secara virtual (ASN dapat memilih materi & bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan.)

Individual Learning Budget
- Memberikan kepercayaan kepada individu ASN utk mengelola anggaran bangkom (learning wallet)

Transformasi digital merupakan proses pembelajaran guna mewujudkan ASN Merdeka Belajar. Kemampuan ASN menguasai keterampilan yang relevan, mengubah sikap untuk mendukung perubahan, dan melakukan perubahan yang diperlukan, adalah syarat bagi ASN dapat berperan penting dalam pembangunan bidang agama masyarakat 5.0. Keterampilan ASN dalam hal teknologi dan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dapat membantu memajukan bidang agama dan memenuhi tuntutan masyarakat yang beragam.

Kementerian Agama sepanjang tahun 2022-2023 terus menggiatkan pelaksanaan pengembangan kompetensi dengan *Massive Open Online Course* (MOOC) Pusat Informasi Pelatihan dan Pembelajaran (Pintar). Dengan adanya MOOC Pintar dan *Digital Smart class*, Kementerian Agama semakin maju dalam memanfaatkan teknologi untuk penguatan kompetensi ASN dan pelayanan yang lebih efisien.

Selain pengembangan instrumen-instrumen pendukung ASN Merdeka Belajar, hal yang patut menjadi perhatian adalah rekognisi dan evaluasi atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa kunci sukses penerapan ASN Merdeka Belajar dapat dilihat dari 3 Aspek, dan yang paling utama adalah komitmen pimpinan. ■

TIGA ASPEK PENDUKUNG KUNCI SUKSES PENERAPAN ASN MERDEKA BELAJAR

1. Kejelasan Target (*User Expectation* atasan dan karir pegawai)
2. Kemauan ASN Belajar dan Berbagi, dimana menekankan bahwa belajar adalah kebutuhan dan tanggung jawab ASN serta meyakinkan ASN bahwa dirinya adalah tempat belajar bagi ASN lainnya
3. Organisasi mendorong terbukanya akses belajar, melalui ekosistem kerja, *market* pengembangan kompetensi, dan *budget* atau penganggaran dalam pengembangan kompetensi

7. Mengoptimalkan Dana Umat untuk Pengentasan dan Pemberdayaan

Sebagai kementerian yang memiliki tugas dan fungsi keagamaan, Kementerian Agama memang tidak secara langsung berhubungan dengan persoalan pengentasan kemiskinan. Namun, dengan potensi dana sosial keagamaan yang dikelola Ormas Keagamaan, Kemenag bisa mengambil peran dalam persoalan pengentasan kemiskinan.

Konsep dana sosial keagamaan sebenarnya sudah ada di enam agama. Dalam Islam dikenal dengan istilah zakat, wakaf, infak dan sedekah. Dalam Kristen dan Katholik dikenal dengan istilah "dana persepuluhan". Dalam Hindu dikenal dengan istilah "dana punia". Dalam Buddha dikenal dengan istilah "dana paramita". Dalam Konghucu dikenal dengan istilah "dana kebajikan". Pada prakteknya, dana sosial keagamaan tersebut dikelola oleh Ormas Keagamaan di masing-masing agama tersebut.

Bagi agama Islam, pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah diorganisir oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), sedangkan pengelolaan dana wakaf diorganisir oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Menurut laporan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, potensi zakat di Indonesia sangat besar, tercatat ada kurang lebih 10,7 juta mustahik di Indonesia dengan potensi zakat mencapai Rp327 triliun pertahun. Angka potensial ini masih sangat mungkin ditingkatkan mengingat sudah ada 512 Badan Amil Zakat (BAZ), 49.132 Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan 145 Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dalam Rancangan Teknokratik Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, disebutkan, bahwa sasaran program pembangunan pengembangan dana sosial keagamaan dan filantropi adalah terwujudnya pengembangan dana sosial keagamaan dan filantropi, pemberdayaan umat beragama, dan peningkatan produktivitas, dengan Indikator: 1) Persentase realisasi penyaluran terhadap potensi dana sosial keagamaan pada pengentasan kemiskinan, 2) Lembaga Filantopi Keagamaan yang terakreditasi (Baik/A).



Dengan potensi dana sosial keagamaan yang dikelola Ormas Keagamaan, Kemenag bisa mengambil peran dalam persoalan pengentasan kemiskinan.

Strategi dan Inovasi yang Harus Diwujudkan

Pertama, pemberdayaan dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan, pendayagunaannya lebih difokuskan pada tiga (3) hal, yaitu: Pertama, mewujudkan mukmin yang kuat iman dan ekonomi; Kedua, penguatan intelektual; dan ketiga, penguatan teknologi. Dalam hal ini, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai persoalan ekonomi, namun juga terkait akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan lainnya.

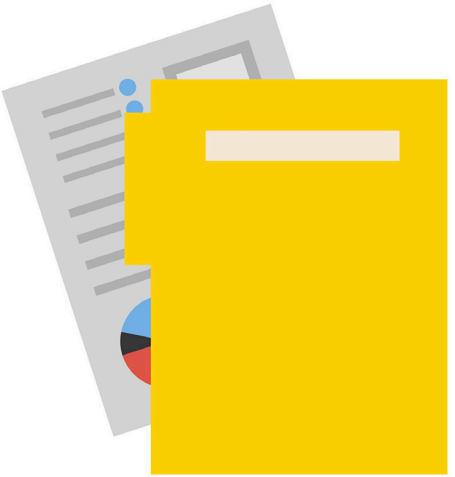
Kedua, pemetaan perlu dilakukan agar tergambarkan potensi dana sosial keagamaan di masing-masing daerah, baik donaturnya (muzakki, waqif, dan sejenisnya) maupun penerimanya (mustahiq dengan berbagai kategorinya). Pemetaan dilakukan agar penyaluran dana sosial keagamaan tepat sasaran. Jangan sampai ada mustahiq yang overlapping dalam menerima bantuan.

Ketiga, penguatan lembaga dana sosial keagamaan dengan sistem akreditasi diperlukan guna membangun kepercayan (trust) pada masyarakat. Bagaimanapun, pengelolaan dana sosial keagamaan harus transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan terstandar secara global.

Program pembangunan tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) program prioritas yaitu: 1) Edukasi (kesadaran) akan dana sosial keagamaan produktif; 2) Publikasi program dana sosial keagamaan produktif; 3) Akreditasi Lembaga Filantropi Keagamaan (Baznas, BWI, LAZ, BAKKAT, dst); 4) Integrasi basis data pengumpulan dan penyaluran dana sosial keagamaan; 5) Tanggap bencana berbasis dana sosial keagamaan; 6) Pengentasan kemiskinan melalui dana sosial keagamaan produktif.

Lima program prioritas terkait dana sosial keagamaan ini merupakan pekerjaan rumah (preskripsi) Kementerian Agama ke depan. Dana sosial keagaman akan menjadi bagian strategis yang tidak hanya membantu negara secara langsung tapi juga dirasakan oleh masyarakat, terutama untuk pengentasan kemiskinan. ■

LAMPIRAN



Rencana Aksi Nasional *Outlook* Kementerian Agama 2024

NO	TUJUH PROGRAM PRIORITAS	PROYEKSI/PRESKRIPSI (2024)	STRATEGI PENCAPAIAN	RENCANA AKSI NASIONAL	PENANGGUNG JAWAB
1	**Ekosistem Moderasi Beragama yang Ekspansif**	• Gejala transnasionalisme yang menumbuhkan kelompok ekstrem beragama dan kapitalisme global yang melemahkan nilai-nilai agama. Persaingan hegemoni melalui komodifikasi agama menjadi tantangan tersendiri. Meski sedang tidur dalam menghadapi Pemilu 2024, politik identitas berbasis agama tetap muncul di tahun 2024. • Tantangan dari era disrupsi inovasi yang masih cenderung menyingkirkan otoritas keagamaan dan menyuburkan gejala "umat digital" dan "*urban religiosity*". • Ekspansi ekosistem moderasi beragama (MB) kepada kalangan penegak hukum, TNI/Polri, dan Partai Politik mulai dari unsur pimpinan, para kader, dan calon anggota legislatif. • Masyarakat sipil seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan kepercayaan, budayawan, organisasi berbasis agama, pengelola rumah ibadat, organisasi kemasyarakatan, keluarga, perempuan, budayawan, seniman, dan anak muda juga turut peran serta dalam gerakan dan menanamkan nilai-nilai moderat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. • Indonesia berpeluangan tampil sebagai negara-bangsa teladan bagi dunia yang mampu mengelola kemajemukan. Kebijakan MB telah menjadi modal dasar sosial pembangunan untuk mewujudkan cita-cita negara. • Indonesia memiliki potensi dan berkesempatan mempercepat pemenuhan SDGs karena masyarakat mendukung penguatan MB dalam	o Mengarusutamakan penguatan MB yang diawali dari ASN di pemerintahan pusat dan daerah, BUMN, dan BUMD melaui program orientasi agar memiliki perspektif moderat dalam pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. o Penanaman nilai-nilai MB pada dunia pendidikan terutama pada peserta didik, pendidikan, dan tenaga kependidikan. Lembaga pendidikan tidak hanya bertanggung jawab agar peserta didik menjadi orang-orang yang cerdas, tetapi juga bertanggung jawab untuk memberdayakan peserta didik agar memiliki nilai-nilai moral dan keagamaan yang moderat. o Penguatan MB terhadap unsur K/L yang menjadi garda terdepan dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKR, memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi jaminan dan perlindungan hal sipil warga, serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Repuplik Indonesia (Polri), Hakim, Jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya. o Pemanfaatan media sosial sebagai ekosistem MB, pendayagunaan media sosial dalam pengayaan literasi MB bagi masyarakat untuk pembentuk nilai-nilai kolektif yang kontributif bagi pembangunan nasional, juga pemberdayaan komunitas media sosial dalam mengurangi sentimen kebencian, intoleransi, sikap ekslusif, dan ekstrimisme.	■ Pengembangan infrastruktur penguatan MB di K/L melalui: (a) pembentukan tim harian sekretariat bersama; (b) penyelarasan konsep dan kerangka kerja, dan; (c) penguatan dukungan kebijakan dan anggaran di tingkat pusat sampai pemerintah daerah. ■ Penguatan perspektif MB penyelenggara negara dan lembaga keagamaan melalui: (a) penyusunan rencana kerja tahunan; (b) pelibatan penyelenggara negara; (c) pelibatan kunci kelompok strategis; (c) sinergi dan sinkronisasi regulasi. ■ Pengarusutamaan perspektif MB dalam kehidupan keberagamaan melalui: (a) implementasi kebijakan dan program di K/L; (b) peningkatan pelibatan tokoh politik, tokoh publik dan organisasi berpengaruh; (c) kebijakan afirmasi, dan; (d) pelibatan media dalam program penguatan moderasi beragama. ■ Peneguhan KUB berperspektif MB melalui pengembangan: (a) pengukuran Indeks KUB, Indeks Kesalehan Umat dan Beragama, dan Indeks Penerimaan Umat Beragama atas Keragaman Budaya; (b) rekognisi dan afirmasi kepada pelaku moderasi beragama; (c) tercapainya target rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran; (d) peneguhan kurikulum moderasi beragama menjadi perspektif utama dalam dunia pendidikan; (e) pelibatan insan media masa menjadi agen penguatan moderasi beragama. ■ Akselerasi program pelatihan master training, instruktur, fasilitator, dan	Pelaksanan: Badan Litbang dan Diklat: Biro Kepegawaian, Setjen (Biro HDI, Biro Ortala), PKUB dan FKUB Provinsi dan Kab./ Kota, Bimas-Bimas Agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Pusbimdik Khonghucu), Ditjen Pendis, BPJPH, Itjen, Kanwil Kemenag, dan PTKN. Mitra Kerja: Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Pemuda dan Olahraga; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kementerian Sosial; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian

NO	TUJUH PROGRAM PRIORITAS	PROYEKSI/PRESKRIPSI (2024)	STRATEGI PENCAPAIAN	RENCANA AKSI NASIONAL	PENANGGUNG JAWAB
		mewujudkan kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun dan damai.	o Penguatan peran dan kapasitas tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, budayawan, organisasi berbasis agama, pengelola rumah ibadah, ormas sipil, keluarga, perempuan, dan anak muda yang merupakan ekosistem utama dalam MB. o Penguatan MB terhadap partai politik mulai dari unsur pimpinan, para kader, dan calon anggota legislatif sehingga menjadikan nilai-nilai keberagamaan yang moderat sebagai basis dalam menjalankan peran berpolitik, serta penguatan praktik politik bermartabat dan nir-SARA dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. o Penguatan Moderasi Beragama diperlukan bagi para pelaku usaha, sehingga akan dapat mendorong pengembangan dunia bisnis ke arah pengembangan ekonomi yang inklusif, adil, dan tidak diskriminatif. o 6) Sinkronisasi dan koordinasi yang lebih optimum, baik antara satuan kerja (internal) Memenag maupun K/L untuk kerja "maraton" mewujudkan Sekber Penguatan Moderasi Beragama.	penggerak MB; ■ orientasi bagi pelopor MB bagi para pendidik (guru dan dosen) dan tenaga kependidikan (pengawas, pimpinan sekolah/madrasah/perguruan tinggi); TNI dan Polri serta aparat penegak hukum; terutama bagi ASN Kemenag di daerah trategis maupun 3T. ■ Muntaskan penyediaan buku, komik, modul, dan kiat serta yang bersifat cetak (analog) maupun digital (interaktif) dalam implementasi MB untuk seluruh *stakeholder* yang bersentuhan dengan pembangunan bidang pendidikan agama dan layanan keagamaan. ■ - Akselerasi dan finalisasi Draf Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Sekretariat Bersama PMB, sebagai tindak lanjut amanat Perpres Nomor 58 Tahun 2023.	Ketenagakerjaan; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Jaksa Agung RI; dan Mejelis-Majelis Agama.
2	**Meneguhkan Politik Kebangsaan**	• Tahun 2024 merupakan tahun politik sebuah hajatan politik terbesar akan dihelat, yakni Pemilu 2024. Pemilu 2019 masih dirasakan dampak dan residunya pada polarisasi di kalangan masyarakat dan umat beragama. Bawaslu Pusat telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu 2024, salah satu isu utamanya terkait dengan polarisasi dan segregasi yang tejadi di dalam masyarakat akibat dari dukungan politik. • Penyebab utama begitu kuatnya polarisasi masyarakat pada pemilu 2019 adalah maraknya penyalahgunaan agama (baik berupa ajaran, simbol, bahkan aktoraktor	o Kementerian Agama beserta jajarannya di bawah, ormas keagamaan, dan majelis-majelis agama mesti terus konsisten memberikan 'pencerahan' dan penyuluhan agar agama tidak dijadikan kepentingan politik dan politisasi agama. o Melakukan inovasi dan pengembangan program-program di bidang layanan dan pendidikan agama yang dapat dijadikan inspirasi dan solusi dalam upaya meneguhkan nilai moral dan spiritual bersama yang berbasis kearifan lokal, juga merekatkan dan mempersatukan umat	■ Penguatan kapasitas FKUB dalam penanganan konflik (politik), sengketa, penyelesaikan konflik non litigasi. ■ Menuntaskan review/evaluasi/revisi terkait PBM 9 dan 8 Tahun 2006 serta meningkatkan statusnya menjadi Perpres. ■ Menjadikan rumah ibadah, pusat-pusat dan lembaga pendidikan serta lembaga sosial keagamaan, juga forum dan hari-hari besar keagamaan sebagai pusat pendidikan moderasi beragama umat. ■ - Mengoptimalkan seluruh satker Kementerian Agama yang memiliki fungsi layanan publik sebagai wadah	Pelaksana: PKUB Badan Litbang dan Diklat, Ditjen Bimas-Bimas (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Pusbimdik Khonghucu), dan PTKN. Mitra Kerja: Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi; Kementerian Komunikasi dan

NO	TUJUH PROGRAM PRIORITAS	PROYEKSI/PRESKRIPSI (2024)	STRATEGI PENCAPAIAN	RENCANA AKSI NASIONAL	PENANGGUNG JAWAB
		keagamaan) untuk kepentingan politik kekuasaan. Penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik ini seringkali disebut sebagai "Politisasi Agama". • Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama bahkan melakukan survei pada periode 24-29 Juli 2023, temuannya: 64,0% responden masyarakat menyatakan politisasi agama masih terjadi pada pemilu 2024. Tempat yang sering menjadi lahan subur aktivitas politisasi agama adalah majelis taklim/pengajian (25,1%), organisas kemasyarakatan (23,5%), rumah ibadah (21,8%), tempat kampanye politik (12,2%), dan lembaga pendidikan (4,5%).	sehingga mampu menjadi "rujukan' dunia dalam pengelolaan politik kebangsaan sebagai paradigma. o Seluruh satker Kementerian Agama pusat dan daerah juga terus menghimbau para dai dan daiah tidak terlibat politik praktis, tidak menggunakan (isu) sebagai alat mendapatkan suara pemilih, mengutamakan bersikap netral, dan tetap membumikan toleransi di tengah masyarakat. Untuk itu, seluruh satker Kementerian Agama perlu mengagendakan program edukasi politik kebangsaan dalam kaitannya dengan pengamalan nilai-nilai agama yang moderat.	komunikasi, sosialisasi, edukasi, dan penyebarluasan politik kebangsaan yang berbasis nilai dan norma keagamaan, terutama melalui berbagai *platform* media sosial seperti: *Social Networking* (Facebook, Twitter, dan LinkedIn), *Media Sharing Networks* (Instagram, YouTube, Snapchat, dan TikTok); *Discussion Forums* (Quara, Reddit, dan Kaskus), *Social Blogging Networks* (Tumblr dan Medium), *Social Audio Networks* (Clubhouse dan Twitter Space), *Live Steam Social Media* (Twitch dan Youtube), *Review Networks* (Yelp dan Glassdoor).	Informatika; BRIN, dan; Majelis Agama-Agama.
3	**Memenangkan Pertarungan Digital**	• *Pusaka SuperApps* menjadi tonggak penting dalam transformasi digital Kemenag RI untuk terus berinovasi lebih baik lagi dalam melayani masyarakat, khususnya pada layanan keagamaan. • Kementerian memperoleh atensi dan apresiasi tinggi dari publik termasuk kementerian-kementerian lain yang fokus pada bidang transformasi digital. Dampak dari prestasi itu antara lain penyesuaian anggaran yang harus dikelola dengan baik sesuai arah program prioritas yang telah ditetapkan. • Fenomena penggunaan media sosial untuk menyebarkan sikap antipati serta kebencian berdimensi politik dan agama masih sering kali terjadi di Indonesia belakangan ini. • Jika perhatian pemerintah tidak ditingkatkan, politik di era digital akan menjadi penuh dengan pembiaran rekayasa dan penyebaran kebohongan beserta semua dampaknya. Hal tersebut kontraproduktif bagi	o Menjadikan kebijakan Presiden RI sebagai pijakan, yang menekankan bahwa transformasi digital terpadu sebagai acuan pelayanan pemerintah dan kebutuhan mendesak, berbasis pada kebutuhan pengguna (user-centric), dan bukan terpisah-pisah dengan pendekatan per instansi. o Melakukan akselerasi transformasi digital melalui transformasi struktural BUMN, dalam hal ini Peruri menjadi "GovTech" atau tim pengelola digital pemerintah. Untuk itu, seluruh satker Kemenag perlu melakukan kolaborasi, inovasi, dedikasi, dan melepas ego sektoral sebagai kunci sukses transformasi digital pemerintah. o Melakukan penguatan terhadap tiga fondasi transformasi digital, yaitu: digital ID (Identitas Kependudukan Digital), digital payment, dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan sehingga tercipta ekosistem digital yang lebih efisien dan efektif. Untuk itu, seluruh satker Kementerian Agama harus	■ Mengevaluasi dan merumuskan berbagai strategi pengembangan dan inovasi terhadap aplikasi Pusaka Kementerian Agama melalui: ■ Penyediaan Aplikasi E-ling untuk seluruh produk pendidikan agama dan layanan keagamaan; ■ Memaksimalkan fungsi admin setiap Satker melalu laman *https://e-ling.kemenag.go.id/*; ■ Mematangkan laman/aplikasi sistem informasi penanganan perkara atau kasus, juga memaksimalkan penggunaan nama alternatif SIPPKA (Sistem Informasi Penanganan Perkara Kementerian Agama); ■ Melakukan '*benchmarking*' ke K/L terkait dalam rangka *lesson learned* dalam penerapan GovTech, juga PMO (*Project Management Office*) *digital* untuk penyampaian layanan, kerja sama lintas sektor, inovasi digital, dan sosialisasi massif ke media sosial sehingga akses publik dilakukan melalui satu pintu. ■ Merumuskan langkah-langkah konkrit	Pelaksana: Biro HDI, Unit Eselon 1 Pusat, Kanwil, PTKN, Kankemenag, dan UPT. Mitra Kerja: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi; Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan Majelis Agama-Agama.; BRIN, dan; Mejelis-Majelis Agama.

NO	TUJUH PROGRAM PRIORITAS	PROYEKSI/PRESKRIPSI (2024)	STRATEGI PENCAPAIAN	RENCANA AKSI NASIONAL	PENANGGUNG JAWAB
		demokrasi, juga bagi kehidupan bangsa Indonesia yang dikenal sangat religius.	membangun dan mengembangkan perlindungan dan pengamanan, terutama terhadap data digital agar mendapat jaminan sesuai standar internasional. o Setiap satker Kementerian Agama perlu gerak cepat membahas langkah konkret transformasi digital, sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Program transformasi digital tersebut harus memastikan adopsi teknologi terbaru, memastikan kelancaran implementasinya, antara lain: pembahasan strategi, alokasi sumber daya, evaluasi progres pencapaian, dan kolaborasi antarinstansi/ lembaga dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih modern, responsif, dan terkoneksi digital. o Sinkronisasi penerapan GovTeck dengan program SPBE, terutama bidang prioritas pendidikan agama dan keagamaan, bantuan sosial keagamaan, dan layanan keagamaan, hingga OSS (*Online Single Submission*) agar GocTech dapat berjalan lebih cepat. o Meningkatkan komunikasi yang efektif dan transparan, mengelola konten dan cara mengelola media sosial yang dimiliki, dan menjadikan Aplikasi *Superapps PUSAKA* sebagai satu-satunya sumber informasi dan layanan publik. o Melakukan akselerasi dalam pengimplementasian transformasi digital pengawasan melalui pengembangan Sistem Informasi Aplikasi Pengawasan Internal (SIAPI) berupa e-audit maupun e-review.	berdasarkan hasil *benchmarking* untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi, perbandingan, penyempurnaan, pengembangan, dan inovasi terhadap aplikasi Pusaka sebagai *SuperApps* agar makin informatif, praktis, dan memiliki tingkat keamanan yang berstandar dunia (tinggi). ■ Menindaklanjuti rekomendasi program-program dalam rangka diseminasi, sosialisasi, dan publikasi setiap informasi, produk serta kinerja seluruh satker Kementerian Agama kepada publik secara konsisten, terutama melalui berbagai platform media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, dan saluran lainnya dalam rangka peningkatan kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan di bidang pendidikan dan keagamaan yang disediakan. ■ Penyediaan berbagai konten yang berkualitas, menarik, dan kreatif, seperti video, infografis, atau gambar yang dapat meningkatkan *engagement* dari *follower* (masyarakat), mengevaluasi hasil diversifikasi *chanel-multi former*; hasil interaksi dengan follower, hasil pembenahan terhadap data publik yang dimiliki serta *updating* data, hasil kerja sama dengan influencer atau tokoh masyarakat. ■ Merumuskan hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja media sosial Kemenag secara berkala (Analisis *Engagement* media sosial). ■ - Menuntaskan audit terhadap aplikasi, infrastruktur, dan terutama terkait aspek keamanan SPBE di Kementerian Agama.	

NO	TUJUH PROGRAM PRIORITAS	PROYEKSI/PRESKRIPSI (2024)	STRATEGI PENCAPAIAN	RENCANA AKSI NASIONAL	PENANGGUNG JAWAB
4	**Menyajikan Layanan Keagamaan yang Premium tapi Terjangkau**	• Berbagai langkah progresif Kementerian Agama dalam aspek pelayanan keagamaan didasari kebijakan pemerintahan yang dipimpin Presiden RI. Salah satu agenda nasional yang menjadi prirориtas utama adalah perbaikan sistem pelayanan publik. Dalam konteks ini, setiap layanan yang disediakan Kemenag harus mempu memenuhi ekspektasi publik. • Kementerian Agama telah meletakkan peningkatan pelayanan keagamaan pada empat kerangka besar kebijakan Nasional, yaitu: 1) revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA); 2) revitalisasi Badan Kemakmuran Masjid (BKM); 3) peningkatan pelayanan haji, dan; 4) transformasi digital. • Sembilan fakta yang merefleksikan transformasi digital dalam sistem pelayanan keagamaan di Kemenag, yakni: aplikasi PUSAKA Super Apps; Siskohat yang terintegrasi; sertifikasi halal murah dan mudah dengan Sihalal; registrasi nikah murah dan mudah melalui Simkah, Sukinah, dan lainya; ASN semakin smart dan profesional dengan MOOC; layanan disabilitas melalui berbagai Kitab Suci (seperti Al-Qur'an, Al-Kitab, Injil, dan Dhammapada dalam bentuk Braille, Isyarat dan Audio), dan Website Ramah Disabiltas, serta; peningkatan kemudahan akses data melalui Sistem Integrasi Data. • Terkait layanan PHU, Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia tahun 2022 yang dikeluarkan BPS meningkat tajam dari 85,91 (2019)menjadi 90,45 (2022). Kepuasan paling signifikan disumbangkan layanan di Arofah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Meskipus hasil indeks 2023 belum dirilis BPS, Kemenag perlu mengantisipasi dampak kenaikan	o Kementerian Agama perlu konsisten dan terus melakukan peningkatan dan inovasi SPBE terkait layanan keagamaan yang disediakan. Kata kuncinya adalah melakukan inovasi 'tanpa henti' karena setiap teknologi informasi terbaru (terkini), pada saatnya akan menjadi 'usang' dan ditinggalkan seiring dinamika dan temuan ternologi terbaru yang begitu cepat. o Merancang, menetapkan, dan mengimplementasikan secara lebih konkrit konsep revitalisasi KUA, antara lain mengubah 'paradigma' bahwa KUA tidak hanya difungsikan untuk layanan pernikahan (umat Islam), tetapi juga dimungkinkan untuk melayani atau memfasilitasi umat lain dalam urusan perkawinan pada kondisi tertentu. o Mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait dalam penguatan masjid di seluruh Indonesia, baik dalam memprofesionalkan pengelolaan masjid, moderasi, dan pemberdayaan masjid. Revitalisasi BKM tersebut mesti mempertimbangan aspek kesejahan, struktur, SDM, dan aset serta potensi kolaborasi BKM dengan lembaga filantropi yang dikelola BUMN maupun masyarakat. o Berdasarkan hasil evaluasi 9 trategis peningkatan layanan penyelenggaraan haji sebelumnya, strategi yang ditetapkan tahun 2024, antara lain: 1) penambahan kuota haji sebanyak 20.000 setelah sebelumnya mendapat kuota dasar 221.000 Jemaah, 2) skema pelunasan cicilan untuk pembayaran Bipih; 3) persyaratan Istitha'ah Kesehatan sebelum pelunasan Bipih, 4) rekrutmen petugas haji secara digital dan terbuka, 5) kesempatan	■ Peningkatan sinergi, kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi intertenal satker Kementerian Agama pusat-daerah maupun relasi eksternal dengan K/L terkait, yang menghasilkan rumusan dan langkah konkrit dalam rangka penjaminan mutu pelayanan keagamaan yang makin premium dan terjangkau. ■ Menuntaskan pembangunan gedung KUA proyek SBSN, penataan sarpras (*front office*) KUA; transformasi layanan KUA yang berbasis digital; supervisi program revitalisasi KUA; ■ bimtek khusus bagi SDM yang mengelola pelayanan di KUA. ■ Mengevaluasi dan mengembangkan konsep revitalisasi BKM, baik dalam upaya profesionalitas pengelolaan masjid, moderasi beragama, dan pemberdayaan masjid ke level yang lebih paripurna, yaitu menjadikan masjid sebagai pusat peradaban umat. ■ Merancang program BKM dan rumah ibadah lainnya yang bersifat kolaboratif, antara lain: pelatihan takmir MPBM dan rumah ibadah lainnya; pendataan dan updating data masjid dan rumah ibadah lainnya; inventarisasi aset dan advokasi BKM dan rumah ibadah lainnya; sosialisasi sertifikasi halal dan pendampingan melalui masjid dan rumah ibadah lainnya; pendirian BMT di masjid dan rumah ibadah lainnya; digitalisasi manajemen masjid dan rumah ibadah lainnya; penerapan konsep 'ramah' pada masjid dan rumah ibadah lainnnya. ■ Mengembangkan dan menyempurnakan sistem seleksi petugas haji, sistem pelatihan petugas haji, bimsik jamaah haji prakeberangkatan, bimsik calon jamaah haji sepanjang tahun dengan	Pelaksana: Ditjen Bimas-Bimas (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Pusbimdik Khonghucu), Ditjen PHU, BPJPH, Badan Litbang dan Diklat, Biro HDI, Biro HKLN. Mitra Kerja: Kemsetneg; Kementrian PANRB; Bappenas; LAN; Ombusmen; Kemendikbud Ristek; BRIN; Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri; Baznas; dan Majelis Agama-Agama.

NO	TUJUH PROGRAM PRIORITAS	PROYEKSI/PRESKRIPSI (2024)	STRATEGI PENCAPAIAN	RENCANA AKSI NASIONAL	PENANGGUNG JAWAB
		biaya haji. Sebab, prestise dan animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi, sementara kuotanya sangat terbatas. • Tentang layanan BPJPH, amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juncto UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta arahan Presiden RI bahwa Indonesia berpotensi sebagai pusat industri halal dunia, sekaligus kiblat industri fashion dunia di tahun 2024. • Kementerian Agama dalam beberapa terakhir meluncurkan berbagai program yang menyasar kaum difabel, sebagaimana amanat UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya pasal 14 yang mengatur lima hak keagamaan penyandang disabilitas. • - Hingga 2023, Kementerian Agama telah mengeluarkan regulasi terkait tata kelola dan layanan keagamaan, antara lain: 19 Paraturan Menteri Agama, 216 Keputusan Menteri Agama, 1 Instruksi Menteri Agama, 96 Keputusan Pejabat Eselon I dan 10 Surat Edaran. Namun demikian, upaya untuk penyediaan, penataan, dan harmonikasi peraturan perundang-undangan terkait tata kelola dan di bidang pelayanan maupun pendidikan keagamaan masih menyisakan sejumlah PR yang mesti dituntaskan.	pemberian kuota pendamping lansia di pelunasan tahap ke-2, 6) program haji ramah Lansia di penyelenggaraan haji tahun 2024, 7) pemberian materi latihan fisik dan penggunaan sarana prasarana haji pada saat bimbingan manasik haji, 8) pelayanan *One Gate System* di asrama haji, 9) antispasi *heat strok* dan pembinaan jemaah untuk menjaga kondisi kesehatannya dengan meminimalisir kontak langsung dengan sinar matahari, 10) skema tinggal di hotel jemaah haji sekitar Jamarat, 11) melakukan evaluasi terhadap kinerja Syarikah Masyarik dan memilih Syarikah melalui mekanisme *Beauty Contest*, 12) diberikan makan 3x perhari selama tinggal di Saudi dengan cita rasa Indonesia, 13) akomodasi jemaah haji terbatas di 5 lokasi: Syisyah, Raudhah, Jarwal, Misfalah, Rea Bakhsy (kecuali Mahbas Jin), dan 14) melakukan pembinaan jemaah terkait pembayaran/pemotongan Dam melalui Bank Arab Saudi/RPH resmi dan sedang dikaji pemotongan dan pendistribusiannya di tanah air. o Ditjen PHU juga perlu merumuskan dan menetapkan strategi pelayanan haji yang lebih konkrit dan terukur capaiannya di tahun 2024, terutama dalam mengatasi kondisi "kekinian", antara lain mengkaji dan mendefinisikan ulang konsep 'istataah' sebagai syarat menunaikan ibadah haji. Berbagai konsep 'istataah' tersebut dapat dikembangkan dan dijadikan alternatif dalam rangka menjawab 'kebuntuan' daftar calon Jemaah haji yang semakin panjang. o Percepatan implementasi empat aspek yang mendukung suskesnya layanan keagamaan bagi penyandang disabilitas, yaitu: 1) pemenuhan	berbagai pendekatan dan inovasi yang makin berbasis digital. ■ Finalisasi hasil muzakarah nasional tentang "Istitaah" haji terkait BIPIH dan menetapkannya sebagai kebijakan pemenrintah yang berkekuatan hukum. ■ Peningkatan program edukasi dan sosialisasi sadar halal kepada pelaku usaha. Pelibatan penyuluh agama dan fungsional terkait dalam kampanye JPH ke pelaku usaha dan pendamping sertifikasi halal. ■ Mengembangkan dan mengivonasi program akreditasi LPH menuju full digital melalui: (1) Gerakan Nasional Mandatori Halal (GNMH), melibatkan seluruh stakeholder, yang akan menjaring pelaku usaha di 3.000 desa; (2) *Fashion show* untuk promosi kain halal di 5 negara; (3) Asesmen LHLN sebanyak 32 LHLN dari 20 Negara dalam rangka saling pengakuan dan keberterimaan sertifikat halal; (4) Akselerasi Rekognisi Produk Halal Impor; (5) Pengawasan JPH terpadu dengan K/L terkait; (6) Implementasi sidang fatwa produk halal pada MUI Kab/Kota untuk sertifikasi regular; (7) Percepatan perubahan PP 39 Tahun 2021 dan regulasi turunannya; (8) Percepatan sertifikasi jasa penyembelihan, dan; (9) Kolaborasi fasilitasi sertifikasi halal di K/L pusat dan daerah. ■ Membentuk lembaga penjaminan mutu layanan keagamaan di seluruh unit/organisasi pelayanan publik Kementerian Agama. ■ Melaksanakan program pelatihan, TOT Trainer, pendampingan, studi banding, *benchmarking*, *Short Courses*, dan beasiswa studi lanjutan di bidang *Artificial Inteligence* bagi ASN gugus terdepan dalam pelayanan publik	

NO	TUJUH PROGRAM PRIORITAS	PROYEKSI/PRESKRIPSI (2024)	STRATEGI PENCAPAIAN	RENCANA AKSI NASIONAL	PENANGGUNG JAWAB
			sarpras yang ramah bagi kaum difabel; 2) penyediaan SDM yang memiliki kecakapan khusus dalam penanganan dan pendampingan bagi disabilitas, 3) penerapan *Standart Operational Procedur* (SOP) pelayanan bagi difabel, dan; 4) penguatan regulasi layanan bagi penyandang disabilitas. o BPJPH telah menargetkan batas akhir penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal, yaitu 17 Oktober 2024. Untuk itu, 9 strategi percepatan sertifikasi halal yang perlu segera diimplementasikan secara lebih teknis dan terukur yaitu: (1) Gerakan Nasional Mandatori Halal (GNMH), melibatkan seluruh *stakeholder*, yang akan menjaring pelaku usaha di 3.000 desa; (2) *Fashion sho*w untuk promosi kain halal di 5 negara; (3) Asesmen LHLN sebanyak 32 LHLN dari 20 Negara dalam rangka saling pengakuan dan keberterimaan sertifikat halal; (4) Akselerasi Rekognisi Produk Halal Impor; (5) Pengawasan JPH terpadu dengan K/L terkait; (6) Implementasi sidang fatwa produk halal pada MUI Kab/Kota untuk sertifikasi regular; (7) Percepatan perubahan PP 39 Tahun 2021 dan regulasi turunannya; (8) Percepatan sertifikasi jasa penyembelihan, dan; (9) Kolaborasi fasilitasi sertifikasi halal di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN. o Penguatan program monitoring dan evaluasi serta perumusan rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan rencana aksi terkait implementasi layanan keagamaan yang premium dan serba mencakup di seluruh satker Kementerian Agama. o Peningkatan program otomatisasi layanan di seluruh satker Kementerian Agama berbasis *Artificial Inteligence*	Kemenag; ■ Melakukan MoU dan Perjanjian Kerja Sama dengan lembaga K/L terkait implementasi pelayanan berbasis *Artificial Inteligence* dan *Block Chain*. ■ Merancang, merumuskan, finalisasi dan penetapan sejumlah regulasi prioritas, yaitu: (1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Kerukunan Umat Beragama; (2) Revisi Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal; (3) Regulasi tentang ijin usaha PPIU dan PIHK, yang membutuhkan PP Pengganti UU tentang Cipta Kerja sebagai landasan hukum; (4) Perubahan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, sebagai konsekuansi terbitnya UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang disertai Perpres 82 Tahun 2021, juga PMA 5, 30, 31, dan 32 Tahun 2020; (5) Penataan kelembagaan serta harmonisasi regulasi terkait buku pendidikan agama dan keagamaan, khusunya PMA Nomor 9 Tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama dan PMA Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar Mutu Buku Umum Keagamaan. Untuk itu, perlu dirancang dan ditetapkan revisi atau peraturan baru tentang buku pendidikan agama dan keagamaan, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.	

NO	TUJUH PROGRAM PRIORITAS	PROYEKSI/PRESKRIPSI (2024)	STRATEGI PENCAPAIAN	RENCANA AKSI NASIONAL	PENANGGUNG JAWAB
			dan Block Chain, bekerja sama dengan K/L terkait. o Menuntaskan program penyediaan, penataan, dan harmonisasi regulasi terkait layanan di bidang agama maupun pendidikan keagamaan, juga penataan kelembagaan serta harmonisasi regulasi terkait buku pendidikan agama dan keagamaan.		
5	**Mengusung Layanan Pendidikan yang Inovatif dan Transformatif**	• Kementerian Agama telah menerapkan teknologi dalam layanan pendidikannya, antara lain melalui portal satudata.kemenag.go.id. Transformasi digital aspek pendidikan tersebut mengintegrasikan penyajian data pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Melalui portal tersebut masyarakat dapat menemukan berbagai data yang dibutuhkan. • Kementerian Agama juga telah menerapkan teknologi dalam layanan pendidikannya, antara lain melalui pembentukan pusat pelayanan guru dan tenaga kependidikan madrasah secara digital melalui SIMPATIKA, dan pengelolaan data pendidikan Islam secara digital melalui EMIS. Kedua program tersebut dapat menghemat anggaran untuk melakukan verifikasi dan validasi data secara manual. • Selain SIMPATIKA dan EMIS, terdapat pembangunan Learning Manajemen Sistem (LMS) pembelajaran pendidikan Agama Buddha untuk memberikan akses pendidikan bagi siswa didik, dan penggunaan aplikasi SIAGA (Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama) sebagai langkah percepatan pendataan guru agama Buddha. Layanan monitoring dan evaluasi secara digital dengan menggunakan aplikasi eMonev Bappenas dan SMART DJA lingkup pendididikan tinggi	Strategis jangka panjang, antara lain: o Melakukan penguatan platform pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan berbasis teknologi: yang berpusat pada siswa, interdisipliner, relevan, berbasis proyek, dan kolaboratif; - Peningkatan kualitas guru dan kepala madrasah dan pendidikan keagamaan: memperbaiki sistem rekrutmen, meningkatkan kualitas pelatihan, penilaian, serta mengembangkan komunitas/platform pembelajaran. o Pembangunan madrasah dan pendidikan keagamaan (lingkungan belajar) masa depan: aman dan inklusif, memanfaatkan teknologi, kolaboratif, kreatif, dan sistem belajar berbasis pengalaman. o Pembentukan pendidikan tinggi keagamaan kelas dunia: diferensiasi misi pendidikan tinggi sebagai pusat-pusat unggulan serta mempererat hubungan dengan industri dan kemitraan global. o Alih status kelembagaan pendidikan dengan mendirikan satuan pendidikan negeri dan penegerian satuan pendidikan. Strategi jangka pendek/ menengah, antara lain: o Melakukan perencanaan program dan anggaran mandatory (seperti tunjangan guru, KIP, BOS, dan	■ Implementasi berbagai model kelembagaan pendidikan dan pembelajaran agama dan keagamaan seperti: pendidikan satu atap, pendidikan inklusi, kelas filial, pembelajaran daring, kampus jauh, dan merdeka belajar. ■ afirmasi pelaksanaan Wajar Dikdas 12 Tahun pendidikan agama dan keagamaan, terutama bagi: peserta didik di daerah 3 T, juga peserta didik yang kurang beruntung dengan memperhatikan kondisi kewilayahan. ■ Merivew dan merumuskan peninjaun terhadap PP 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dalam konteks PTK non Islam. ■ Akselerasi sosialisasi dan implementasi KMA 77 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada Kementerian Agama. ■ Mematangkan mekanisme dan pedoman pendampingan korban, pembuatan SOP, pedoman, dan satgas pengaduan kasus kekerasan fisik dan psikis di lembaga pendidikan agama dan keagamaan. ■ Peningkatan program dan sosialisasikan pendidikan kesetaraan (muadalah). ■ Penguatan kebijakan afirmatif terkait pemenuhan syarat kemandirian	Pelaksana: Ditjen Pendis dan Ditjen Bimas-Bimas (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Pusbimdik Khonghucu), Kanwil Kemenang. Mitra Kerja: Kemendikbud-Ristek, Bappenas, Kementerian PPPA, KPAI, Komnas Anak, Badan Litbang dan Diklat, dan BRIN

NO	TUJUH PROGRAM PRIORITAS	PROYEKSI/PRESKRIPSI (2024)	STRATEGI PENCAPAIAN	RENCANA AKSI NASIONAL	PENANGGUNG JAWAB
		keagamaan Buddha. • Program kemandirian pesantren yang telah memasuki tahun keempat merupakan bentuk layanan pendidikan berparadigmatik. Pesantren diharapkan mampu berdaya dan memberdayakan, baik fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan ekonomi umat. • Layanan pendidikan yang berparadigmatik Kemenag lainnya adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), pengembangan keprofesian berkelanjutan guru dan tenaga kependidikan madrasah, dan kemah Moderasi Beragama. Isu utamanya adalah akreditasi program studi, akreditasi jurnal ilmiah, transformasi pengelolaan PTKN menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), dan program pendidikan murah dan cepat dengan Cyber Islamic University, Christian Cyber University, dan sejenisnya. • Kemenag juga tetap komitmen dalam penguatan praktik layanan pendidikan yang inklusif di semua jenjang pendidikan. Prinsip dasar dari pendidikan yang inklusif adalah mengakui dan memahami keberagaman siswa atau pembelajar, tanpa memandang perbedaan, dapat belajar bersama secara efektif. • Tantangan layanan pendidikan yang inovatif, transformatif dan inklusif yang datang dari tren perubahan struktural, otonomi pekerja, dan pemberdayaan teknologi informasi yang bersifat dinamis.	lainnya) secara lebih terukur dari segi sasaran, pemanfaatan, bertanggung jawaban, dan menggunakan pendekatan kontekstual dengan memperhitungkan kondisi unik dari setiap wilayah di Indonesia. o Peningkatan intensitas koordinasi dengan K/L lain, terutama Dirjen Anggaran Kemenkeu dan Bappenas. o Mengembangkan program kolaborasi yang lebih produktif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil dalam mengatasi tantangan dunia pendidikan agama dan keagamaan. o Mengelola setiap dampak negatif dan memanfaatkan teknologi dengan bijak dalam dunia pendidikan. o Meneguhkan komitmen antar pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi yang efektif dalam memajukan pendidikan agama dan keagamaan. o Penguatan pendidikan agama dan keagamaan bersakala internasional sehingga para lulusan dapat persaingan di tingkat global. o Melakukan berbagai inovasi dalam peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik dalam menghadapi tantangan teknologi informasi (dunia digital). o Optimalisasi publikasi, ekspose, dan sounding berbagai prestasi dan capaian di bidang pendidikan agama dan keagamaan sehingga meningkatkan awareness dan ketertarikan masyarakat pada Kementerian Agama.	lembaga pendidikan agama dan keagamaan sehingga lebih terencana, terstruktur, sistematis, dan terukur. ■ Pemanfaatan secara optimal perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam peningkatan kualitas pembelajaran, kurikulum, teks dan bahan ajar, program kegiatan, sarpras, dan lainnya sehingga berdampak pada tumbuhnya ekspektasi "lebih" publik terhadap layanan pendidikan agama dan keagamaan. ■ Diseminasi hasil penelitian dalam bentuk artikel populer dan singkat, dalam hal ini perguruan tinggi keagamaan dapat bekerja sama dengan platform yang kredibel seperti The Conversation Indonesia. Program diseminasi tersebut akan berdampak signifikan dan terdistribusi ke publik secara massif, jika hasil penelitian misalnya tentang moderasi beragama dikemas dari sesuatu yang "kompleks" menjadi bacaan yang "ringan" dan "populis".	
6	***Smart* ASN Menjawab Kebutuhan Era Digital**	• Kementerian Agama sepanjang tahun 2022 – 2023 terus menggiatkan pelaksanaan pengembangan kompetensi dengan Massive Open	o Mengembangkan seluruh potensi ASN menuju kemandirian dalam belajar, antara lain melalui Merdeka Belajar ASN untuk menambah sumber	■ Akselerasi pembenahan sistem manajemen ASN, termasuk pengembangan sistem perencanaan, pengendalian, dan pengukuran hasil	Pelaksana: Biro Kepegawaian, Badan Litbang dan Diklat Ditjen Pendis,

NO	TUJUH PROGRAM PRIORITAS	PROYEKSI/PRESKRIPSI (2024)	STRATEGI PENCAPAIAN	RENCANA AKSI NASIONAL	PENANGGUNG JAWAB
		Online Course (MOOC) Pusat Informasi Pelatihan dan Pembelajaran (Pintar). Dengan adanya MOOC Pintar dan Digital Smart class, Kementerian Agama semakin maju dalam memanfaatkan teknologi untuk penguatan kompetensi ASN dan pelayanan yang lebih efisien. Data menunjukkan bahwa sejak peluncuran MOOC Pintar pada Juli 2022, lebih dari 144.019 peserta telah memanfaatkannya untuk pengembangan kompetensi mereka. Data pada dashboard Pintar menunjukkan bahwa mayoritas peserta adalah guru madrasah (88,6%), dengan tambahan 4,8% guru sekolah umum dan 6,6% peserta non-guru. Dari segi status kepegawaian, 61,6% adalah PNS, dan 38,4% lainnya adalah Non-PNS. Sementara itu sepanjang tahun 2023 jumlah peserta yang mengakses platform Pintar terdata sebanyak 310.768 orang. Hal ini merupakan Langkah taktis yang terus dikembangkan untuk memberikan peluang sebesa-besarnya bagi ASN Kemenag	pengetahuan dan fleksibilitas ASN dalam belajar. o Penguatan otonomi belajar ASN sebagai alat untuk membantu ASN mewujukan sikap professional dan tangguh terutama dalam menghadapi era VUCA, BANI, dan industri 5.0 yang penuh ketidakpastian, kompleksitas, dan tuntutan transformasi digital "permanen" pelayanan keagamaan kepada publik. o Penerapan transformasi digital dalam proses pembelajaran ASN Merdeka Belajar, terutama untuk menguasai keterampilan yang relevan, mengubah sikap untuk mendukung perubahan, dan melakukan perubahan yang diperlukan ASN sehingga dapat berperan penting dalam pembangunan bidang agama pada masyarakat 5.0. o Peningkatan keterampilan ASN dalam bidang teknologi informasi dan analisis mendalam tentang dinamika sosial, serta pelibatan seluruh SDM dalam perancangan program pembangunan di bidang agama yang makin kompleks dan beragam. o Perlu dilakukan peningkatan profesionalitas dan moderasi beragama ASN melalui program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ASN, juga pemenuhan standar kompetensi jabatan bagi ASN dengan mengembangkan berbagai bentuk dan metode pengembangan kompetensi SDM.	serta penataan ASN, terutama pejabat fungsional secara professional dan proporsional. ■ Meningkatkan kualitas SDM dalam penyusunan bahan kebijakan, PPBJ, dan kompetensi SDM untuk peningkatan profesionalisme dan kinerja ASN. ■ Meningkatkan kompetensi ASN Kemenag melalui pelatihan manajerial, sosial kultural, dan pengembangan kompetensi lainnya melalui bekerja sama dengan unit dan instansi pembina secara terstruktur, massif, dan sistematis seperti MOOC dan e-learning. ■ Menuntaskan program pelatihan MB secara Blended Learning dalam rangka penyelesaian target tahun terakhir Renstra Kemenag. ■ Evaluasi dan meningkatkan variasi pengembangan kompetensi SDM, antara lain melalui program 'magang', short course, studi banding, benchmarking, dan peningkatan kualifikasi ■ pendidikan melalui LPDP, skema beasiswa, dan studi lanjutan S2 dan S3 bagi ASN. ■ Peningkatan kerja sama pelatihan/ penguatan kapasitas ASN Kemenag tentang ruang digital bersama Kementerian Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara, dan perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi informasi.	PTKN, Kanwil Kemenag, Mitra Kerja: Kementerian Kominfo, BSSN, Kementerian PANRB, Bappenas, LAN, BKN, dan Kemendikbudristek.
7	**Mengoptimalkan Dana Umat untuk Pengentasan dan Pemberdayaan**	• Kemiskinan adalah salah satu isu penting dalam sustainable development goals (SDGs) yang telah ditetapkan PBB. Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 yang menetapkan target pengurangan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada	o Terus mendorong kerja sama antar satker Kemenag dengan berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, civitas akademika, dunia usaha, lembaga philantropi dan pihak terkait lainnya untuk bahu-membahu, bersatu padu, dan	■ Peningkatan literasi zakat, wakaf, dan infak serta sumber dana umat lainnya dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan pengatahuan donatur, masyarakat, dan stakeholders tentang pengelolaan dana umat. ■ Implementasi program transformasi	Pelaksana: BPJPH, Ditjen Pendis dan Ditjen Bimas-Bimas (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Pusbimdik Khonghucu), Kanwil Kemenang. Mitra Kerja: Basnaz,

NO	TUJUH PROGRAM PRIORITAS	PROYEKSI/PRESKRIPSI (2024)	STRATEGI PENCAPAIAN	RENCANA AKSI NASIONAL	PENANGGUNG JAWAB
		tahun 2024. Target ini enam tahun lebih cepat dari target SDGs. • Pengelolaan dana sosial keagamaan pada enam agama tersebut difasilitasi oleh pemerintah, tetapi pada praktiknya dikelola oleh ormas keagamaan di masing-masing agama. Dalam Islam dikenal dengan istilah Zakat, Wakaf, Infak dan Sedekah. Dalam Kristen dan Katholik dikenal dengan istilah "Dana Persepuluhan". Bahkan umat Katolik juga memili dana sosial umat yang disebut BAKKAT. Hindu menyebutnya dengan istilah "Dana Punia". Dalam Buddha dapat disamakan dengan istilah "Dana Paramita". Sementara Konghucu mengenalkannya dengan istilah "Dana Kebajikan". • - Dana keagamaan yang sudah terorganisir dan terkelola dengan baik baru berjalan pada umat Islam. Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah diorganisir oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), sedangkan pengelolaan dana wakaf diorganisir oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pengelolaan Dana Punia telah diatur melalui PMA Nomor 4 Tahun 2003, tentang Pengelolaan Dana Punia. Dampak positif pemberdayaan BAKKAT selama ini sangat signifikan bagi komunitas Katolik. Namun demikian, pengelolaan dana sosial keagamaan masing-masing agama memiliki kekhasan dan kebijakan tersendiri. Pengelolaan dana umat di lingkungan Kemenag belum sepenuhnya memiliki "payung" regulasi, terutama untuk menjaga transparansi dan tingkat kepercayaan umat.	sinergi dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui optimalisasi dana sosial keagamaan umat. o Pemberdayaan dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan yang difokuskan pada tiga hal, yaitu: (1) mewujudkan mukmin yang kuat iman dan ekonomi; (2) penguatan intelektual; dan (3) penguatan teknologi. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai persoalan ekonomi, namun juga terkait akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan lainnya. o Melakukan pemetaan untuk menggambarkan potensi dana sosial keagamaan di masing-masing daerah, baik donaturnya (muzakki, waqif, dan sejenisnya) maupun penerimanya (mustahiq) agar penyaluran dana sosial keagamaan tepat sasaran dan tidak overlapping. o Penguatan lembaga dana sosial keagamaan dengan sistem akreditasi guna membangun kepercayan (trust) pada masyarakat. Pengelolaan dana sosial keagamaan harus transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan terstandar secara global. o Meminimalisasi program dan anggaran yang sekadar business as usual dengan menetapkan dan mengakselerasi program-program quick wins terkait pengelolaan dana umat dalam rangka pemberdayaan ekonomi sehingga lebih efektif dan efisien dalam upaya pengentasan kemiskinan. o Kementerian Agama perlu segera memetakan, merancang, dan menetapkan berbagai "payung" regulasi yang dibutuhkan dalam pengeloaan dana setiap umat sehingga lebih transparan dan	digital dalam pengelolaan dana umat (setiap agama yang dilayani di Indonesia) melalui sistem dan manajemen kelembagaan yang berbasis data yang akurat dan terukur. ■ Membangun dan mengembangkan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertangjawaban dalam pengelolaan dana umat (setiap agama yang dilayani di Indonesia) yang berbasis digital ataupun Artificial Intelligence (AI). ■ - Intensifikasi program koordinasi, kolaborasi, sinergi, komunikasi, dan kemitraan internal lembaga pengelola dana umat dengan donatur, juga dengan pihak eksternal terutama K/L terkait, majelis-majelis agama, organisasi sosial keagamaan, tohoh dan pemuka agama, termasuk dunia usaha dalam rangka penyaluran dana umat untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.	Bappenas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kementerian Sosial; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Majelis Agama-Agama.

NO	TUJUH PROGRAM PRIORITAS	PROYEKSI/PRESKRIPSI (2024)	STRATEGI PENCAPAIAN	RENCANA AKSI NASIONAL	PENANGGUNG JAWAB
			akuntabel, baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Agama maupun Peraturan/Edaran Dirjen Bimas Agama.		



balitbangdiklatagama
Balitbangdiklat Kemenag
@BLDK_KemenagRI
@balitbangdiklat
balitbangdiklatkemenag
balitbangdiklat.kemenag.go.id